

International
Convention
Asia School

20-23 July 2019
Chiang Mai International
and Convention Center



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

UNIT RISET & PUBLIKASI



Tody Sasmitha Jiwa Utama S.H., LL.M. **Ketua Unit**
Muhammad Fatahillah Akbar S.H., LL.M. **Sekretaris**
Rizky Septiana Widyaningtyas S.H., M.Kn. **Sekretaris**

Unit ini terdiri dari 2 divisi yaitu Divisi Riset yang bertugas di bidang penelitian yang mengelola dan mengadministrasikan penelitian dosen dan mahasiswa dan Divisi Publikasi yang bertugas mengelola dan mengadministrasikan publikasi-publikasi baik dalam bentuk jurnal maupun non jurnal

LEX NEMINI OPERATUR INIQUUM
NEMINI FACIT INJURIAM

DAFTAR ISI

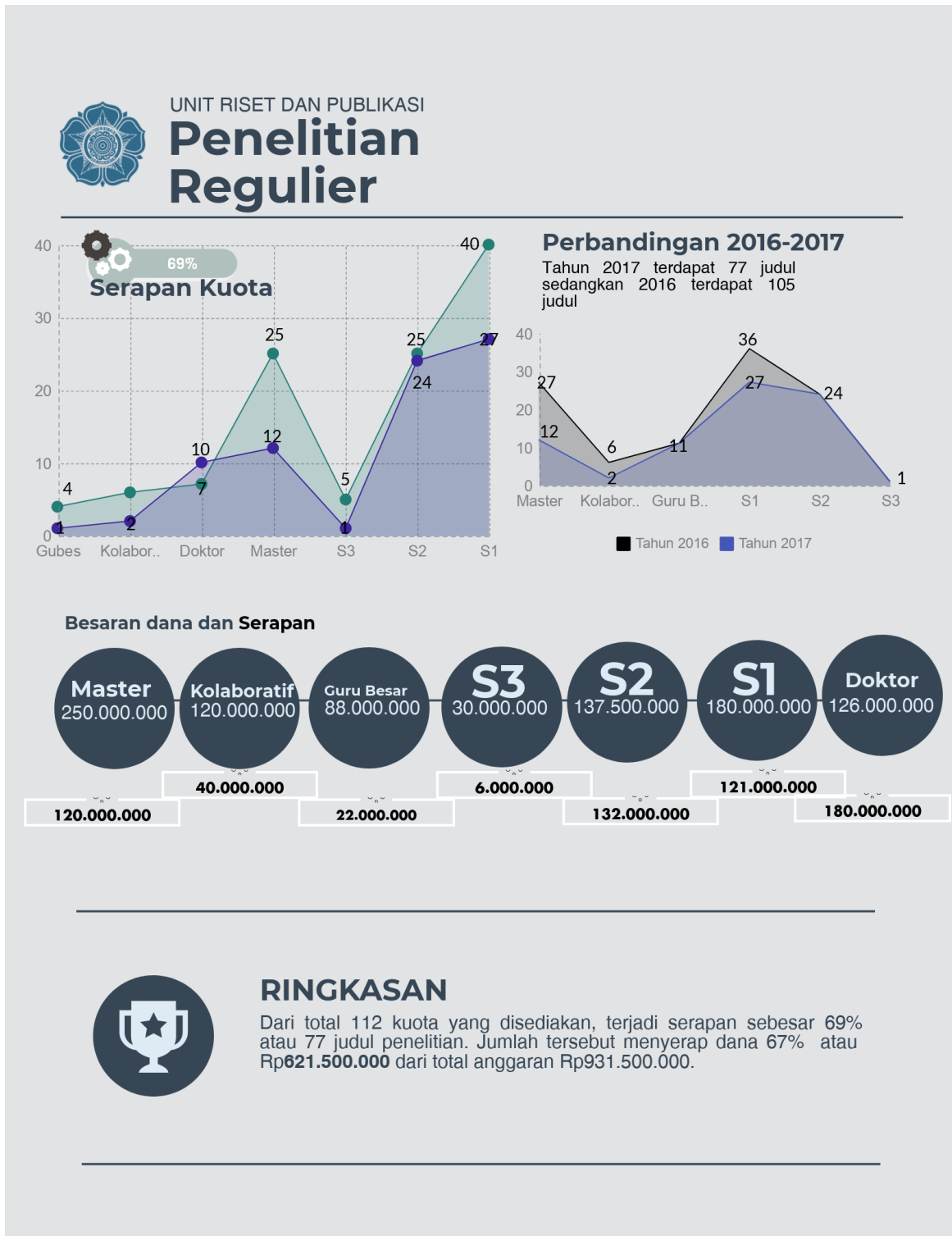
DIVISI RISET	3
A. Penelitian Reguler	4
B. Hibah Riset Penelitian Kompetitif.....	8
C. Workshop Penelitian Mahasiswa	12
D. Workshop Publikasi Mahasiswa	14
E. Workshop <i>Legal Research for Intermediate</i>	16
F. Workshop Penulisan Hukum untuk Publikasi Internasional dan Persiapan Studi Doktoral.....	19
G. Bulaksumur Legal Discussion (BLD)	21
H. Gajah Mada's Sources of Legal Research	25
I. Kegiatan yang belum terlaksana.....	28
DIVISI PUBLIKASI.....	30
A. Penerbitan Jurnal Mimbar Hukum	31
B. Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum.....	34
C. Penerbitan <i>Working Paper/Policy Paper/Policy Brief</i>	36
D. Otonomi Publikasi.....	38
E. <i>Workshop Open Journal System (OJS)</i> untuk Pengelola Jurnal	39
F. <i>Call for Article</i> Jurnal Mimbar Hukum	40
G. <i>Workshop SINTA</i> bagi Dosen.....	41
H. Persiapan Reakreditasi Jurnal Mimbar Hukum.....	42
I. <i>Workshop "Akreditasi Mimbar Hukum"</i>	43
J. Insentif Publikasi Tahun 2017 Unit Riset dan Publikasi FH UGM	44
K. Penerbitan Edisi Khusus Jurnal Mimbar Hukum (<i>Mimbar Hukum Special Issue</i>)...	46
L. Indeksasi Asean Citation Index (ACI)	48
M. Kegiatan yang Belum Terlaksana.....	49

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DIVISI RISET
UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2017**

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?” (Albert Einstein)

DIVISI RISET

A. Penelitian Reguler



1. Deskripsi Kegiatan

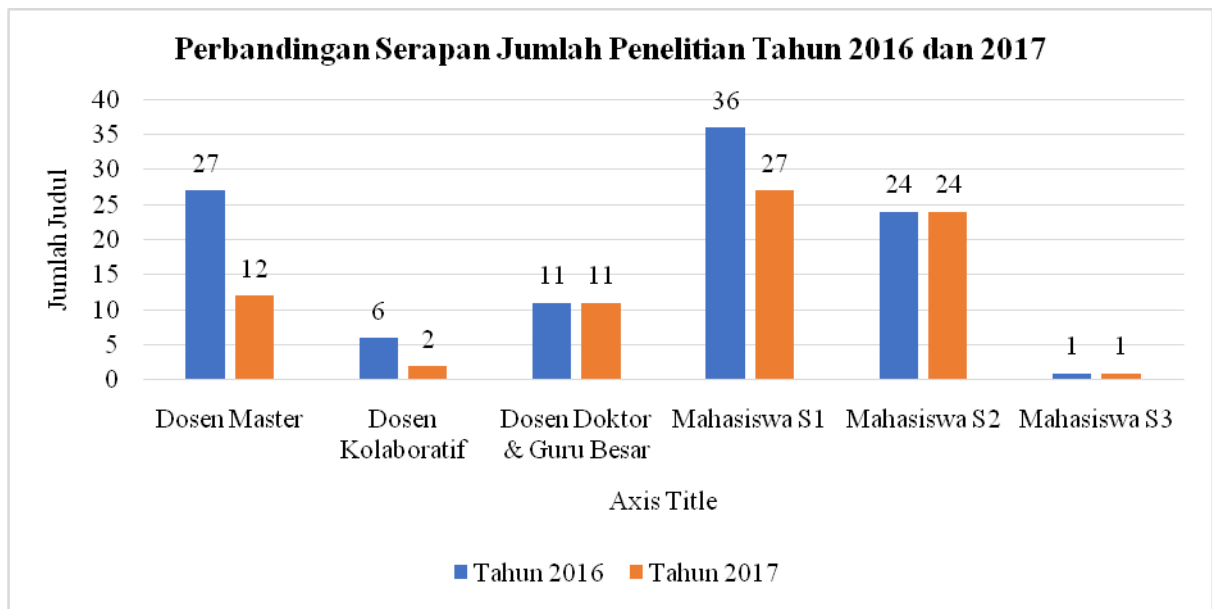
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan minat penelitian bagi Dosen FH UGM dan melatih penelitian bagi Mahasiswa FH UGM. Hasil yang diharapkan dari Program ini antara lain : Laporan Hasil Penelitian, Bukti Submit Manuskrip Jurnal dan Laporan Penggunaan Dana, serta Poster Penelitian khusus Penelitian Mahasiswa.

2. Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian dilaksanakan sejak 8 Maret mulai Sosialisasi dan 31 Maret 2017 adalah tenggat waktu pengumpulan proposal dan berakhir masa kontrak 30 Oktober 2017. Pada penelitian ini hanya dibuka satu termin, karena dibuka penelitian kompetitif pertama kali di tahun 2017.

Serapan Penelitian adalah 69 Persen dari Total Kuota yang disediakan Fakultas Hukum dimana rincian serapan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Skema	Jumlah	Satuan	Jumlah Serapan (Setelah Kontrak)
1.	Penelitian Guru Besar	4	Judul/Skema	1
2.	Penelitian Dosen Kolaboratif	6	Judul/Skema	2
3.	Penelitian Dosen Doktor	7	Judul/Skema	10
4.	Penelitian Dosen Master	25	Judul/Skema	12
5.	Penelitian Mahasiswa S3	5	Judul/Skema	1
6.	Penelitian Mahasiswa S2	25	Judul/Skema	24
7.	Penelitian Mahasiswa S1	40	Judul/Skema	27
Total		112	Judul	77
Prosentase		100%	Judul	69%



3. Catatan dan Hambatan

Selama jalannya proses Penelitian Reguler Tahun 2017 ada beberapa catatan dan hambatan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya antara lain:

- 1) Kepengelolaan baru dibentuk dengan formasi baru dimana Riset dan Publikasi digabung dengan personil baru di Bulan Februari 2017. Oleh karena itu, program dimulai pada Maret 2017 dan hanya dapat terlaksana 1 periode yang menyebabkan penurunan penyerapan anggaran. Walaupun penurunan penyerapan dialihkan untuk anggaran kompetitif.
- 2) sarana pendukung yaitu sistem submisi penelitian yang baru yang masih dalam tahap uji coba yang diterapkan dalam submisi proposal yang tidak sesuai harapan karena masih terdapat kesalahan sistem beberapa bagian sistem baru tersebut menjadikan submisi proposal sempat terkendala;
- 3) setelah pelaksanaan presentasi dan penandatanganan kontrak, terdapat 1 peneliti mahasiswa S1 mengundurkan diri dan 5 peneliti mahasiswa S2 mengundurkan diri;
- 4) pencairan dana tahap 1 sebesar 80 % dari total dana penelitian masing-masing skema dicairkan oleh pihak keuangan tidak sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, hal ini karena tidak ada pemberitahuan dari pihak keuangan terkait kekurangan berkas penelitian yang harus dilengkapi oleh peneliti;
- 5) presentasi hasil penelitian ada kendala terkait tidak dapat hadirnya peneliti dalam proses presentasi yang menyebabkan harus diadakan presentasi susulan;
- 6) proses pengumpulan laporan hasil dan berkas-berkas pendukung lainnya juga sempat molor karena ada beberapa peneliti yang tidak dapat mengumpulkan tepat waktu disebabkan karena sulitnya menemui reviewer, sehingga kami sempat mengundurkan batas waktu pengumpulan; dan

- 7) proses pengumpulan yang diundurkan juga berakibat pada proses pencairan dana yang harus diundur, namun diundurnya proses pencairan dana masih tetap dalam batasan timeline yang sudah disusun.

4. Rekomendasi

Rekomendasi perbaikan untuk Program Penelitian Reguler yaitu :

- 1) tahapan persiapan dan sosialisasi program diusahakan sudah dimulai sejak akhir bulan Januari untuk memaksimalkan penyerapan jumlah proposal penelitian yang masuk;
- 2) perbaikan sistem submisi atau mengembalikan proses submisi menggunakan sistem email dan form online saja;
- 3) sedapat mungkin untuk memberikan waktu yang cukup untuk para peneliti melakukan revisi proposal setelah presentasi dan memaksimalkan waktu pembukaan submisi proposal untuk memaksimalkan peneliti dalam menyusun proposal yang baik dan benar;
- 4) pemberitahuan dan sinkronisasi jadwal penelitian dengan pihak-pihak terkait antara lain pihak keuangan terutama PUMK-PUMK terkait;
- 5) mengintensifkan komunikasi dengan pihak PUMK terkait untuk mempercepat proses pencairan dana;
- 6) dibutuhkan adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait tentang sinkronisasi jadwal tahapan penelitian dengan jadwal kalender akademik; dan
- 7) penentuan reviewer penelitian harus mempertimbangkan pula dengan melihat kesibukan dari masing-masing reviewer.

B. Hibah Riset Penelitian Kompetitif



Penelitian Kompetitif

UNIT RISET DAN PUBLIKASI FH UGM

KOMPETITIF?

Program hibah penelitian kompetitif ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Dosen melaksanakan kewajiban Tri Dharma Perguruan tinggi yang salah satunya adalah penelitian

Kuota&Serapan



Kategori	Nilai
KUOTA	3
SERAPAN	1

Besaran Dana

50juta/judul
Rp150.000.000



PERAIH HIBAH

FADHILATUL HIKMAH, S.H., LL.M
ANUGRAH ANDITYA, S.H., M.T.
DR ARVIE JOHAN, S.H., M.Hum

Kesesuaian
Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepabeanan
Dengan Prinsip Umum WTO Dalam Article 4 Trade
Facilitation Agreement





Nilai hibah yang cukup tinggi dan kuota yang terbatas menjadi salah satu tolak ukur kompetitif penelitian ini dibanding dengan penelitian reguler yang juga ditawarkan oleh Unit Riset dan Publikasi. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini tentunya adalah publikasi internasional ataupun buku yang akan menjadi rujukan sesuai dengan bidang penelitian yang dikaji.



1. Deskripsi

Program hibah penelitian kompetitif ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Dosen melaksanakan kewajiban Tri Dharma Perguruan tinggi yang salah satunya adalah penelitian. Program ini dibuka untuk menampung usulan penelitian dosen berkaitan dengan pengembangan bidang keilmuannya dan diharapkan dapat sejalan dengan kemanfaatan kepada masyarakat hasil penelitian yang dilakukan sehingga sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi. Nilai hibah yang cukup tinggi dan kuota yang terbatas menjadi salah satu tolak ukur kompetitif penelitian ini dibanding dengan penelitian reguler yang juga ditawarkan oleh Unit Riset dan Publikasi. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini tentunya adalah publikasi internasional ataupun buku yang akan menjadi rujukan sesuai dengan bidang penelitian yang dikaji.

2. Pelaksanaan:

Hibah Kompetitif ini melalui beberapa mekanisme yakni seleksi proposal dan penerimaan proposal dengan 3x presentasi.

a) Seleksi Proposal

Usulan Proposal Hibah Riset Kompetitif di review oleh 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mekanisme *Desk Review*, yakni: 1. Prof. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA.; 2. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M.; 3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.; 4. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.; 5. Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.; 6. Drs. Dumairy, M.A.; dan 7. Surya Tjandra, S.H., LL.M., Ph.D. *Review* dilaksanakan pada Selasa tanggal 9 Mei 2017 dengan pengusul berjumlah 5 (lima) tim dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengusul	Judul
1	Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.	REDUNDANSI PELAKSANAAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KELAUTAN (STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU)
	Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.	
2	Anugrah Anditya, S.H., M.T.	KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN ARTICLE 4 TRADE FACILITATION AGREEMENT
	Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M.	
	Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.	
3	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	URGENSI PENGATURAN SHARING ECONOMY DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI ANGKUTAN BERBASIS APLIKASI ONLINE
	Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M.	
4	Susilo Andi	

	Darma, S.H., M.Hum.	STUDI PUTUSAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YOGYAKARTA
	Laras Susanti, S.H., LL.M.	
5	Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.	MAKNA TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL “TIDAK MEMBAYAR UTANG” DALAM SYARAT KEPAILITAN MENURUT PASAL 2 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
	Dr. Sutanto, S.H., M.S.	

Pada tahapan ini tim atas nama Anugrah Anditya, S.H., M.T., Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. dan Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum. dengan judul “KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN ARTICLE 4 TRADE FACILITATION AGREEMENT” dinyatakan lolos dan sebagai pemenang Hibah Riset Kompetitif Tahun 2017 dengan dituangkan pada berita acara pada Selasa tanggal 9 Mei 2017.

b) Presentasi Penelitian Hibah Kompetitif

1) Presentasi Pertama

Presentasi dilaksanakan sehari setelah pengumuman pemenang Hibah Riset Kompetitif Tahun 2017 yakni **Rabu tanggal 10 Mei 2017** yang dipresentasikan oleh Anugrah Anditya, S.H., M.T. dan Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. dengan *board reviewer* 1. Prof. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA.; 2. Prof. M. Hawin, S.H., LL.M.; 3. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.; 4. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

2) Presentasi Kedua

Presentasi dilaksanakan pada **Kamis tanggal 5 Oktober 2017** dengan ketentuan presentasi penelitian berupa laporan interim dengan *board reviewer* 1. Prof. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA.; 2. Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M.; dan 3. Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D. Selesaiannya tahapan ini, tim peneliti berhak mendapatkan dana hibah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana hibah.

3) Presentasi Ketiga

Presentasi dilaksanakan pada **Selasa tanggal 15 November 2017** dengan ketentuan presentasi laporan akhir dengan *board reviewer* 1. Prof. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA.; dan 2. Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M. Selesaiannya tahapan ini, tim peneliti berhak mendapatkan dana hibah sebesar 30% (lima puluh persen) dari total dana hibah.

Tim Peneliti mendapatkan 20% dari dana hibah setelah mengumpulkan **Laporan Akhir Hibah Riset Kompetitif, Manuskrip Jurnal hasil Penelitian berbahasa Inggris sesuai dengan format jurnal internasional yang ditui, Bukti submisi pada jurnal internasional yang ditui, Softcopy Draft Buku Hasil Penelitian dan softcopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Penelitian sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Penelitian** sesuai kesepakatan kontrak.

3. Catatan dan Hambatan:

- a) Catatan dari *board reviewer* saat eksaminasi proposal usulan dari 5 (lima) tim dinyatakan sangat dibawah standar
- b) Tim Peneliti tidak memiliki *awareness* terhadap jadwal pengumpulan dan presentasi
- c) Susahnya menyesuaikan waktu bersamaan diantara *board reviewer*
- d) Tim Peneliti terlambat mengumpulkan laporan penelitian sehingga mengganggu jadwal *timeline* penelitian kompetitif
- e) Tim Peneliti terlambat mengumpulkan Laporan Akhir Hibah Riset Kompetitif, Manuskrip Jurnal hasil Penelitian berbahasa inggris sesuai dengan formatjurnal internasional yang dituiu, Bukti submisi pada jurnal internasional yang dituju, Softcopy Draft Buku Hasil Penelitian dan softcopy Laporan Penggunaan Dana Hibah Penelitian sesuai dengan RencanaAnggaran Belanja Penelitian.

4. Rekomendasi:

- a) Tenggat waktu usulan proposal diperpanjang dibanding Program Hibah Riset Kompetitif Tahun 2017 untuk membuka peluang dan kesempatan membuat usulan proposal sebaik mungkin dan memperbanyak jumlah Tim Pengusul
- b) Membuat *timline* yang berisi jadwal pengumpulan dan presentasi yang disepakati bersama antara URP dan tim peneliti di awal setelah pengumuman pemenang hibah untuk meningkatkan *awareness* tim peneliti serta mengantisipasi keterlambatan pengumpulan laporan dan tidak terganggunya jadwal presentasi yang telah ditentukan
- c) Kedisiplinan tim peneliti dalam mengumpulkan laporan hasil penelitian akan berdampak kepada lebih tertata dan lebih terjadwalnya *board reviewer* agar bisa hadir bersamaan sesuai kesepakatan jadwal presentasi yang telah ditentukan oleh URP.

C. Workshop Penelitian Mahasiswa



30 MARET 2017

Penelitian Mahasiswa

58 Peserta Mahasiswa



INTRODUCTION

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan minat, pemahaman dan kemampuan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UGM dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang kekhususannya sesuai dengan metode penelitian

PEMBICARA

Sri Wiyanti Eddyono,
S.H., LL.M., Ph.D.

- Cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang sedang berkembang.
- Cara penyusunan latar belakang permasalahan dalam membangun konstruksi berpikir mengenai permasalahan hukum yang ingin diteliti serta cara menyusun rumusan masalah yang tepat.
- Cara menentukan Metode Penelitian yang tepat dalam menjawab permasalahan yang ada.
- Cara menyusun *literature review* yang relevan dengan permasalahan.



Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

- Ragam pendekatan dalam penelitian hukum.
- Hal-hal fundamental yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian lapangan, penelitian sosio-legal dan metode penelitian lain yang dikenal dalam penelitian hukum.
- Perbedaan mendasar antara penalaran dan penulisan dalam ilmu hukum dan ilmu sosial.
- Perbedaan pendekatan, cara, atau gaya penulisan ilmiah (seperti penelitian), dibandingkan dengan menulis untuk media lain.



1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan minat, pemahaman dan kemampuan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UGM dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang kekhususannya sesuai dengan metode penelitian.

2. Pelaksanaan

Workshop dilaksanakan 30 Maret 2017, Pukul 13.00 di III.1.1. diisi oleh Pembicara yang terdiri dari Bapak Dr. Rikardo Simarmata, S.H. yang mengisi materi penelitian socio-legal dan Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D. yang mengisi materi penelitian normatif dengan dimoderatori Ketua Unit Tody Sasmita Jiwa Utama, S.H., LL.M. Workshop ini diikuti 58 Mahasiswa.

3. Catatan dan Hambatan

- a) Waktu harus disesuaikan dengan jadwal mahasiswa, dimana sangat sulit mencari waktu kosong.
- b) Pengurusan RAB sudah disepakati sejak awal dengan Dekanat, namun untuk Eksekusinya tetap melalui Proses Birokrasi yang cukup panjang.

4. Rekomendasi

- a) Diperlukan list ekspertise dosen-dosen FH UGM untuk menyesuaikan dengan pelatihan yang sedang diselenggarakan oleh URP.
- b) Kesepakatan RAB dapat diberikan memo sejak awal pelaksanaan kegiatan.

D. Workshop Publikasi Mahasiswa



28 SEPTEMBER 2017

Publikasi Mahasiswa

58 Peserta Mahasiswa



INTRODUCTION

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Workshop Publikasi Penelitian Mahasiswa ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengolah dan menindaklanjuti hasil penelitian mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UGM.

Selain itu, juga diharapkan dapat mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh Unit Riset dan Publikasi dalam hal ini Jurnal Penelitian Hukum yang tentunya akan meningkatkan record publikasi sivitas akademika Fakultas Hukum UGM.

PEMBICARA



**Linda
Yanti Sulistiawati S.H.,
M.Sc., Ph.D.**

"Writing your research"



**Agung
Wardana, S.H., LL.M.,
Ph.D.**

"Menembus
Jurnal Internasional"

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Workshop Publikasi Penelitian Mahasiswa ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengolah dan menindaklanjuti hasil penelitian mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UGM. Selain itu, juga diharapkan dapat mengoptimalkan fasilitasi yang diberikan oleh Unit Riset dan Publikasi dalam hal ini Jurnal Penelitian Hukum yang tentunya akan meningkatkan record publikasi sivitas akademika Fakultas Hukum UGM.

2. Pelaksanaan

Workshop dilaksanakan pada Kamis 28 September 2017 di ruang III.1.1 FH UGM. Workshop diisi oleh Pembicara yang terdiri dari Linda Yanti Sulistiowati, S.H., LL.M., Ph.D. dengan materi "*writing your research*" dan Agung Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. "Menembus Jurnal Internasional", serta tim Divisi Publikasi URP. Workshop diikuti 58 Mahasiswa Peserta Penelitian Mahasiswa

3. Catatan dan Hambatan

- a) Waktu harus disesuaikan dengan jadwal mahasiswa, dimana sangat sulit mencari waktu kosong.
- b) Pengurusan RAB sudah disepakati sejak awal dengan Dekanat, namun untuk Eksekusinya tetap melalui Proses Birokrasi yang cukup panjang.
- c) Terbatasnya jumlah dosen FH UGM yang memiliki publikasi internasional untuk menjadi pembicara

4. Rekomendasi

- a) Diperlukan penyederhanaan eksekusi RAB.
- b) Diperlukan penguatan publikasi bagi dosen FH UGM sendiri.
- c) Diperlukan kewajiban membaca jurnal bagi mahasiswa saat ini.

E. Workshop Legal Research for Intermediate



31 AUGUST

Workshop Legal Research for Intermediate

25 orang dosen



INTRODUCTION

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian dosen dalam melaksanakan penelitian dan mengumpulkan referensi metode penelitian hukum klasik dan kontemporer, serta untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh dosen.

PEMBICARA



Dr. Rikardo
Simarmata, S.H.

Penelitian Empiris



Prof. Dr. Maria S.W.
Sumardjono, S.H., M.CL.,
M.PA

Penelitian Normatif



Dr. Widodo Dwi
Putro, S.H., M.H

Mahzab Hukum dan
Metode Penelitian



Prof. Paschalis Maria
Laksono, Ph.D

Penelitian Ilmu
Sosial terhadap
Hukum



Drs. Rizal Mustansyir M.Hum
Drs. Misnal M

Dr. Rizal Mustansyir,
S.H., M.Hum

Filsafat Hukum

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian dosen dalam melaksanakan penelitian dan mengumpulkan referensi metode penelitian hukum klasik dan kontemporer, serta untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh dosen. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bagi dosen Fakultas Hukum UGM mengenai hakikat keilmuan dan penelitian; untuk memberikan pemahaman dosen Fakultas Hukum UGM mengenai perkembangan ragam paradigma dalam penelitian hukum serta aplikasi paradigma tersebut dalam penelitiannya; untuk memberikan gambaran bagi dosen Fakultas Hukum UGM mengenai metodologi penelitian ilmu sosial yang dapat membantu memahami hukum sebagai realitas sosial; agar Dosen Fakultas Hukum UGM dapat menggunakan metode baru yang sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan dan dapat menganalisis dan mengolah data hasil penelitian atas ragam penelitian hukum yang baru; dan dapat memberikan bekal pengetahuan dan *skill* bagi para dosen yang akan melanjutkan studi *doktoral*.

2. Pelaksanaan

Workshop diikuti 25 Dosen Muda FH UGM. Workshop dilaksanakan pada Senin-Selasa, 2-3 Oktober 2017 di ruang III.1.1 FH UGM. Workshop diisi dengan Pembicara dan materi sebagai berikut:

- 1) Prof. Paschalis Maria Laksono, Ph.D. (Dosen Antropologi UGM) (Penelitian Ilmu Sosial Terhadap Hukum)
- 2) Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. (Guru Besar Hukum Agraria UGM) (Penelitian Normatif)
- 3) Dr. Rizal Mustansyir, S.H., M.Hum (Dosen Filsafat UGM) (Filsafat Hukum)
- 4) Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram) (Mahzab Hukum dan Metode Penelitian Terkait)
- 5) Dr. Rikardo Simarmata, S.H. (Dosen Hukum Agraria FH UGM) (Penelitian Empiris)

3. Catatan dan Hambatan

- a) Sama dengan beberapa workshop adalah terkait eksekusi RAB.
- b) Honor pembicara yang terlalu terbatas jika dibandingkan dengan institusi lain.
- c) Keterbatasan mengundang pembicara dari luar.
- d) Dibutuhkan dosen dan peneliti yang telah matang secara pengalaman untuk mengisi dan tidak mudah dalam mendapatkan.

4. Rekomendasi

- a) Perlu disusun list dosen atau peneliti yang memiliki kepakaran yang baik dalam penelitian.
- b) Perlu simplifikasi RAB.
- c) Diperlukan lebih banyak pembicara luar untuk memperluas pandangan dosen FH UGM.
- d) Diperlukan rutin setiap tahun.

F. Workshop Penulisan Hukum untuk Publikasi Internasional dan Persiapan Studi Doktorat



31 AUGUST

Penulisan Hukum untuk Publikasi Internasional dan Persiapan Studi Doktorat

25 orang dosen



INTRODUCTION

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian dosen dalam melaksanakan penelitian dan mengumpulkan referensi metode penelitian hukum klasik dan kontemporer, serta untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh dosen. Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan minat, pemahaman dan kemampuan para dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UGM dalam menindaklanjuti hasil penelitiannya menjadi publikasi ilmiah, terutama publikasi internasional.

PEMBICARA



I Made Andi Arsana,
S.T., M.Eng., Ph.D.

Mempersiapkan Studi S3
Luar Negeri



Prof. Drs. H. Ratno
Lukito, M.A., DCL.

Menembus Jurnal
Internasional



Surya Tjandra, S.H.,
LL.M., Ph.D.

Mempersiapkan Proposal
Disertasi



Prof. Dr. Marsudi
Triatmodjo, S.H., LL.M.

Mempersiapkan
Studi S3 Dalam
Negeri



Dr. Rikardo Simarmata,
S.H.

Mempersiapkan
Proposal Disertasi

1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu penelitian dosen dalam melaksanakan penelitian dan mengumpulkan referensi metode penelitian hukum klasik dan kontemporer, serta untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dari penelitian yang dilakukan oleh dosen. Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan minat, pemahaman dan kemampuan para dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum UGM dalam menindaklanjuti hasil penelitiannya menjadi publikasi ilmiah, terutama publikasi internasional.

2. Pelaksanaan

Workshop diikuti 25 Dosen Muda FH UGM. Workshop dilaksanakan pada Senin-Selasa, 10-11 Oktober 2017 di ruang Debat FH UGM. Workshop diisi dengan Pembicara dan materi sebagai berikut:

- Pembicara : 1) Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(Menembus Jurnal Internasional)
2) Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.
(Mempersiapkan Studi S3 Dalam Negeri)
3) I Made Andi Arsana, S.T., M.Eng., Ph.D.
(Mempersiapkan Studi S3 Luar Negeri)
4) Surya Tjandra, S.H., LL.M., Ph.D
(Mempersiapkan Proposal Disertasi)
5) Dr. Rikardo Simarmata, S.H. (Mempersiapkan
Proposal Disertasi)

3. Catatan dan Hambatan

- a) Sama dengan beberapa workshop adalah terkait eksekusi RAB.
- b) Honor pembicara yang terlalu terbatas jika dibandingkan dengan institusi lain.
- c) Keterbatasan mengundang pembicara dari luar.
- d) Dibutuhkan dosen dan peneliti yang telah matang secara pengalaman untuk mengisi dan tidak mudah dalam mendapatkan.

4. Rekomendasi

- a) Perlu disusun list dosen atau peneliti yang memiliki kepakaran yang baik dalam penelitian.
- b) Perlu simplifikasi RAB.
- c) Diperlukan lebih banyak pembicara luar untuk memperluas pandangan dosen FH UGM.
- d) Diperlukan rutin setiap tahun.

G. Bulaksumur Legal Discussion (BLD)



Unit Riset dan Publikasi FH UGM

Bulaksumur Legal Discussion



1.

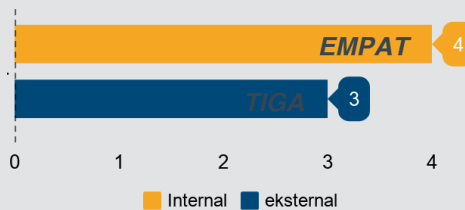
BLD

Bulaksumur Legal Discussion (BLD) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan Draft Desertasi oleh Dosen FH UGM ataupun membahas isu hangat terkini dari sudut pandang hukum dengan pembicara luar atau dalam FH UGM yang kompeten dibidangnya.

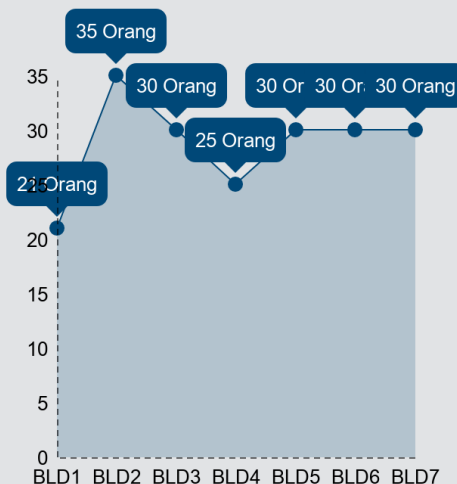
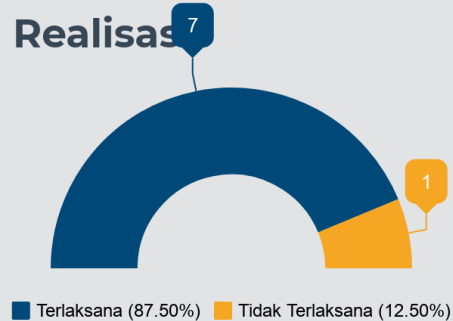
Timeline

- BLD 1** Jumat 9 Juni 2017
- BLD 2** Jumat 21 Juli 2017
- BLD 3** Jumat 25 Agustus 2017
- BLD 4** Jumat 15 September 2017
- BLD 5** Jumat 10 November 2017
- BLD 6** Jumat 10 November 2017
- BLD 7** Jumat 10 November 2017

Pembicara



Realisasi





Unit Riset dan Publikasi FH UGM

Bulaksumur Legal Discussion



Pembicara Internal

#1	#2	#3	#4
Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Bidang Pelayanan Kesehatan Melalui Pranata Adat dan Sistem Kesehatan	Konstitusionalitas Hak Angket DPR terhadap KPK	Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya di Peradaban Timur dan Barat	Understanding the Indonesian Constitutional Court's Approaches in Judicial Review of the Budget for Education Cases
Rimawati, S.H., M.Hum	Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.	Richo A. Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.L aw

Pembicara Eksternal

#5	#6	#7
Torture in Rule of Law	Hubungan Antara Konservasi Berbasis Hak dan Hukum Adat di Berau, Kalimantan Timur	Sistem Adat dan Perencanaan Kawasan Konservasi Laut di Nusa Tenggara Timur
Frank Jacob van Veen	Walker dePuyPh.D	Florence Durney
International Criminal Court	Georgia University, US	University of Arizona



1. Deskripsi

Bulaksumur Legal Discussion (BLD) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan Draft Desertasi oleh Dosen FH UGM ataupun membahas isu hangat terkini dari sudut pandang hukum dengan pembicara luar atau dalam FH UGM yang kompeten dibidangnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan BLD ini dilaksanakan sebanyak 7 kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Pembicara	Tema	Kehadiran Peserta	Tempat dan Waktu Pelaksanaan
1	Rimawati, S.H., M.Hum	Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Bidang Pelayanan Kesehatan Melalui Pranata Adat dan Sistem Kesehatan	21 Orang	Ruang Debat, Jumat 9 Juni 2017
2	Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.	Konstitusionalitas Hak Angket DPR terhadap KPK	35 Orang	Ruang 311, Jumat 21 Juli 2017
3	Richo A. Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D	Sejarah, Konsep, dan Perkembangannya di Peradaban Timur dan Barat	30 Orang	Ruang Debat, Jumat 25 Agustus 2017
4	Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law.	Understanding the Indonesian Constitutional Court's Approaches in Judicial Review of the Budget for Education Cases	25 Orang	Ruang Debat, Jumat, 15 September 2017
5	Frank Jacob van Veen	Torture in Rule of Law	30 Orang	Ruang Debat, Jumat 10 November 2017

6	Walker dePuy	Hubungan Antara Konservasi Berbasis Hak dan Hukum Adat di Berau, Kalimantan Timur	30 Orang	Ruang Debat, Jumat 10 November 2017
7	Florence Durney	Sistem Adat dan Perencanaan Kawasan Konservasi Laut di Nusa Tenggara Timur	30 Orang	Ruang Debat, Jumat 10 November 2017

3. Catatan dan Hambatan:

- Terkait jadwal pelaksanaan tidak sesuai yang direncanakan. Pelaksanaan BLD pertama direncanakan di bulan Maret namun terealisasi pada bulan Juni sehingga berdampak kepada penumpukan di akhir yakni BLD 5, 6 dan 7 dilaksanakan pada satu hari dan pada BLD 6 dan 7 dibuat system panel.
- Kesulitan menentukan konfirmasi kesediaan pembicara yang berpengaruh terhadap kesesuaian jadwal
- Kesulitan mendapatkan dosen yang sedang S3 atau baru menyelesaikan S3 untuk mendiskusikan disertasinya.
- Kesulitan mencari jadwal yang kosong bagi dosen dan mahasiswa.

4. Rekomendasi

- Sejak awal tahun 2018 akan dibuat list pembicara dan jadwal sehingga pelaksanaan lebih mudah dan baik.
- Pembahasan tidak hanya akan fokus kepada Dosen yang sedang menempuh S3, namun bisa juga terkait isu-isu aktual.

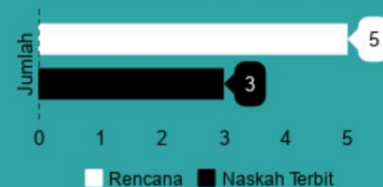
H. Gadjah Mada's Sources of Legal Research



Unit Riset dan Publikasi FH UGM Gadjah Mada Source of Legal Research <http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/>

Salah satu bentuk publikasi Unit Riset dan Publikasi adalah penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief* yang akan diterbitkan sebanyak 5 (lima) dalam satu tahun. Penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief* untuk memberikan referensi kepada para akademisi, pembuat kebijakan, dan *non government organization* atau pihak terkait terhadap sebuah isu di bidang hukum.

Realisasi Penerbitan



Dokumentasi



<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/1/>

Kertas Kebijakan :
Prioritas dan
Rekomendasi untuk
Reformasi Hukum di
Indonesia

Penyusun:

Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
et all

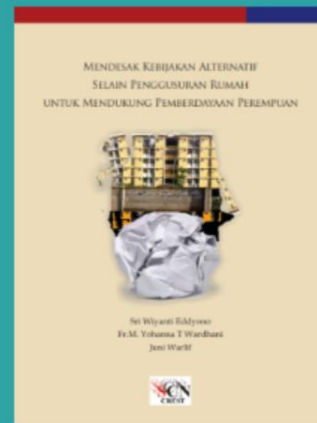


<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/2/>

Orasi Ilmiah : Pluralisme
Hukum Dalam
Pengaturan Sumberdaya
Alam di Indonesia,
Adaptasi, Harmonisasi
dan Agenda ke Depan

Oleh:

Prof. Dr. Maria SW
Sumardjono, SH., MCL.,
MPA



<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/4/>

Mendesak Kebijakan
Alternatif Selain
Pengusuran Rumah
untuk Mendukung
Pemberdayaan
Perempuan
(Urging Policy Alternative
Against Eviction for
Women's Empowerment)

Oleh:

Sri Wiyanti Eddyono
Fr.M. Yohanna T Wardhani

Juni Warlif

1. Deskripsi kegiatan

Program ini dilaksanakan untuk memfasilitasi sivitas akademika atas informasi-informasi mengenai penelitian baik yang difasilitasi oleh Unit Riset dan Publikasi maupun penelitian yang diselenggarakan oleh institusi lain. Selain penelitian, program ini juga ditujukan untuk memberitahukan adanya konferensi nasional dan internasional serta forum akademik dan ilmiah lain yang dapat diikuti oleh sivitas akademika Fakultas Hukum UGM secara khusus dan masyarakat umum.

2. Pelaksanaan:

a) Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perencanaan												
2.	Penyusunan												
3.	Publikasi								Sepanjang Tahun				

b) Hasil

1. Poster penelitian
 2. Policy Brief
 3. Database Kegiatan Akademik (penelitian, diskusi akademik, forum ilmiah)
- Tersedianya informasi bagi para dosen FH UGM tentang:
1. Tawaran penelitian;
 2. Tawaran conference;
 3. Daftar jurnal hukum (nasional dan internasional).

3. Catatan dan Hambatan

- a) Kendala utama, sumberdaya untuk penyusunan tata letak (*layouting*) masih kurang atau bukan keahliannya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan *layouting*.
- b) Terkait masalah desain tidak ada masalah.
- c) Mengunggah file yang dibutuhkan ke dalam situs web tidak ada masalah.
- d) Waktu yang ada untuk proses pengerjaan hingga mengunggah sangat singkat padahal dibutuhkan kecepatan untuk naskah tersebut segera di unggah agar naskah tersebut tidak memasuki masa daluarsa atau hilang sifat kebaruannya.
- e) Adanya Kanal Ilmu Pengetahuan FH UGM yang memiliki tujuan yang sama dengan konsep ini.

4. Rekomendasi

- a) Dibutuhkan orang yang dikhususkan (expert) untuk mengurus bagian desain dan layouting untuk mengurangi waktu pengerjaan.
- b) Diadakannya penjaringan naskah untuk dipublikasikan.
- c) Dibutuhkan kesediaan dosen untuk suka rela memberika naskah-naskah publikasinya untuk dipublikasikan melalui web ini.

I. Kegiatan yang belum terlaksana

1. Penelitian Fakultas Terencana

a) Deskripsi

Penelitian Fakultas ini dirancang supaya Fakultas Hukum UGM dapat menghasilkan penelitian atas nama Fakultas Hukum UGM dengan pembiayaan yang mandiri. Penelitian atas nama Fakultas ini tentunya akan menjadi nilai dalam pemenuhan Tridharma Perguruan Tinggi bidang penelitian. Pembiayaan yang mandiri ini akan mendukung penelitian yang obyektif dalam menyikapi isu dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *roadmap* penelitian yang dirancang untuk beberapa periode yang disepakati oleh pengelola Unit Riset dan Publikasi dengan Pimpinan Fakultas Hukum UGM.

b) Alasan tidak terencana

- 1) Belum ada kebijakan dari pimpinan menyikapi program ini.
- 2) Diperlukan kesepakatan dekanat untuk menciptakan program penelitian mandiri fakultas.
- 3) Diperlukan untuk direncanakan sejak awal tahun

2. Penelitian Fakultas Isidentil

a) Deskripsi

Penelitian Fakultas isidentil ini dirancang supaya Fakultas Hukum UGM dapat memperkuat kerjasama fakultas hukum dengan institusi lain dalam melaksanakan penelitian. Program ini bermaksud mencatat dan melakukan administrasi terhadap kerjasama penelitian FH UGM dengan pihak lain. Sehingga dapat memperluas dan meningkatkan kerjasama penelitian,

b) Alasan tidak terencana

- 1) Menurut SOP Kerjasama FH UGM, seluruh penelitian dengan pihak lain dikelola langsung oleh Dekanat.
- 2) Secara kebijakan FH UGM tidak ada anggaran isidentil, semua harus melalui RKAT atau RKATP jika benar-benar dibutuhkan.

3. Bulaksumur Guide to Legal Citation

a) Deskripsi Kegiatan

Fakultas Hukum UGM sebagai institusi pendidikan yang tentunya menghasilkan karya ilmiah mulai dari hasil penelitian sampai dengan tugas akhir. Dengan banyaknya karya ilmiah tersebut, penting untuk membuat pedoman yang akan digunakan secara umum sehingga setiap hasil penelitian yang dihasilkan dapat menunjukkan keseragaman pola sitasi yang disepakati bersama. Keseragaman model sitasi pada lingkup Fakultas Hukum UGM akan memberikan kepastian pula terutama bagi mahasiswa dalam memenuhi syarat formil penulisan.

b) Alasan belum terlaksana

- 1) Masih merupakan tugas dari program studi-program studi yang ada di FH UGM untuk mengharmonisasikan sistem sitasi di FH UGM.
- 2) Kendala pendanaan disepakati untuk diberikan pada Tahun 2018, namun masih menunggu hasil keputusan RKAT 2018.

3) Cukup padatnya agenda divisi riset sehingga belum dapat melaksanakan program ini.

4. Research Week UGM

a) Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan pameran penelitian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fakultas lain di UGM. Dalam pameran ini seluruh hasil penelitian dosen FH UGM ditampilkan dan ditunjukkan kepada masyarakat.

b) Alasan belum terlaksana

1) Tidak dilaksanakan UGM pada Tahun 2017.

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DIVISI PUBLIKASI
UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2017**

“Either write something worth reading or do something worth writing” (Benjamin Franklin)

A. Penerbitan Jurnal Mimbar Hukum



Unit Riset dan Publikasi FH UGM
Penerbitan Mimbar Hukum
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh>



ISSN 2443-0994 (online)



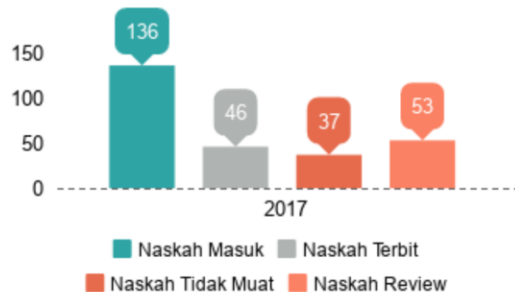
ISSN 0852-100X (print)



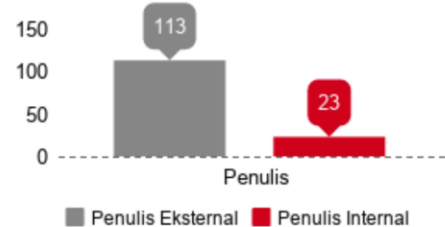
Akreditasi B

SK Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kemendikbud
RI Nomor: 58/DIKTI/Kep/2013

Jumlah Naskah Masuk



Perbandingan Penulis Internal dan Eksternal



Mimbar Hukum terindeksasi oleh



ASEAN
CITATION
INDEX



DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS



CORE
Full Text Available for
Research and Citation Tools
(Open)



Google
Scholar



BASE
Bibliotek Akademik Search Engine



EBSCO
INFORMATION SERVICES

Anggota dari



Penulis Internasional sepanjang 2016-2017 yg telah terbit:



Universiteit
Leiden

Willem van der Muur dan Adriaan Bedner, Van
Vollenhoven Institute, Leiden Law School, Leiden
University. Terbit Vol 28, No. 1, Februari 2016



Allan Munyao Mukuki, Advocate of The High Court
of Kenya. Terbit Vol 28, No. 3, Oktober 2016

1. Nama Kegiatan: Penerbitan Jurnal Mimbar Hukum

2. Deskripsi Kegiatan

Salah satu bentuk publikasi Unit Riset dan Publikasi adalah penerbitan Jurnal Mimbar Hukum yang diterbitkan sebanyak 3 (tiga) edisi dalam satu tahun yaitu pada Bulan Februari, Juni dan Oktober. Jurnal Mimbar Hukum diterbitkan secara online maupun dicetak dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 150 eksemplar setiap edisi. Setiap edisi, Jurnal Mimbar Hukum menerbitkan 14 naskah artikel konseptual atau hasil penelitian baik berbahasa Inggris maupun Indonesia.

3. Pelaksanaan

Saat ini Jurnal Mimbar Hukum telah terbit secara konsisten dan berkelanjutan. Capaian yang telah diraih di antaranya :

- a. Tahun 2017 terindeks di *Asean Citation Index* (ACI). ACI merupakan pengindeks prestisius di tingkat ASEAN karena melalui pengindeks ini, jurnal-jurnal akan lebih mudah terindeks di SCOPUS;
- b. Jumlah *view* pada naskah yang di-*upload* di Mimbar Hukum rata-rata dapat mencapai 50-500 kali. Hal ini membuktikan bahwa dampak naskah pada jurnal masih signifikan untuk perkembangan keilmuan;
- c. Terindeks di beberapa pengindeks internasional diantaranya DOAJ, Google scholar, EBSCO, dll;
- d. Secara konsisten memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) untuk setiap naskah sehingga memudahkan pencarian naskah di masa depan bagi penulis maupun pembaca;
- e. Mampu mengundang *reviewer* dari luar UGM yang bereputasi untuk menjadi *reviewer* Mimbar Hukum. Lebih lengkap dapat dilihat pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/about/displayMembership/276>;
- f. Mampu mengundang *Editorial Board* dari luar UGM bahkan dari luar negeri yang bereputasi. Lebih lengkap dapat dilihat pada <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/about/editorialTeam>;
- g. Menurunkan biaya muat naskah dari Rp 1.000.000, 00 menjadi Rp 500.000,00;
- h. Secara konsisten menerapkan sistem *Open Journal System* (OJS) dalam pengelolaan jurnal;
- i. Jumlah penulis yang memsukkan naskah ke Mimbar Hukum pada Tahun 2017 mencapai 67 naskah;
- j. Menurunkan cetak *hardcopy* dari 500 eksemplar menjadi 150 eksemplar karena edisi cetak tidak terlalu dibutuhkan lagi.

Berikut adalah rincian target capaian Mimbar Hukum tahun 2018:

- a. Meraih reakreditasi dengan nilai A pada tahun 2018;
- b. Menertibkan proses *review* agar lebih tertib dan berfokus pada substansi;

- c. Menjaring naskah agar tidak hanya banyak jumlahnya namun juga berkualitas sehingga redaksi tidak kekurangan naskah;
- d. Mengaktifkan sistem kerja *Editorial Board*.

Proses yang perlu dilakukan:

- a. Memaksimalkan akreditasi dengan pembentukan panitia akreditasi;
- b. Membuat panduan *review* bagi *reviewer*;
- c. Memperbaiki *form review* agar lebih sederhana;
- d. Membuat *call for article*;
- e. *Editor in chief* berupaya memaksimalkan kinerja *Editorial Board* berdasarkan skema proses kerja yang telah dibuat.

4. Hambatan

- a. Proses *review* berlangsung cukup lama dan kurang tertib. Terdapat *review* yang berfokus pada hal yang bukan substantif dan tertunda penyelesaiannya karena kesibukan *reviewer*;
- b. Proses finalisasi jurnal terhambat dengan SDM staf *editorial board* yang *part time* (mahasiswa) dan harus membagi waktu dengan kegiatan kuliah. Selain itu, karena staf berganti-ganti, maka dibutuhkan proses belajar terlebih dahulu yang tidaklah sebentar;
- c. *Layouting* dan cetak masih dilakukan pihak ketiga sehingga tidak dapat berlangsung cepat;
- d. Beberapa naskah penulis masih perlu perbaikan mayor dari sisi penulisan sehingga memakan waktu cukup lama untuk melakukan penyuntingan.

5. Rekomendasi

Diperlukan staf jurnal yang tetap dan bekerja secara penuh waktu untuk pengelolaan jurnal dapat mempercepat kinerja jurnal. Selain itu, perlu adanya upaya penjaminan mutu *review* untuk peningkatan mutu naskah yang dimuat.

B. Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum

1. Nama Kegiatan: Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum

2. Deskripsi Kegiatan

Salah satu bentuk publikasi Unit Riset dan Publikasi adalah penerbitan Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan sebanyak 3 (tiga) edisi dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November. Jurnal Penelitian Hukum untuk mengakomodasi publikasi hasil penelitian Mahasiswa Strata-1 dan Strata-2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

3. Pelaksanaan

Sampai saat ini, penerbitan Jurnal Penelitian Hukum (JPH) baru ditargetkan untuk "*back date*" yaitu memenuhi penerbitan hingga edisi November 2017. Akan tetapi, penerbitan tersebut belum melalui proses *review* atau dengan kata lain belum menggunakan OJS (*Open Journal System*) daring penuh. Naskah-naskah yang diterbitkan di JPH hingga Juli 2017 adalah naskah publikasi dari hasil penelitian program hibah Unit Penelitian dan pengabdian Masyarakat FH UGM (UPPM) yang saat ini dilebur menjadi Unit Riset dan Publikasi FH UGM (URP). Pemilihan naskah yang layak ditentukan oleh Dewan Editor, kemudian dilakukan penyuntingan oleh Asisten Dewan Editor. Berikut rincian yang sudah dicapai:

- a. Edisi terakhir yang sudah dipublikasikan di website <https://jurnal.ugm.ac.id/jph> adalah Vol 3, No. 1, Maret 2016
- b. Edisi yang sudah dilakukan penyuntingan adalah Juli 2016 dan November 2016.

Berikut rincian yang perlu dicapai:

- a. Melakukan penyuntingan 10 naskah untuk edisi Februari, Juli, dan November 2017 dari naskah publikasi hasil penelitian program hibah UPPM 2016.
- b. *Layoting* edisi Juli 2016 dan November 2016.
- c. Mempublikasikan JPH hingga edisi November 2017 ke *website*. Publikasi tersebut baru bersifat etalase atau pajangan.

Pada bulan Oktober 2017 sudah mulai dilakukan penggunaan OJS bagi penulis JPH. Berikut pencapaiannya:

- a. Terdapat 46 penulis yang melakukan pemasukan naskah melalui OJS. Penulis tersebut merupakan peneliti program hibah penelitian mahasiswa S1-S2 URP 2017.
- b. Proses yang dilakukan sudah sampai korespondensi dengan penulis untuk memperbaiki naskah sesuai dengan gaya selingkung JPH.

Proses yang perlu dilakukan:

- a. Menunjuk Dewan *Reviewer* untuk melakukan *review* naskah
- b. Prioritas utama memilih 15 naskah untuk layak terbit di edisi Februari, Juli, dan November 2018.

c. Menggunakan OJS daring penuh.

4. Catatan dan Hambatan

Catatan:

46 naskah yang sudah dimasukkan belum dapat dipublikasikan untuk edisi November 2017. Karena sampai Desember 2017 belum masuk proses *review*. Dengan demikian, untuk edisi November 2017 masih menggunakan ketersediaan naskah publikasi hasil penelitian program hibah penelitian UPPM 2016.

Hambatan:

- a. Proses penyuntingan membutuhkan waktu cukup lama, karena terdapat peneliti mengirimkan manuskrip jurnal tidak sesuai dengan gaya selingkung jurnal Penelitian Hukum. Dengan demikian, Asisten Dewan Editor perlu melakukan penyuntingan dari awal supaya gaya selingkung sesuai dengan JPH. selain itu, terdapat naskah hasil penelitian yang tidak ada naskah publikasinya, sehingga Asisten Dewan Editor perlu membuat naskah publikasinya dari hasil penelitian peneliti.
- b. Pengelola JPH adalah pengelola Mimbar Hukum, sehingga membutuhkan *double effort* untuk mengelola dua jurnal dalam satu waktu. Terlebih lagi kedua jurnal tersebut diterbitkan tiga edisi dalam satu tahun.
- c. Pada tahun 2017 pengelola jurnal fokus untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan Mimbar Hukum. Karena pada bulan Maret 2018 akan dilakukan re-akreditasi. Dengan demikian, terjadi kekurangan sdm yang dapat fokus pada penyuntingan JPH.

5. Rekomendasi

Diperlukan restrukturisasi dalam pembagian tugas di URP dan tersedianya sdm yang berfokus pada pengelolaan Jurnal Penelitian Hukum sehingga dapat dipublikasikan melalui proses review dan menggunakan OJS daring penuh.

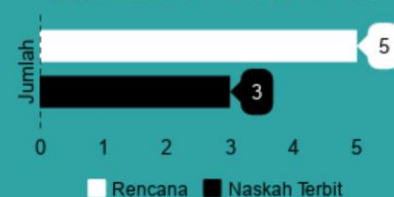
C. Penerbitan *Working Paper/Policy Paper/Policy Brief*



Unit Riset dan Publikasi FH UGM
Gadjah Mada Source of Legal Research
<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/>

Salah satu bentuk publikasi Unit Riset dan Publikasi adalah penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief* yang akan diterbitkan sebanyak 5 (lima) dalam satu tahun. Penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief* untuk memberikan referensi kepada para akademisi, pembuat kebijakan, dan *non government organization* atau pihak terkait terhadap sebuah isu di bidang hukum.

Realisasi Penerbitan



Dokumentasi



<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/1/>

Kertas Kebijakan :
Prioritas dan
Rekomendasi untuk
Reformasi Hukum di
Indonesia

Penyusun:

Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
et al



<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/2/>

Orasi Ilmiah : Pluralisme
Hukum Dalam
Pengaturan Sumberdaya
Alam di Indonesia,
Adaptasi, Harmonisasi
dan Agenda ke Depan

Oleh:

Prof. Dr. Maria SW
Sumardjono, SH., MCL.,
MPA



<http://rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/4/>

Mendesak Kebijakan
Alternatif Selain
Pengusuran Rumah
untuk Mendukung
Pemberdayaan
Perempuan
(Urging Policy Alternative
Against Eviction for
Women's Empowerment)

Oleh:

Sri Wiyanti Eddyono
Fr.M. Yohanna T Wardhani
Juni Warlif

1. Nama Kegiatan : Penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief*

2. Deskripsi Kegiatan

Salah satu bentuk publikasi Unit Riset dan Publikasi adalah penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief* yang direncanakan diterbitkan sebanyak 5 (lima) kali dalam satu tahun. Penerbitan *Working Paper/ Policy Paper/ Policy Brief* untuk memberikan referensi kepada para akademisi, pembuat kebijakan, dan *non government organization* atau pihak terkait terhadap sebuah isu di bidang hukum.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2017 ini terdapat 3 (tiga) naskah yang masuk dan sunting oleh staf Unit Riset dan Publikasi dan sudah dipublikasikan di website: <http://rispub.law.ugm.ac.id>. Ketiga naskah tersebut adalah:

- a. Kertas Kebijakan: Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia yang disusun oleh Dosen FH UGM
- b. Orasi Ilmiah: Pluralisme Hukum dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan oleh Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., MCL., MPA.
- c. Publikasi Ilmiah: Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Penggusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan oleh Sri Wiyanti Eddyono, Fr.M. Yohanna T Wardhani, dan Juni Warlif.

4. Catatan dan Hambatan

Pada KAK URP menargetkan setidaknya 5 (lima) naskah yang dapat dipublikasikan, namun baru 3 (tiga) naskah. Perlu disiapkan strategi penjangkaran naskah lebih banyak pada tahun 2018.

D. Otonomi Publikasi

1. Nama Kegiatan: Otonomi Publikasi

2. Deskripsi Kegiatan

Otonomi publikasi dimaksudkan bahwa Unit Riset dan Publikasi diberikan keleluasaan melakukan proses publikasi atas tulisan/artikel dari dosen internal, dosen eksternal dan pihak lain, serta hasil riset, konferensi, seminar, diskusi ilmiah dan berbagai kegiatan ilmiah lain yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra. Adapun publikasi yang dihasilkan oleh Unit Riset dan Publikasi terdiri dari Jurnal Mimbar Hukum, Jurnal Penelitian Hukum, dan publikasi *online* lainnya.

Di samping versi *online*, khusus untuk Jurnal Mimbar Hukum dan Jurnal Penelitian Hukum juga disediakan dalam versi cetak terbatas yang diperuntukkan bagi Penulis, Instansi Mitra, Pelanggan, dan pihak internal di lingkungan Fakultas Hukum UGM.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2017, Mimbar Hukum telah menerima berbagai tulisan/artikel dari dosen internal, dosen eksternal, dan pihak lain dalam bentuk hasil riset maupun naskah konseptual melalui sarana Jurnal Mimbar Hukum. Selain itu pada Jurnal Penelitian Hukum sudah dilakukan proses submisi dari hasil penelitian mahasiswa tahun 2017.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) proses yang dilakukan dalam pelaksanaan penerbitan jurnal, antara lain *editing*, *layouting* dan *printing* serta *distributing*. Pada proses *editing*, URP dapat melakukannya secara mandiri melalui dosen internal maupun eksternal. Namun proses *layouting* dan *printing* dilakukan oleh pihak luar yang bekerjasama dengan Unit. Sementara proses *distributing* dilakukan secara oleh URP secara mandiri.

4. Catatan dan Hambatan

KAK URP menargetkan adanya proses *layouting* mandiri sebagai penerbit, namun hal ini belum dapat direalisasikan, karena adanya keterbatasan kemampuan staf yang belum memadai untuk melakukan *layouting* secara mandiri. Perlu penguasaan *software* tertentu seperti *indesign* dan sejenisnya guna mengampu tugas tersebut.

E. *Workshop Open Journal System (OJS)* untuk Pengelola Jurnal

1. Nama Kegiatan : *Workshop Open Journal System (OJS)* untuk Pengelola Jurnal

2. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka adanya restrukturisasi dan pergantian pengelolaan Unit Riset dan Publikasi sebagai pengelola Jurnal Mimbar Hukum dan Jurnal Penelitian Hukum, sehingga dipandang penting untuk memberikan pelatihan (*workshop*) pengelolaan jurnal berbasis aplikasi web *Open Journal System (OJS)* bagi pengelola jurnal yang baru, mengingat OJS baru mulai digunakan pada pertengahan tahun 2016.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017, dengan pembicara Sdr. Allamudin A.F. Peserta workshop adalah pengelola dan staf Unit Riset dan Publikasi. Hasil yang dicapai adalah pengelola dan seluruh staf dapat memahami rangkaian *business process* OJS secara menyeluruh.

4. Catatan dan Rekomendasi

Mengingat sistem OJS yang masih baru digunakan memiliki kompleksitas yang cukup tinggi serta akan terus dikembangkan, maka perlu dilakukan workshop secara berkala kepada pengelola dan seluruh staf guna penguasaan terhadap sistem OJS.

F. Call for Article Jurnal Mimbar Hukum

1. Nama Kegiatan: *Call for Article* Jurnal Mimbar Hukum

2. Deskripsi Kegiatan

Call for article merupakan sarana untuk menjaring para penulis untuk memasukan naskahnya ke Jurnal Mimbar Hukum.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pada bulan Juli 2017 telah dilakukan publikasi poster *call for article* dengan sasaran akademisi maupun praktisi untuk memasukan naskah hasil penelitian maupun naskah konseptual ke Jurnal Mimbar Hukum. Hal ini cukup efektif untuk menjaring penulis, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah naskah yang masuk melalui *Open Journal System* Mimbar Hukum. Selanjutnya untuk mempersiapkan edisi khusus pada bulan Juni 2018, cara ini akan digunakan kembali untuk menjaring penulis yang berminat melakukan submisi naskah sesuai dengan tema yang ditentukan.

4. Catatan dan Rekomendasi

Call for Article cukup efektif untuk menjaring penulis pada Mimbar Hukum, sehingga diharapkan program ini dapat dilanjutkan pada tahun yang akan datang.

G. Workshop SINTA bagi Dosen

1. Nama Kegiatan : *Workshop SINTA bagi Dosen*

2. Deskripsi Kegiatan :

Pada tahun 2017 seluruh dosen diwajibkan memiliki akun SINTA yang terhubung ke *Google Scholar*, *Scopus* dan berbagai pengindeks lainnya. Selain itu, aktivasi akun SINTA bermanfaat dalam pengukuran kinerja dosen untuk pengurusan kepangkatan. Oleh karena itu URP mengadakan *workshop* pembuatan akun SINTA bagi dosen.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Workshop SINTA bagi dosen terlaksana pada :

hari, tanggal : Selasa, 26 September 2017

pukul : 13.00-17.00 WIB

tempat : Lab Komputer FH UGM

Pembicara : Unit Riset Publikasi FH UGM dan Badan Penerbit Publikasi UGM

Output : Dari seluruh dosen FH UGM, hanya tinggal 31 dosen saja yang belum memiliki akun SINTA.

4. Catatan dan Rekomendasi

Workshop SINTA tidak dirancang sebagai salah satu program URP pada tahun 2017, namun *workshop* ini diselenggarakan sebagai respon atas permintaan BPP UGM untuk mendorong seluruh dosen di Fakultas Hukum untuk mengaktifkan akun SINTA. Ketidakhadiran seluruh dosen yang diundang menjadi hambatan pencapaian target program ini. Di samping itu, URP telah memfasilitasi para dosen dalam pembuatan dan aktivasi akun SINTA. Karena adanya keterbatasan waktu aktivasi akun SINTA, capaian target jumlah dosen yang mengaktifkan akun SINTA pada tahun 2017 belum dapat maksimal.

H. Persiapan Reakreditasi Jurnal Mimbar Hukum

1. **Nama Kegiatan:** Persiapan Reakreditasi Jurnal Mimbar Hukum

2. **Deskripsi Kegiatan**

Masa akreditasi Jurnal Mimbar Hukum yang akan segera berakhir pada bulan Agustus 2018, dan perlu mengajukan reakreditasi pada Bulan Maret 2018. Pada saat ini Mimbar Hukum telah terakreditasi B. Akreditasi yang akan dilaksanakan selanjutnya berbasis Open Journal System (OJS) dan ini merupakan pertama kalinya Mimbar Hukum akan mengajukan akreditasi dalam mekanisme tersebut dengan target mendapat akreditasi A. Jika target tersebut berhasil, maka Mimbar Hukum akan menjadi jurnal hukum pertama yang terakreditasi A di Indonesia.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

Saat ini kegiatan persiapan akreditasi sedang berjalan. Karena akreditasi ini berbasis OJS, maka ada banyak kegiatan yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah mereview ulang beberapa naskah yang hasil *review*nya tidak terdokumentasi dengan baik dan juga yang *review*ernya tidak melakukan *review*. Pergantian sistem manual ke OJS yang baru berlangsung setahun tentu terdapat kekurangan dalam banyak hal sehingga URP berupaya menutupi beberapa kelemahan yang masih dapat diupayakan agar mendapat nilai maksimal.

4. **Hambatan**

- a. Akreditasi sistem OJS membutuhkan banyak adaptasi karena banyak dokumen dari sistem manual yang belum terdokumentasi dengan baik.
- b. SDM Staf yang bertugas sekaligus menangani penerbitan jurnal rutin dan pekerjaan bidang riset sehingga menyebabkan *overload* dalam mempersiapkan akreditasi.

I. **Workshop “Akreditasi Mimbar Hukum”**

1. **Nama Kegiatan** : *Workshop “Akreditasi Mimbar Hukum”*

2. **Deskripsi Kegiatan** :

Pada awalnya, program yang direncanakan oleh URP pada tahun 2017 adalah berupa *Workshop “Menuju Scopus”* yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai alur, cara dan mekanisme indexing Scopus dan menghasilkan Mimbar Hukum terindex Scopus. Namun, dalam perjalanannya, URP memutuskan untuk fokus mempersiapkan akreditasi Mimbar Hukum pada bulan Maret 2018. Mempertimbangan kebutuhan tersebut, URP memutuskan untuk menunda pelaksanaan *Workshop “Menuju Scopus”* dan melaksanakan *Workshop “Akreditasi Mimbar Hukum”*. *Workshop* tersebut diselenggarakan untuk mengidentifikasi nilai evaluasi diri Mimbar Hukum dan merumuskan rencana peningkatan nilai evaluasi diri Mimbar Hukum untuk kepentingan akreditasi Mimbar Hukum pada Maret 2018.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

Workshop “Akreditasi Mimbar Hukum” terlaksana pada

hari, tanggal : Senin, 27 November 2017

pukul : 09.00 – 13.30 WIB

tempat : Ruang 724 FH UGM

Pembicara : Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.Hum. (Dosen FH UNHAS dan salah satu asesor akreditasi jurnal)

Peserta :

a. 3 pengelola URP

b. 8 staf dan volunteer URP

c. 1 pengelola Mimbar Hukum pada tahun 2015.

Output :

Mimbar Hukum dapat dimungkinkan meraih akreditasi A dengan mencapai skor 89 dalam borang evaluasi diri ARJUNA. Nilai tersebut dapat dicapai dengan melakukan peningkatan dan perbaikan dalam beberapa hal, seperti penjaringan dewan editor dan dewan *reviewer* yang memiliki ID Scopus, penggalangan kerjasama Mimbar Hukum/FH UGM dengan instansi profesi dalam bidang publikasi, dan penggunaan aplikasi *reference manager*.

4. **Catatan dan Rekomendasi**

Pimpinan fakultas dan pengelola Jurnal Mimbar Hukum pada periode sebelumnya diharapkan dapat hadir dalam *workshop* ini. Supaya proses *sharing* berjalan efektif dan penyusunan strategi perbaikan pengelolaan jurnal dapat disusun langsung dalam *workshop*.

J. Insentif Publikasi Tahun 2017 Unit Riset dan Publikasi FH UGM

1. **Nama kegiatan** : Insentif Publikasi Tahun 2017 Unit Riset dan Publikasi FH UGM

2. **Deskripsi Kegiatan**

Program Insentif Publikasi adalah program yang diselenggarakan Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM untuk memberikan apresiasi dan mendorong dosen (PNS dan SK Rektor) di FH UGM agar semakin produktif dalam menghasilkan publikasi ilmiah.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

Program ini dibuka sejak 8 November 2017 dan ditutup pada 8 Desember 2017. Dalam rentang waktu tersebut, telah masuk 45 usulan dan 37 di antara dinyatakan lolos seleksi dan dapat menerima insentif publikasi.

Dalam menentukan usulan yang lolos, URP mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Urutan waktu pengajuan dan kelengkapan dokumen persyaratan.
- b. Pengusul dapat menerima paling banyak 2 bentuk insentif (baik di pos insentif yang sama atau berbeda).
- c. Usulan ketiga dan seterusnya dari setiap pengusul dapat diterima dengan mempertimbangkan:
 - 1) Ketersediaan kuota di setiap pos insentif;
 - 2) Ketepatan waktu pengumpulan dan kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 3) Pemerataan penerimaan di setiap pos insentif (contoh: Dalam 1 pos insentif Pengusul A mengajukan 2 usulan tambahan dan Pengusul B mengajukan 1 usulan tambahan. Sementara kuota yang tersedia hanya untuk 2 usulan tambahan. Maka insentif tambahan diberikan masing-masing sebanyak satu kepada Pengusul A dan Pengusul B)

4. **Catatan dan Rekomendasi**

Capaian serapan insentif publikasi belum maksimal pada beberapa jenis publikasi, yaitu :

- a. buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional;
- b. buku yang diterbitkan oleh penerbit internasional;
- c. jurnal internasional terbitan dalam negeri;
- d. jurnal Mimbar Hukum terbitan tahun 2016 s/d 2017;
- e. jurnal internasional terindeks scopus dengan kategori Q4 dan yang setara (terbitan dalam/luar);
- f. jurnal internasional dengan kategori Q1 dan yang setara;
- g. *proceeding* di seminar/konferensi nasional;
- h. *proceeding* seminar/konferensi internasional terindeks *Web of Science* (Thomson Reuters dan Scopus), koran dan media cetak lainnya skala nasional; dan

- i. *policy paper* (bukan *policy brief*), *working paper*, dan materi seminar/workshop/konferensi skala nasional (makalah bukan PPT).

Program Insentif Publikasi Tahun 2017 dilaksanakan dalam waktu yang cukup singkat, yaitu pengusulan diajukan mulai tanggal 8 November 2017 s/d 8 Desember 2018. Program Insentif Publikasi Tahun 2018 diharapkan dapat dilaksanakan dalam rentang waktu yang lebih panjang sehingga memadahi untuk mencapai serapan insentif yang maksimal.

K. Penerbitan Edisi Khusus Jurnal Mimbar Hukum (Mimbar Hukum *Special Issue*)

1. **Nama Kegiatan** : Penerbitan Edisi Khusus Mimbar Hukum (Mimbar Hukum *Special Issue*)

2. **Deskripsi Kegiatan**

Edisi Khusus Mimbar Hukum (Mimbar Hukum *Special Issue*) dengan tema '***New Interpretations of Adat Law in Courts and Courses***' akan diterbitkan pada Bulan Oktober 2018. Naskah-naskah yang akan diterbitkan pada edisi ini adalah naskah yang telah dipresentasikan pada International Conference "Adat law 100 yearon: Towards a New Interpretation?" Van Vollenhoven Institute in collaboration with KITLV, pada tanggal 20 Mei 2017.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

Edisi khusus Mimbar Hukum dirancang terdiri dari 10 naskah, termasuk di dalamnya *introduction* dan *epilog*. Berikut ini adalah rancangan muatan yang ditetapkan :

a. *Introduction from Guest Editors*

Rikardo Simarmata, Herlambang P. Wiratraman, Tody Sasmita

b. Adat Law in Law Schools

1) Sulisyowati Irianto (Professor of Anthropology at University of Indonesia) – *Inheritance Adat Law Dispute and Gender Justice in Legal Pluralism Perspective*

2) Joeni Arianto Kuraniawan (PhD Student at University Pisa) – *The Role of Adat Law in the Tenurial Conflict Involving Adat Communities in Indonesia. A Lesson from the Conflict between the Sedulur Sikep Community and the Cement Industries in Central Java*

3) Rikardo Simarmata (Lecturer at Faculty of law, University of Gadjah Mada) –*The Current Development of Scientific Study of Adat Law and Its Ability to Adequately Explain Reality.*

c. Adat Law in Courts

1) HerlambangWiratraman (Executive Director of Center of Human Rights Law Studies, Faculty of Law, Airlangga)- *Adat Court Justice System*

2) Budi Suharyanto (researcher at Supreme Court / Mahkamah Agung RI) – *Problems of Adat Absorption by The Court and The Effect for National Criminal Law Reform*

3) Viktor Immanuel (Faculty of Law, Darma Cendika Catholic University) – *Changing Adat Inheritance Law*

d. *Epilogue*

Adriaan Bedner (Van Vollenhoven institute) *Epilogue: 'Challenges for Incorporating New Interpretations of Adat Law in Courts, Courses and Research in Indonesia'*

Adapun agenda penerbitan Mumbur Hukum Edisi Khusus / Special Issue 'New Interpretations of Adat Law in Courts and Courses' adalah sebagai berikut :

No	Time	Activity
1.	<i>End of October 2017</i>	<i>Confirmation to contribute in 'Mimbar Hukum Special Issue'</i>
2.	<i>End of December 2017</i>	<i>Comment from Guest Editors</i>
3.	<i>End of February 2018</i>	<i>Submission to Open Journal System (OJS) MimbarHukum (by author)</i>
4.	<i>March – April 2018</i>	<i>Double-blind review from MimbarHukum's Reviewer</i>
5.	<i>End of April 2018</i>	<i>Reviewer's decision and comments</i>
6.	<i>May-June 2018</i>	<i>Revision Process (substance and writing standard)</i>
7.	<i>Early July 2018</i>	<i>Submission of Revised Manuscript</i>
8.	<i>October 2018</i>	<i>Journal (Special Issue) is Published</i>

4. Catatan dan Rekomendasi

Pada saat ini proses sedang berjalan pada tahap review naskah oleh *Guest Editors*. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah penting untuk dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan program dapat berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

L. Indeksasi Asean Citation Index (ACI)

1. Nama Kegiatan : Indeksasi Asean Citation Index (ACI)

2. Deskripsi Kegiatan

Salah satu bentuk kegiatan bidang publikasi adalah Tahun 2017 terindeks di Asean Citation Index (ACI). ACI merupakan pengindeks prestisius di tingkat ASEAN karena melalui pengindeks ini, jurnal-jurnal akan lebih mudah terindeks di SCOPUS.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melengkapi persyaratan ACI, Mimbar Hukum dinyatakan lolos. Saat ini sedang dilakukan proses dari ACI untuk *upload* naskah dari Mimbar Hukum.

M. Kegiatan yang Belum Terlaksana

1. Penerbitan Buku Karya Dosen

1. **Nama Kegiatan:** Penerbitan Buku Karya Dosen

2. **Deskripsi Kegiatan**

Buku karya dosen merupakan bentuk kontribusi keilmuan dosen Fakultas Hukum UGM bagi masyarakat luas. Naskah yang diterbitkan dalam bentuk buku ini diperoleh dari hasil penelitian kompetitif dosen ataupun hasil penelitian lain oleh dosen. Dalam satu tahun, direncanakan terdapat 3 (tiga) buah buku yang diterbitkan oleh Unit Riset dan Publikasi.

3. **Pelaksanaan**

Unit Riset dan Publikasi menargetkan untuk dapat mempublikasikan 3 (tiga) buku dosen pada tahun 2017. Sampai saat ini, penerbitan buku karya dosen belum terlaksana. Kendala utama penerbitan buku karya dosen adalah tidak adanya naskah yang masuk untuk dapat dipublikasikan.

4. **Catatan dan Hambatan**

Catatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tidak adanya naskah yang masuk, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dalam menstimulasi para dosen untuk menerbitkan buku melalui Unit Riset dan Publikasi. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan cara penyebaran poster yang cukup efektif untuk menjaring naskah yang masuk seperti pada produk jurnal.

2. Persiapan Akreditasi Jurnal Penelitian Hukum

1. **Nama Kegiatan:** Persiapan Akreditasi Jurnal Penelitian Hukum

2. **Deskripsi Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan untuk melunasi utang terbit Jurnal Penelitian Hukum. Diharapkan pada akhir tahun 2017 sudah *terupload* semua naskah Jurnal Penelitian Hukum dari awal tahun 2014 hingga November 2017 dan penelitian mahasiswa tahun 2017 sudah dimasukkan semua ke sistem OJS Jurnal Penelitian Hukum, sekaligus memantau dan memastikan semua kelengkapan dan persyaratan akreditasi Jurnal Penelitian Hukum.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

Jurnal Penelitian Hukum tidak dapat mengajukan akreditasi di tahun 2018. Karena sampai dengan tahun 2017, JPH belum menggunakan OJS daring penuh. Naskah yang dipublikasikan pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu Februari 2016 s.d November 2017 baru bersifat sebagai etalase/pajangan pada *website*. Penulis tidak melakukan pemasukan naskah pada OJS dan proses review belum berjalan. Sejauh ini yang telah dicapai oleh pengelola JPH adalah menyelesaikan penyuntingan hingga edisi November 2016. Naskah untuk edisi Februari, Juli, dan November 2018 belum tersunting. Pada bulan Oktober sudah tercatat 46 penulis yang memasukkan naskah ke JPH melalui OJS. Akan tetapi, belum dapat dilakukan proses *review*, karena belum dilakukan penunjukan dewan *Reviewer*. JPH dapat dimungkinkan mengajukan

akreditasi pada tahun 2019 mendatang, mengingat proses OJS baru akan dilakukan mulai edisi Februari 2018.

4. Catatan dan Hambatan

Adanya keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia pengelola jurnal, mengakibatkan distribusi tenaga terfokus pada persiapan reakreditasi Mimbar Hukum, hal ini mengakibatkan penerbitan JPH belum diprioritaskan.

3. Hibah Peningkatan Mutu Jurnal Mimbar Hukum

1. Nama Kegiatan : Hibah Peningkatan Mutu Jurnal Mimbar Hukum

2. Deskripsi Kegiatan

Salah satu bentuk kegiatan yang direncanakan akan diikuti oleh URP untuk Jurnal Mimbar Hukum adalah hibah peningkatan mutu jurnal yang rutin diadakan BPP UGM. Hibah ini bertujuan memberikan bantuan pendanaan terkait pengelolaan jurnal yang berasal dari luar FH UGM.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pengelola URP sudah berupaya mengikuti kompetisi hibah ini dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Namun demikian, keputusan kelolosan hibah jurnal tetap berada pada tim penilai dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Dalam kesempatan kali ini URP belum berhasil mendapatkan hibah untuk Mimbar Hukum.

4. Catatan dan Hambatan

Pada awalnya URP mengajukan kategori hibah peningkatan mutu jurnal terakreditasi untuk Mimbar Hukum, namun pada pertengahan periode pengajuan hibah, BPP selaku penyelenggara meminta untuk melakukan penggantian berkas pengajuan hibah ke kategori hibah jurnal yang terbit konsisten. Namun demikian, pemberitahuan ini dilakukan cukup mendadak sehingga URP mengalami kesulitan dalam mempersiapkan dokumen pengganti dalam waktu yang terbatas.

LAMPIRAN

1. Penelitian Reguler

a) Jadwal

No	Uraian Kegiatan	Mahasiswa	Dosen
1.	Sosialisasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa	8-31 Maret 2017	8-31 Maret 2017
2.	Pelatihan Submisi Penelitian Online	20 Maret 2017	20 Maret 2017
3.	Penerimaan Proposal <i>Soft Copy</i> Online	14 Maret - 31 Maret 2017	14 Maret - 31 Maret 2017
4.	Proses seleksi proposal (<i>Desk Evaluation</i>)	3 - 17 April 2017	3 - 17 April 2017
5.	Presentasi Proposal	18 April 2017	Tidak Presentasi
	Mahasiswa S1	18 April 2017	
	Mahasiswa S2	18 April 2017	
	Mahasiswa S3	18 April 2017	
6.	Pengumuman Proposal Terseleksi	20 April 2017	20 April 2017
7.	Tandatangan Kontrak	27 April 2017	27 April 2017
8.	Pencairan Dana Termin Pertama	2-5 Mei 2017	2-5 Mei 2017
9.	Penyerahan <i>Draft</i> Naskah Akhir Penelitian	19 September 2017	19 September 2017
10.	Dosen Master		27 - 28 September 2017
	Dosen Kolaboratif		27 - 28 September 2017
	Dosen Doktor		27 - 28 September 2017
	Dosen Guru Besar		27 - 28 September 2017
	Mahasiswa S1	25 - 26 September 2017	
	Mahasiswa S2	25 - 26 September 2017	
	Mahasiswa S3	25 - 26 September 2017	
11.	Perbaikan Laporan	19 Sept - 18 Okt 2017	20 Sept - 18 Okt 2017
12.	Penyerahan Laporan Akhir (<i>Softcopy</i>) a. Laporan Akhir (persetujuan Reviewer dan Pembimbing) b. Bukti Submit Manuskrip Jurnal dan Manuskrip Jurnal c. Poster Penelitian (Khusus Mahasiswa) d. Laporan Penggunaan Dana	19 Oktober 2017	19 Oktober 2017

13.	Pencairan Dana Termin Kedua	20-25 Oktober 2017	20-25 Oktober 2017
-----	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

b) Data Serapan

No	Skema	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Jumlah Serapan (Setelah Kontrak)	Total Serapan Dana (Rp)
1.	Penelitian Guru Besar	4	22.000.000	88.000.000	1	22.000.000
2.	Penelitian Dosen Kolaboratif	6	20.000.000	60.000.000	2	40.000.000
3.	Penelitian Dosen Doktor	7	18.000.000	126.000.000	10	180.000.000
4.	Penelitian Dosen Master	25	10.000.000	250.000.000	12	120.000.000
5.	Penelitian Mahasiswa S3	5	6.000.000	30.000.000	1	6.000.000
6.	Penelitian Mahasiswa S2	25	5.500.000	137.500.000	24	132.000.000
7.	Penelitian Mahasiswa S1	40	4.500.000	180.000.000	27	121.500.000
Total		112		871.500.000	77	621.500.000
Prosentas				100%		71%

c) Daftar Peneliti dan Reviewer pada Penelitian Reguler Tahun 2017

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
PENELITIAN GURU BESAR			
1.	Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.	Batas Waktu Penyelesaian Permohonan Kepailitan Di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukumnya Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	1) Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. 2) Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
PENELITIAN DOKTOR			
1.	Dr. Jur. Any Andjarwati S.H., M.Jur.	Masa Depan Dan Eksistensi Pemilikan dan Penguasaan Lahan Pertanian di Wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan Provinsi Bali	1) Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N. 2) Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
2.	Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.	Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	1) Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si. 2) Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
3.	Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.	Aspek Yuridis Dan Filosofis Pemilikan Tanah Secara Gandhok/Gamblok Dalam Hukum Tanah Adat	1) Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur. 2) Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.
4.	Dr. Yulkarnain Harahab, S.H.,M.Si.	Perkembangan Pengaturan Wakaf dari Ajaran Fikih ke Dalam Hukum Positif	1) Hartini, S.H., M.Si. 2) Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.
5.	Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.	Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	1) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. 2) Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
6.	Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.	Dari Korban (<i>Victim</i>) Menjadi Pelaku (<i>Offender</i>) Atau Penyintas (<i>Survivor</i>) Perempuan Dalam Mengakses Keadilan Di Indonesia	1) Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si. 2) Sri Natin, S.H., S.U.
7.	Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.	Lingkungan Strategis Wilayah Perairan Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Keamanan Maritim Nasional	1) Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. 2) Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
8.	Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.	Nilai-Nilai Kearifan Lokal Yang Diterapkan Dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk Di Bleberan, Pathuk, Gunung Kidul	1) Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. 2) Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.
9.	Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.	Kewenangan Mengadili Peradilan Militer terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	1) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. 2) Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
10.	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	Penerapan <i>Profit Sharing Contract (PSC) Gross Split</i> dan Pengaruhnya Terhadap Keuangan Negara	1) Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D. 2) Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
PENELITIAN KOLABORATIF			
1.	1) Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn. 2) Rizky Septiana W., S.H., M.Kn.	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Peraturan Pengelolaan Perikanan Yang Berkelanjutan Di Indonesia	1) Dwi Haryati, S.H., M.Hum. 2) Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
2.	1) Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M. 2) Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M.	Menakar Peluang Mendudukkan Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Pembatasan Yudisial Pada Mahkamah Agung	1) Dr. Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M. 2) Joko Setiono, S.H., M.Hum.
PENELITIAN DOSEN MASTER			
1.	Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M.	Kedudukan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Hukum Antara Advokat Dan Klien	1) Irna Nurhayati S.H., M.Hum, LL.M. 2) Laras Susanti, S.H., LL.M.
2.	Laras Susanti, S.H., LL.M.	Aturan Dan Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia Dan Amerika Serikat	1) Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum. 2) Dr. Sutanto, S.H., M.S.
3.	Anugrah Anditya S.H., M.T.	Dampak Asynchronous Information Terhadap	1) Dahliana Hasan S.H., M.Tax., Ph.D.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
		Pengenaan Pajak Yang Timbul Atas Transaksi Elektronik	2) Andrianto Dwi Nugroho S.H., Adv. LL.M.
4.	Dwi Haryati, S.H., M.H.	Perizinan Menara Telekomunikasi Dan Penegakannya Di Kota Yogyakarta	1) Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. 2) Anugrah Anditya S.H., M.T.
5.	Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.	Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Pekerja Anak Di Industri Hiburan: Studi Komparasi	1) Susilo Andi Dharma., SH., M.Hum 2) Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
6.	Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.	Meninjau Perencanaan Pembangunan Bandar Udara Temon, Kabupaten Kulonprogo Dalam Perspektif Sistem Penataan Ruang Yang Integratif	1) Dyah Ayu Widowati S.H., M.Kn. 2) Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
7.	R.A. Antari Innaka, S.H., M.H.	Kajian Etis Yuridis Dilema Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Bidan	1) Rimawati, S.H., M.Hum. 2) Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
8.	Haniah Ilhami, S.H., LL.M.	Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta	1) Hartini S.H., M.Si. 2) Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si.
9.	Irine Handika, S.H., LL.M.	Pengaruh Perubahan <i>Production Sharring Contract</i> Pada Kegiatan Hulu Minyak Bumi Dari Sistem <i>Cost Recovery</i> Menjadi <i>Gross Split</i> Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	1) Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. 2) Anugrah Anditya S.H., M.T.
10.	Susilo Andi Dharma, S.H., M. Hum.	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca diundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang	1) Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D. 2) Joko Setiono, S.H., M.Hum.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
		Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015	
11.	Hariyanto, S.H., M.Kn.	Analisis Kepailitan Koperasi Yang Dipailitkan Bersama-Sama Dengan Pengurus dan Pengawas Dalam Kedudukan Anggota Sebagai Pemohon Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 K/Pdt.Sus-Pailit/2014)	1) Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. 2) Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
12.	Alifa Prasasti Rahmaningrum, S.H., M.H.	Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Pesisir di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Kutuh, Kabupaten Badung, Provinsi Bali	1) Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn. 2) Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
PENELITIAN MAHASISWA S1			
1.	1) Febriansyah Ramadhan S 13/351879/HK/19703 2) Maria Tresna Utami 14/366587/HK/20064 3) I Wayan Robi Suryana 14/362949/HK/19884	Partisipasi Masyarakat Adat Mentawai Dalam Melindungi Hutan Di Pulau Siberut	1. Dr. Rikardo Simarmata, S.H. 2. Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.
2.	1) Damar Satrio Yudanto 14/362948/HK/19883 2) Denomi Tivali Z 14/368467/HK/20190	Penyelesaian Sengketa Tanah Baik Yang Terdaftar Maupun Belum Terdaftar Di Kabupaten Kulon Progo Melalui Mediasi Oleh Kepala Daerah	1. Ananda Prima Yurista, S.H., M.H. 2. Rimawati, S.H., M.Hum.
3.	Rayvo Rahmatullah 14/366564/HK/20045	Implikasi Larangan Pemekaran Kerapatan Adat Nagari Terhadap Kewenangannya Sebagai Lembaga Peradilan Adat Di Nagari Lubuk Gadang Selatan Solok Selatan	1. Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. 2. Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
4.	Umar Mubdi 14/366463/HK/20000	Model Penyelesaian Sengketa Menurut Tradisi Aiq Nyatoq Dalam Masyarakat Sasak Sebagai Sarana Non-Litigasi	1. Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. 2. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M
5.	1) Dayinta Agi P. 13/348917/HK/19592 2) Deby Chikita A. 14/366588/HK/20065 3) Clara Viantina A. 15/348917/HK/19592	Tinjauan Yuridis Perpanjangan Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (Sier)	1. Rafael Edy Bosko, S.H., M.I.L. 2. Dr. Jur. Ani Andjarwati, S.H., M.Jur.
6.	1) Maghfiraa Larasati 14/366512/HK/20003 2) Annisa Rahma Diasti 14/362978/HK/19912 3) Yoda Rifky Hanindya 15/377680/HK/20412	Peran Putusan Mahkamah Pelayaran Dalam Pemidanaan Nakhoda Terhadap Kecelakaan Kapal Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Manusia	1. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 2. Sigid Ryanto, S.H. M.Si
7.	1) Nathan Dippos Fajar 14/366585/HK/20062 2) I Kadek Sudiarsana 15/377627/HK/20359 3) Made Dwiki P. 15/379438/HK/20436	Pemenuhan, Perlindungan, Dan Penghormatan Hak Sipil Terhadap Pelaku Perkawinan Transeksual Di Indonesia	1. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D. 2. Prof., Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
8.	1) Erlangga A. Saputra 13/351912/HK/19716 2) Imelda Chandra 15/377629/HK/20361	Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat, Berkumpul Dan Berserikat Kelompok Minoritas Seksual Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	1. Prof., Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si. 2. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.
9.	1) Ahmad Sayyid A. 14/366513/HK/20004 2) Dhiya Sholiha H. 15/382486/HK/20553 3) Amalia Putri P. 15/382447/HK/20514	Penelaahan Proses Pencabutan Keanggotaan Negara Inggris Dari Uni Eropa	1. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. 2. Dr. H. Jaka Triyana, S.H., M.Sc. Ph.D.
10.	1) Michael Putra Kesuma 14/367637/HK/20149 2) Siska Naomi P. 13/348918/HK/19593	Keberadaan Kos Eksklusif Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman	1. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum. 2. Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
11.	1) Krista Anugrah Adi 13/345525/HK/19521 2) Vincensius Bimo Dwi 13/348957/HK/19631 3) Agung Pratama N. 13/345595/HK/19561	Asas Efisiensi Dan Asas Efektivitas Dalam Pengadaan Karcis Kuning Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Implementasi Dan Inisiasi Ke Depan)	1. Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn. 2. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
12.	1) Hamida Amri Safarina 14/367659/HK/20153 2) Fitri Isniridha 15/382507/HK/20574	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Atas Rumah Kos Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman	1. Anugrah Anditya, S.H., M.T. 2. Fadhilatul Hikmah S.H., LL.M.
13.	1) Ima Nurlatifah 14/366569/HK/20049 2) Egis Dhara T. 14/366568/HK/20048 3) Naufal Fadhlullah S. 14/14/362923/HK/19858	Analisis Dugaan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Layanan Jasa Triple Play Indihome Oleh Pt.Telekomunikasi Indonesia.Tbk	1. Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum. 2. Veri Antoni, S.H., M.Hum
14.	1) Agustina Pratiwisari 14/363050/HK/19981 2) Maria Acynta Christy 14/366597/HK/20073 3) Alexander Bhanu A. 13/352039/HK/19744	Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Indekos Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel	1. Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum. 2. Irine Handika Ikasari, S.H., LL.M.
15.	1) Zahrotun Nisaa 14/362983/HK/19917 2) Nuzula Fardhana S. 14/363023/HK/19955 3) Milana Dwi Artha 14/367836/HK/20183	Pengaturan <i>Electronic Nicotine Delivery System</i> (Ends) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Standardisasi Produk Di Indonesia	1. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. 2. Laurensia Andirini S.H., LL.M.
16.	1) Putu Bagus A. P 14/367573/HK/20102 2) Ayu Mawar Rini 14/366584/HK/20061	Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman Pasca Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	1. Dr. Sutanto, S.H., M.S 2. Laras Susanti, S.H., LL.M.
17.	Edgar Handoko 14/366526/HK/20017	Pelaksanaan Perjanjian Jasa Penambah Followers Pada Media Sosial Instagram	1. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
			2. Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M.
18.	1) Elsa Alfianti 14/362942/HK/19877 2) Ayutya Triadindawathy 14/366570/HK/20050	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Marketplace (Studi Kasus Penggunaan Fitur E-Cash Dalam Transaksi Jual Beli Di Situs Olx Indonesia)	1. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H. 2. Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M.
19.	1) Nicolaus Oscar Nugroho P. 14/362932/HK/19867 2) Sabrina Nadilla 13/345407/HK/19406	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Database Pin Dan Kontak Konveksi Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	1. Sa'ida Rusdiana, S.H., LL.M. 2. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, S.H., M.H.
20.	1) Muhammad David R. 14/367596 /HK/20125 2) Bramanda Sajiwo S. 15/382468/HK/20535 3) Robiyatul Adawiyah 15/382589/HK/20656	Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan Pada Perusahaan-Perusahaan Outsourcing Di Wilayah Kabupaten Sleman	1. Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M. 2. Murti Pramuwardhani Dewi S.H., M.Hum
21.	1) Muhammad Afif Subowo 13/351883/HK/19705 2) Alvin 13/351877/HK/19702	"Perlindungan Hukum Terhadap Buruh/Pekerja Pada Pt. Anek Surya Agung Yang Dipailitkan Oleh Kejaksaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"	1. Murti Pramuwardhani Dewi S.H., M.Hum 2. Susilo Andi Darma, SH., M.Hum.
22.	1) Aris Munandar 14/367733/HK/20173 2) Robi Ginting 14/363057/HK/19983	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Kafe Dengan Layanan 24 Jam Di Kota Yogyakarta	1. Susilo Andi Darma, SH., M.Hum. 2. Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.
23.	Rihma Nurohmah 14/362985/HK/19919	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengecualian Jaminan Kesehatan Bpjs Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Akibat Wabah Penyakit Maupun Bencana Alam: Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Asuransi Dan Hukum Kesehatan	1. Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M. 2. Susilo Andi Darma, SH., M.Hum.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
24.	1) Putri Nurihati M. 14/362995/HK/19929 2) Novita Dwi Lestari 15/382567/HK/20634 3) Ayunda Widosari 15/382461/HK/20528	Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Kpr Bersubsidi Antara Gama Multi Finance (Gmf) Dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Yogyakarta	1. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. 2. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI.
25.	Mochamad Shidqi Miftah Farid 14/366538/HK/20027	"Tinjauan Hukum Mengenai Praktik Pendanaan Kolektif (Crowdfalnding) Dengan Crowdfunding Platform Gandengantangan.Org Ditinjau Dari Sudut Hukum Perjanjian Dan Kredit	1. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum. 2. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
26.	1) Anggres Yudistira 14/363008/HK/19942 2) Husni Muhammad F. 14/367636/HK/20148	Perlindungan Hak Cipta Dalam Kasus Penjualan Buku Bajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Pencipta Karya Di Kota Yogyakarta	1. Veri Antoni, S.H., M.Hum. 2. Hariyanto, S.H., M.Kn.
27.	1) Devi Rahmawati S. 14/363019/HK/19952 2) Anastasia Cynthia 13/351942/HK/19725	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Pembuatan Sulam Alis Pada Salon Kecantikan Di Kabupaten Sleman	1. Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M. 2. Sa'ida Rusdiana,S.H.,LL.M.
PENELITIAN MAHASISWA MASTER			
1.	Edwith Yogi Pratama 15/387574/PHK/08680	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Musik Dan/Atau Lagu Di Jejaring Sosial Soundcloud	1. Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M. 2. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
2.	Dandi Septian 16/402692/PHK/09196	Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Permohonan Pailit Kreditor Separatis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung)	1. Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. 2. Hariyanto, S.H., M.Kn.
3.	1) Arbiati 16/402744/PHK/09248 2) Tri Aktariyani 16/402762/PHK/09266	Implementasi Kompensasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Oleh BPJS Kepada Puskesmas Di Kabupaten Bantul	1. R.A. Antari Inaka Turingsih, S.H., M.Hum. 2. Rimawati, S.H., M.Hum

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
4.	Liliefna Anthony Yonathan 16/402752/PHK/09256	Analisis Yuridis Kesepakatan Penentuan Pembayaran Pelayanan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Fktl)	1. Susilo Andi Darma, SH., M.Hum. 2. Prof. Dr. Ari Hernawan, SH., M.Hum
5.	Muhammad Nur 15/387684/PHK/08790	Pengaturan Hukum Internasional Terkait Standar Perlindungan Kesehatan, Keselamatan Serta Pencegahan Kecelakaan Pekerja Migran Di Atas Kapal Perikanan Asing	1. Susilo Andi Darma, SH., M.Hum. 2. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
6.	Zahlul Pasha 16/402833/PHK/09337	Kesesuaian Antara Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M. 2. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.
7.	Ditta 15/392073/PHK/09118	Politik Hukum Dalam Urusan Pencatatan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya	1. Rizky Septiana Widyaningtyas, S.H., M.Kn. 2. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil
8.	Tri Suhendra Arbani 15/392073/PHK/09118	Analisis Yuridis Peran Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Joko Setiono S.H, M.Hum. 2. Dwi Haryati, S.H., M.H
9.	1) Muhammad Najid A. 16/402811/PHK/09315 2) La Ode Muhamad H. 16/402806/PHK/09310	Konstitusionalitas Penerapan Ambang Batas Pengajuan Gugatan Di Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak	1. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil 2. Aminoto, S.H., M.Si.
10.	1) Muhammad Ridwansyah 14/375673/PHK/08580 2) Sarah Furqoni 15/392096/PHK/09141	Penentuan Kandidat Calon Gubernur Di Internal Partai Aceh (Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal Di Aceh)	1. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil 2. Andi Sandi A.T.T., S.H., LL.M.

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
11.	Samsul 16/402821/PHK/09325	Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Indonesia	1. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. 2. Aminoto, S.H., M.Si.
12.	1) Murti Ayu Hapsari 16/402812/PHK/09316 2) Eka Rachmawati 16/402795/PHK/09299	Arah Kebijakan Regulasi Di Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Di Era Masyarakat Ekonomi Asean	1. Fadhilatul Hikmah, S.H., LL.M. 2. Aminoto, S.H., M.Si.
13.	Taufik Hidayat 15/392099/PHK/09144	Kajian Politik Hukum Terlibatnya Anggota DPD RI Dalam Partai Politik	1. Oce Madril, S.H., M.A. 2. Joko Setiono S.H, M.Hum.
14.	Andi Dede Suhendra 14/371981/PHK/08265	Efektivitas Kesepahaman Bersama Forum Pemerintah Desa Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Mangrove Bangko Tapampang Di Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.	1. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum. 2. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.
15.	Faisol Rahman 16/ 402796/ PHK/ 09300	Penaatan Hukum Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan DPLH	1. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum. 2. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.
16.	Hasan Hafidz Nur 14/371956/PHK/08260	Perlindungan Hak-Hak Negara Berkembang Serta Negara Yang Terdampak Langsung Oleh Perubahan Iklim Akibat Global Warming Berdasarkan Prinsip Common But Differentiated Responsibility Dan Special Priority Dalam Paris Agreement 2015	1. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M. 2. Agustina Merdekawati, S.H., LI.M.
17.	Safaruddin Harefa 16/402819/PHK/09323	Pola Penempatan Warga Binaan Pada Lembaga Perasyarakatan Dalam Mencegah Terjadi Suatu Tindak Pidana Yang Baru (Residivis) (Studi Di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan	1. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. 2. Sigid Ryanto, S.H. M.Si

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
		Kota Yogyakarta)	
18.	1) Ola Anisa Ayutama 16/402813/PHK/09317 2) Adlia Nur Zhafarina 16/402790/PHK/09294	Identifikasi Bentuk Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri	1. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum. 2. Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
19.	1) Rifqathin Ulya 16/402816/PHK/09320 2) Wajihatut Dzikriyah 16/402830/PHK/09334	Pembinaan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Anak) Di Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka)	1. Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si. 2. Sigid Ryanto, S.H. M.Si
20.	1) Muhammad Sabil R. 16/402808/PHK/09312 2) Gaza Caruma I. 16/402798/PHK/09302	Konsep Lapas Terbuka Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Gagasan Pembaharuan Hukum Pelaksanaan Pidana	1. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. 2. Sigid Ryanto, S.H. M.Si
21.	Herman Sidik 16/402972/PHK/09476	Penguasaan Tanah "Absentee" Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur	1. Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn. 2. Prof. Dr. Sudjito. S.H., M.Si.
22.	1) Siti Rahma Novikasari 16/402824/PHK/09328 2) M. Gisa Vitrana 16/402810/PHK/09314	Penguatan Pembangunan Kelautan Yang Berkelanjutan Melalui Adopsi Particularly Sensitive Sea Areas (Pssas) Dalam Rencana Tata Ruang Laut Indonesia	1. Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum. 2. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
23.	1) Gunawan Aineka 16/402750/PHK/09254 2) Ade Saktiawan A 16/402742/PHK/09246	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kefarmasian Yang Menggunakan Apotek Online	1. Rimawati, S.H., M.Hum. 2. Dwi Hariyati, S.H., M.Hum.
24.	Abdul Kadir Jaelani 15/392065/PHK/09110	Perlindungan Kepemilikan Tanak Pecatu Pada Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Dalam Perspektif Keanekaragaman Dalam Kesatuan Hukum	1. Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si 2. Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N

PENELITIAN MAHASISWA DOKTORAL

No	Nama Peneliti	Judul	Reviewer
1.	Sahrina Safiuddin 15/389808/SHK/21117	Wewenang Kepala Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 4 Tahun 2015 Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Hukum Adat Moronene Hukaea Laea	1. Dr. Rikardo Simarmata, S.H. 2. Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si

2. Workshop Penelitian Mahasiswa

a) Keterangan

Jumlah Peserta : 58 mahasiswa (perwakilan pengusul proposal penelitian mahasiswa)

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017

Tempat : Ruang 3.3.1 Fakultas Hukum UGM

Pembicara : Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.

Moderator : Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

Ringkasan

b) Dokumentasi

Waktu	Uraian Kegiatan	Penanggungjawab
12.30-13.00	Registrasi Peserta	Panitia
13.00-13.15	Pembukaan oleh MC	MC
13.15-13.25	Sambutan Wakil Dekan Bidang Penelitian atau URP	MC
13.30-14.00	Materi I: (Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.)	Moderator: Tody Sasmitha, S.H., LL.M.
14.00-14.30	Materi II: (Dr. Rikardo Simarmata, S.H.)	
14.30-15.00	Sesi Tanya Jawab	
	ISHOMA	Panitia
15.00-15.30	Sosialisasi Sistem Submisi Penelitian	Atok Muhammad Nur Hidayat
15.30-15.45	Sesi Tanya Jawab	
15.45-16.00	Penutupan	MC

3. Workshop Peningkatan Publikasi Mahasiswa

a) Keterangan

Jumlah Peserta : 58 mahasiswa (perwakilan pengusul proposal penelitian mahasiswa)

Hari, Tanggal : Kamis, 28 September 2017

Tempat : Ruang 3.3.1 Fakultas Hukum UGM

Pembicara : 1) Linda Yanti Sulistiowati, S.H., LL.M., Ph.D. "*writing your research*"
2) Agung Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. "Menembus Jurnal Internasional"
3) Tim Asisten Editor Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM

Moderator : Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

b) Ringkasan Materi

1) Linda Yanti Sulistiawati S.H., M.Sc., Ph.D.

"Writing Your Research"

Menulis merupakan cara untuk mengaktualisasikan sebuah ide. Pun secara moral, ia adalah kewajiban bagi akademisi. Menulis publikasi bagi akademisi hukum biasanya berpatokan pada IRAC, akronim dari *Issue, Rule of Law, Application/Analysis*, dan *Conclusion*. Keempat poin tersebut memudahkan kita dalam memilih topik sebuah publikasi maupun penelitian.

Menulis publikasi dan penelitian merupakan dua hal yang saling berhubungan erat. Penelitian-penelitian dalam bidang hukum yang kita lakukan dapat dijadikan sebagai manuskrip publikasi. Namun, tidak semua bagian dalam penelitian bisa dijadikan topik dalam publikasi. Terdapat bagian-bagian tertentu yang dapat dipilih dan dijadikan bahan untuk publikasi ke dalam jurnal-jurnal tertentu. Hal ini perlu dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama, sebab ilmu-ilmu serta pemahaman kita mengenai topik dalam penelitian tersebut masih melekat dan "hangat".

Bagaimana cara yang tepat untuk mempersiapkan naskah publikasi?

1. Siapkan *outline*
2. Gunakan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda
3. Gunakan kata harus dan bukan sebaiknya
4. Konsistensi
5. Buang kata yang tidak diperlukan
6. Tulis kalimat yang pendek, sederhana.

Poin penting yang perlu dipersiapkan pertama adalah mengidentifikasi topik dalam penelitian kita. Kembangkan topik dengan membuatnya ke dalam pertanyaan-pertanyaan dan diderivasi. Kemudian dalam pemahaman kita mengenai topik tersebut dengan mencari data dan memperbanyak bacaan yang berkaitan.

Dalam hal kita menggunakan studi kualitatif, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan, diantaranya :

- a) Gunakan teori untuk mengantarkan dalam poin permasalahan
- b) Literatur yang akan memisah beberapa topik

Kredibilitas sumber penelitian akan berdampak pada kualitas tulisan. Sumber kredibel dari website dapat diambil dari Pemerintah atau media massa yang dikenal luas. Kredibilitas sumber akan sangat dipengaruhi oleh “keaktualan”. Lalu perlu dibuat target tujuan publikasi berdasar ranking dan kredibilitas.

2) Agung Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

“Menembus Jurnal Internasional”

Plagiarsme

Untuk menghindari *plagiarism*, setiap ide yang didapatkan dari orang lain harus disertai dengan *credits* melalui sitasi atau sejenisnya. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah melalui parafrasa, sebab akan membosankan apabila sebuah penelitian hanya berisi kutipan. Kutipan yang terdiri lebih dari 4 baris dibuat *indent* agar pembaca paham bahwa ide tersebut bukan pendapat penulis. Penggunaan tanda kutip, parafrasa, meringkas, ataupun inden adalah cara-cara untuk menghindari *plagiarism*.

Penterjemahan

Penterjemahan dalam penelitian hukum di Indonesia belum secara khusus menggunakan *terminology* hukum. Penterjemahan penelitian hukum pada akhirnya harus memilih penterjemah spesialisasi bidang hukum sebab *terminology* harus diperhatikan dalam sebuah penelitian. Kita harus menggunakan istilah teknis yang dimengerti secara universal.

Pemilihan Jurnal

- Kita harus berhati-hati tawaran publikasi yang tidak masuk akal. Kadang muncul tawaran submisi manuskrip jurnal dengan proses terbit hanya dua hari. Secara umum proses review dan lainnya dalam terbitan jurnal kurang lebih dua bulan.
- Cek *list* jurnal predator di *Beall's Lists of Predators Journals* untuk menghindari jurnal yang tidak kredibel serta berujung pemerasan uang. Banyak orang yang submisi dalam jurnal-jurnal tidak bereputasi, pada akhirnya menurunkan reputasi penulis.
- Cek reputasi editor in *chief* dari jurnal tersebut. Identifikasi penawaran submisi manuskrip jurnal harus ketat dengan cara melihat reputasi penulisan orang atau lembaga tersebut dalam *id scopus*.
- Cek reputasi jurnal di *SG Journal Rankings*,
- Ikuti *referencing system* dari jurnal yang akan dituju.
- Menulis *cover letter* dengan ringkas, jelas dan menjual. Dalam proses ini perlu dicantumkan signifikansi manuskrip agar menarik dan layak dijual untuk dipublikasikan di jurnal tersebut. Kebaruan-kebaruan dalam sebuah ide atau tulisan merupakan cara yang cukup signifikan untuk meloloskan jurnal.

Setelah Submission

Bersabar

Dalam proses review dalam jurnal memerlukan proses yang panjang. Hal yang perlu digaris bawahi adalah kesabaran, sebab kita harus menghindari pertanyaan

pertanyaan bertubi pada editor. Kurang lebih proses menuju *publish* mencapai 1- 2 tahun.

Ditolak

Penolakan bisa karena beberapa hal, salah satunya *referencing* yang hanya menggunakan sumber-sumber yang sulit *ditrack* karena menggunakan Bahasa lokal. Simpulnya kita tidak boleh terlalu umum serta terlalu spesifik.

Diterima dengan revisi

Apresiasi masukan dari reviewer. Jika tidak sependapat sampaikan klarifikasi atau maksud Anda dengan baik. Tidak semua hasil review harus diakomodasi, apabila ada ketidaksepakatan maka korespondensi dapat dilakukan. Kadang ada reviewer yang sarkastis dan sangat tergantung pada kondisi emosionalnya, sehingga *manage* emosi dalam proses pengerjaan jurnal adalah hal yang penting. Fokus harus ditujukan pada komentar-komentar keilmuan, hal-hal emosional harus disingkirkan. *So don't take it personally*

Scopus ID

Setelah jurnal diterima selanjutnya buat *scopus author id* atau *google scholar id*. Secara ekonomis kita dapat mengajukan insentif publikasi ke LPDP atau kampus.

Menulis jurnal tak harus sesuai dengan departemen mana kita berada, sebab posisi tersebut sangat sempit. Dalam konteks itu, lintas *interest* sangat dimungkinkan. Namun pendekatan yang digunakan akan mempunyai warna sendiri sesuai dengan *basic* atau *interest* keilmuan. Implikasinya adalah ketidaklinear-an penelitian kita

Jurnal internasional tidak melihat afiliasi tertentu. S1 sekalipun dimungkinkan apabila manuskripnya berkualitas. Sebab kualitas adalah poin utama yang menjadi nilai tambah. Pun dalam proses *review*, metode yang digunakan adalah *blind review*, sehingga afiliasi tidak akan bisa dilihat dan tidak jadi poin pertimbangan.

Meneliti sesuatu tak harus selalu turun ke lapangan. Independent *researcher* tidak kehilangan akses terhadap sumber-sumber keilmuan sebab biaya penelitian dapat ditekan dengan menggunakan metode tertentu. Dalam hal lain, *independentresearcher* tidak perlu mengumpulkan laporan penelitian, sebab manuskrip dinilai sebagai *output* sebuah penelitian.

Proporsi *Bibliography* hanya sebuah konvensi. Kualitas proses sebuah sumber perlu dilihat agar kualitas tulisan kita lebih baik. Pada kasus ini kita perlu menempatkan porsi jurnal internasional lebih banyak untuk menunjukkan kebaruan isu yang kita ambil.

c) Dokumentasi

Waktu	Uraian Kegiatan	Penanggungjawab
08.00-03.00	Registrasi Peserta	Panitia
08.30-08.45	Pembukaan oleh MC	MC
	Sambutan Wakil Dekan Bidang Penelitian atau URP	MC
08.45-10.45	Materi I Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.	Moderator: Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.
10.45-12.45	Materi II Agung Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.	

12.45-13.15	ISHOMA	Panitia
13.15-14.00	Sosialisasi Submisi Jurnal Penelitian Mahasiswa	Tim Asisten Editor URP FH UGM
14.00	Penutupan	MC

4. Workshop Legal Research for Intermediate

a) Ringkasan Materi dan Tanya Jawab

- 1) **Sesi 1: Peta Mazhab Hukum Dan Metode Penelitiannya (Widodo Dwi Putro)**
Objek Penelitian Hukum

Persoalan: apakah hanya berupa kumpulan peraturan per-uu-an atau putusan pengadilan, bagaimana asas meta yuridis dan nilai apakah menjadi objek penelitian hukum? Apakah *nomos* yang berupa pola perilaku di masyarakat dan *intersionisme* simbolis merupakan objek penelitian? perselisihan antara norma dan *nomos*.

Penelitian normatif bukan hanya berupa peraturan per -uu-an tapi ternyata bisa lebih dari itu tetapi apa hukum yang ideal atau seharusnya (berada di ranah filosofis) rujukan Hans Kelsen → normatif hanya berupa kumpulan peraturan per-uu-an dan putusan hakim. Bukunya Burghein tentang Teori Hukum ternyata apa yang disebut normatif tidak hanya peraturan per-uu-an tetapi juga nilai dalam *corpus* moral keadilan juga termasuk apa yang seharusnya.

Penelitian empiris berciri apa yang senyatanya (contoh rambu lalu lintas) → melihat bagaimana hukum bekerja dan berlaku dalam masyarakat.

Apakah mungkin dua metode bisa saling bekerja sama ?

Seharusnya: deduksi → peraturan sebagai premis mayor dan kenyataan sebagai premis minor. Premis mayor dianggap bisa menaungi apa yang menjadi premis minor. Pada konteks ini terjadi kesimpulan secara diam-diam tersedia. Fakta di dudukan pada konteks premis mayor

Senyatanya: Induktif → berdasarkan pengalaman (a posteriori), kasus dll. namun tidak bisa di *generalisir* karena pasti ada anomali

Apakah hukum itu hanya berelasi dengan manusia dan masyarakat? cara berpikir *legistik*, *legisme*, hanya membatasi untuk hukum, Satjipto hukum untuk manusia, ada wacana lebih progresif bagaimana binatang, manusia apakah menjadi subjek hukum?

Itu mungkin saja terjadi karena perubahan paradigma bukan sesuatu yang statis. Bisa saja paradigma lama kurang memadai apa yang dipandang paradigma baru. Paradigma akan terus bertentangan dan harus diperjuangkan karena bukan sesuatu yang alami dan berproses.

Apakah harus ada gap antara *das sollen* dan *das sein* dalam *legal research*? Bagaimana dan konteks H.Islam yang tidak hanya akal tapi juga *transeden*, bagaimana pertentangan *transeden* atau filosofi *Jeremy Bentham*?

Mazhab hukum kodrat mengenal pemikiran thomas aquinas, misal jarang mengenal pemikiran lain misal Al-Ghazali. Pemikiran Thomas Aquinas dipengaruhi Aristoteles yang mana dipengaruhi pemikir Islam. Pemikiran Yunani jarang ditemukan dalam pemikiran timur tengah bukan eropa. Persoalan yang disampaikan tidak mudah karena menyangkut teologi (*transeden*). *Positioning* Thomas Aquinas: *Lex Aeterna* (rasio Tuhan) bisa dicerna ketika → *Lex Divina* (Kitab Suci) → *Lex Naturalis* (Cerminan pantulan cahaya dari *Lex Aeterna*). Perdebatan apa ini masih

abstrak (menyangkut moral) maka → *Lex Positivis* sebagai bentuk derivasi dari *Lex Naturalis* (Hukum Buatan Manusia). Berdasarkan pendekatan teologi, *lex divina* lebih tinggi dibanding *lex positivis* jika pendekatan akal maka *lex positivis* dibanding *lex divina*.

Menurut Grotius, manusia dengan kekuatan rasio bisa membedakan baik dan buruk. pertentangan antara *maqashid* dan *utilitarian*, cara berpikir *utilitarian* banyak mendapat kritik karena mengesampingkan kaum minoritas. Apakah persoalan etis bisa ditarik pada konteks *transeden*. Persoalan teologi, apakah memiliki ruang kritik. Kesimpulan ini hanya terkait perspektif dan pendekatan.

Apakah metode penelitian hukum harus *monodisipliner* atau interdisipliner? Tesis: Apakah Paradigma mempengaruhi rumusan masalah dan metode penelitian yang dipilih?

Menurut Thomas Kuhn: Paradigma adalah teori yang memperoleh legitimasi, apabila berbagai permasalahan mampu dipecahkan maka ia akan menjadi kebenaran yang mapan. Ketika Suatu teori tidak dapat menyelesaikan masalah, maka paradigma itu mulai diragukan. Akan terjadi fase krisis paradigma antara usulan paradigma baru dan pertahanan paradigma lama

Sebelum menggagas teori baru harus melihat elemen elemen. Immanuel Kant menggagas mendamaikan ranah ide dan ranah empiris. Kritik terhadap teori adalah langkah awal menemukan teori dan falsifikasi.

Apakah P2 akan memadukan antara *interdisipliner* atau *monodisipliner*?

Cara berpikir *modernism*, sejarah bergerak ke arah kemajuan, paradigma akan bergerak akan ke depan (kebaharuan) dan semakin ke atas (semakin peningkatan kualitas).

Cara berpikir *post-modernism* apa yang dianggap baru, esensinya akan mentok, hanya luarannya saja. Bisa saja menjadi ke titik awal. Filsafat barat berpusat pada *logosentrisme* yang berpusat pada akal, spiritualitas. P2 harus ada unsur kebaruan dan menemukan kebaruan. Hans Kelsen menolak kerja sama dengan cabang ilmu lain, banyak teori meragukan kebenaran teori Kelsen.

Untuk menyeimbangkan unsur utama dalam hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) metode mana yang pas?

Dalam konteks deduksi, menyamakan persepsi perbedaan "pidana".

Persoalan Norma dan *Nomos*, Indonesia banyak kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Kelemahan deduksi adalah hukum tidak diragukan kebenarannya. Pendefinisian tergantung kognisi dalam masyarakat, dan kognisi adalah konteks yang terikat nilai.

Hukum Kodrat ada pendekatan ilahiah dan rasio. Dengan pendekatan yang berbeda bahwa percaya hukum itu berlaku universal yang tidak terikat dan waktu. Positif merupakan gambaran *Socio Jurisprudence*

Bagaimana memaknai konsistensi paradigma?

Bagaimana pendefinisian keadilan, dalam perspektif hukum kodrat bagaimana mendefinisikan keadilan?

Yang disampaikan merupakan kritik mazhab hukum kodrat, hukum positif harus bersandarkan pada moral keadilan atau moral keadilan diderivasikan dalam hukum positif namun moral keadilan masih abstrak. *Lex Iniusta Non est Lex*, moral keadilan menjadi sumber. Hal ini menjadi kelemahan mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat gagal dalam memberikan kepastian hukum. Klaim mencapai keadilan hanya bisa diraba dirasa karena bukan *inderawi*.

Paradigma menentukan metodologi dan menentukan teori misal hukum kodrat tidak akan menggunakan teori Kelsen. Teori Kelsen sebagai basis kritik. Paradigma

akan menentukan perbedaan objek dan masalah meskipun masalahnya sama. *Dissenting opinion* sebagai wujud perbedaan paradigma. Paradigma akan mempengaruhi teori, misal dalam perumusan masalah.

2) Sesi 2 : Peta Mazhab Hukum Dan Metode Penelitiannya (Widodo Dwi Putro)

Hukum Kodrat

Penelitian sebagai konsekuensi dalam metode. Hukum kodrat juga ranah normatif, yang mana mereduksi peraturan per-undang-undangan dan putusan hakim. Misal perselisihan *pacta sunt servanda* dengan *ex bona fides*. *Pacta sunt servanda* menganggap para pihak sama kuat, permasalahannya jikalau dikemudian hari suatu perjanjian ada unsur kecurangan dan terjadi perselisihan antar asas dengan *ex bona fides*, secara tidak sadar menarik ke arah meta yuridis, kajiannya seharusnya melampaui 1330 KUH Perdata, tidak ada mekanisme penyelesaian asas dalam hukum normatif. Konflik antara kewajiban menempati kontrak, karena kontrak berdasar konsensus dan dianggap sakral, kemudian bagaimana apabila kemudian hari kontrak tersebut bertentangan dengan kepatutan. Pada kasus *Lidenbaum* tahun 1919 hakim melakukan penafsiran hukum terhadap pasal 1320, sehingga disebut lompatan paradigma. Hukum kodrat lebih mengedepankan isi, melihat validitas apakah bersesuaian dengan moral keadilan. Aliran positivisme lahir dari kelemahan hukum kodrat. Hukum dan moral adalah dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Positivisme hukum adalah suatu proses transformatif dari norma dalam wujudnya yang meta yuridis sebagai ide ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara *indrawi* yaitu hukum positif. Menurut *positifisme* tidak boleh melampaui fakta. Hukum sebagai norma keadilan direduksi menjadi hukum positif atau hukum yang kasat mata (tertulis).

Hans Kelsen ingin memisahkan hukum dengan fakta dan hukum dengan moral, yang disebut hukum murni. Kesatuan hukum dan moral, keterpisahan hukum dan fakta, disebut pula mazhab hukum kodrat. Kesatuan hukum dan fakta, keterpisahan hukum dan moral atau disebut realisme hukum (Empirisme).

Apakah dimungkinkan kita mendialogkan paradigma, ataukah kita harus memilih salah satu saja?

Kita sebenarnya bisa melakukan tersebut, namun pada dasarnya kita sudah mempercayai suatu paradigma, namun tidak ada yang mengharap, malahan akan menjadi menarik apabila kita mendialogkan teori satu dengan teori lainnya, asalkan dengan basis argumentasi yang tepat, yang ditekankan adalah kejujuran. Sehingga menjadi parallel, tidak seperti ideologi. Padahal di Indonesia metodologi itu disamakan dengan ideologi, padahal metodologi hanya suatu cara.

Pada suatu literatur yang saya baca, menjabarkan cabang keilmuan, mendekatkan hukum kepada filsafat, bagaimana pendapat Pak Widodo mengenai perspektif literatur tersebut, dikaitkan dengan pemisahan hukum dengan moral?

Hukum lebih sering menyebut dirinya dengan yurisprudensi dan berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Dalam ilmu sosial pencarian kebenaran melalui, sedangkan kebenaran ilmu hukum pencariannya melalui perselisihan di pengadilan. Kalau ilmu hukum dengan ilmu alam, kebenaran dari ilmu alam dapat dipastikan, kalau hukum bukan kebenaran *kausalistik* atau *deterministik*. Artinya kepastian hukum itu rapuh, karena itu diperlukan sanksi maka dibutuhkan sanksi, berbeda dengan hukum alam dimana dapat dipastikan. Sehingga Hans Kelsen ingin

mendudukan hukum sejajar dengan ilmu-ilmu alam yang pasti, sedangkan moral itu terdapat ketidakpastian.

Masih dengan kaitannya mengenai hukum murni, memperoleh sumber hukum dari norma, kemudian norma hukum tertinggi, dari mana kah sumbernya, lalu apabila seseorang memilih suatu teori itu bagaimana?

Sumber hukum murni, itu terkait dengan objek penelitian, kalau menurut Austin hukum itu adalah perintah yang berisi kewajiban yang apabila tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi, lalu kalau demikian apa sumber hukum? Hukum positif, bisa norma perundang-undangan bisa keputusan hakim. Hukum itu identik dengan undang-undang.

Langkah awal menemukan teori harus mengkritik teori-teori yang sudah mapan, teori itu lahir dari kritik terhadap teori-teori yang sebelumnya. Kritis bukan anti, anti bukanlah akademis. Hakim itu cara bernalarnya positivisme.

Mazhab sejarah, hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.

Kebiasaan atau moral itu hukum apabila dipositifkan. Ia menguat atau mati bersamaan dengan bangsanya. Ada pemikiran dimana apabila kita mencangkok hukum perancis yang kita anggap lebih maju maka akan baik. Namun ada pendapat yang bertentangan karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsa.

Metode dan Isu, contoh isu: kriminalisasi “gresek” di batang, jateng, dimana orang-orang yang tidak punya tanah mengais sisa-sisa panen, menurut tradisi hal tersebut boleh dilakukan, namun saat perusahaan perkebunan yang profit oriented masuk, gresek ini masuk dalam KUHP. Pluralisme, lokalitas. Objeknya kebiasaan/tradisi, hukum adat.

Apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa satu perilaku hukum yang sama atau apapun itu, ketika kita mengkajinya dengan mazhab yang berbeda, apakah pasti bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda?

Misalnya pada suatu majelis, terdapat dissenting opinion, hal tersebut karena menurut mazhab hukum murni terhadap kasus gresek tersebut tidak lagi mempertimbangkan moralitas.

Apakah kebenaran yang objektif itu ada?

Perlu diklarifikasi apa yang disebut subjek dan objek, subjek yang mengetahui, objek yang diketahui, kebenaran objektif menginginkan kebenaran itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan peneliti. Seperti itulah cara berpikir positivistik. Kebalikannya adalah kebenaran subyektif, misalnya seorang gadis, menikah dengan pasangan yang berusia 70 tahun, lalu baru kawin ketika baru kawin sudah sakit-sakitan, dimana si suami 70 tahun ini punya harta melimpah, namun baru sebulan si suami 70 tahun ini meninggal, si gadis pun menangis. Kita tidak bisa mengobjekifkan menangis tersebut. Dalam ilmu sosial si peneliti berjarak dengan objeknya, yang kemudian dikritik oleh paradigma interpretifisme. Aliran kritikal tidak cukup memahami tapi bagaimana mengubah keadaan, yang memposisikan tidak hanya sebagai subyek tetapi juga sebagai obyek.

Apakah mungkin mazhab sejarah bisa berdiri sendiri, apakah mungkin mengkritik sejarah padahal sejarahnya sudah lewat?

Yang dimaksud paradigma mazhab sejarah, dalam adat ia akan menafsirkan eksistensi hukum adat dan perkembangan masyarakatnya.

Apakah itu cukup pada level disertasi?

Saya pikir sejarah itu bukan sesuatu yang bergerak linier dan lahir dari ruang hampa, sehingga tidak cukup secara deskriptif namun eksplanatif yang menjelaskan peristiwa yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Sociological jurisprudence

Menurut Roscoe Pound hukum itu bisa menjadi rekayasa sosial, ia ingin mendudukan hukum itu lebih maju daripada masyarakatnya. Misalnya bagaimana hukum itu menekan laju pertumbuhan penduduk yang pesat pada waktu itu. Roscoe Pound ingin perubahan yang bertahap.

Objeknya, dokumen hukum modern, tradisi, dan hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Observasi langsung melihat bagaimana modernisasi hukum didayagunakan untuk merekayasa kesadaran dan perkembangan masyarakat. Wawancara masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk mengetahui perubahan kesadaran (kuantitatif dan kualitatif)

Misalnya ada sengketa antara masyarakat adat dengan pelayanan kesehatan yaitu dukun bayi, terjadi sengketa ketika bayi yang diahirkan meninggal akan diselesaikan dengan pranata adat yang ada disana, lalu hukum yang digunakan oleh masyarakatnya adalah hukum positif, pada penyelesaiannya apakah bisa disebut dengan *social jurisprudence*?

Bisa karena *socio logical jurisprudence* pada awalnya melihat permasalahan di masyarakat tetapi produk hukumnya adalah hukum yang otoritatif yang dipaksakan untuk mengubah basis sosial bukan menghilangkan.

Realisme Hukum, empirisme merupakan salah satu cara dari paradigma ilmu hukum, yang dilihat bukan logika, tapi pengalaman, mengarahkan kita pada ranah aposteriori. Pada ilmu sosial yang empiris itu positif. Kepercayaan terhadap hukum positif itu kepercayaan kekanak-kanakan.

Metode dan Isu, isu : perilaku hakim menentukan kasus korupsi; metode : observasi & wawancara, pergaulan dan relasi, gaya hidup hakim, latar pendidikan, gaya hidup keluarga, laporan dari masyarakat, akumulasi kekayaan, dsb.

Critical Legal Studies : melihat hukum tidak bebas nilai, bahkan sarat akan kepentingan, dan dia tidak percaya dengan the rule of law.

Isu: Justifikasi hukum terhadap eksploitasi buruh outsourcing; metode: live in, belajar bersama (subjek-subjek), aksi; tujuan: tidak hanya memahami, tetapi mengubah (kritis-transformatif)

3) Sesi 3 : Penelitian Empiris (Rikardo Simarmata) **Penelitian Lapangan Dalam Penelitian Hukum.**

Metode penelitian hukum normatif/doktrinal tidak memiliki penjelasan konseptual mengenai lapangan (*field*). Konsep ini berasal dan berkembang dalam penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, lapangan adalah ruang bagi berlangsungnya fenomena sosial. Istilah fenomena sosial merujuk pada peristiwa-peristiwa sosial beserta pemberian makna oleh individu dan kelompok pada keterlibatannya dalam peristiwa sosial. Saat ini sedang ada *discourse* mengenai kedudukan realitas virtual sebagai kategori lapangan. Dengan begitu, lapangan adalah pengalaman sosial (*experience*) yang dapat diamati (*observable*). Dalam

kaitan dengan itu, metode ilmu sosial mengenal istilah data yang diartikan sebagai *observable fact*.

Bila yang dimaksud dengan lapangan adalah fenomena sosial, maka penelitian lapangan digunakan oleh penelitian hukum empirik/non-doktrinal (pendekatan sosial terhadap hukum). Penelitian hukum empirik berfokus mengamati bagaimana hukum senyatanya bekerja termasuk peranan hukum dan fenomena plural normative order/legal pluralism. Di FH UGM, lapangan sering dikaitkan dengan data primer dan pendekatan empirik. Dalilnya bahwa penelitian hukum dikatakan menggunakan pendekatan empirik apabila mengumulkan data primer melalui wawancara. Pemikiran ini perlu dikritisi karena apakah responden atau narasumber yang diwawancarai mewakili *what law says*, atau *experience* sehingga memberikan makna lewat interpretasi, pada teks-teks hukum.

Teknik penelitian data untuk penelitian lapangan adalah penelitian hukum yang menggunakan penelitian lapangan sepenuhnya meminjam teknik mencari data menurut ilmu sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, *Focus Group Discussion*, dan pengamatan. Wawancara dapat digunakan untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sedangkan FGD dan pengamatan hanya untuk penelitian kualitatif. Manusia memberi pemaknaan berdasarkan relasi-relasi yang dia buat.

Wawancara, percakapan seorang peneliti dengan responden dalam penelitian hukum normatif akan berbeda dengan penelitian hukum empirik yang menggunakan paradigma *interpretivism*. Peneliti pada penelitian hukum normatif dan peneliti sosial yang menggunakan paham positivisme (strukturalis fungsional) melakukan wawancara dengan sudah dikerangkakan oleh hipotesa (sosial) dan hukum sebagai sesuatu yang sudah dianggap *taken for granted*. Dalam situasi konkrit, peneliti pada penelitian hukum normatif bisa terpancing untuk mempengaruhi pengetahuan atau pemahaman responden mengenai hukum dengan cara mengoreksi pemahaman responden pada saat wawancara sedang berlangsung. Penelitian hukum empirik dengan paradigma interpretativisme memantang peneliti untuk mempengaruhi atau mengintervensi pengetahuan responden karena akan menghalangi pencarian kebenaran (*truth*).

Apa benar yang saya pahami apabila kita baca buku Adrian Bedner, apabila hakim PTUN menerima bingkisan atau uang dari pihak-pihak yang bersengketa, dan hal tersebut dianggap wajar sebagai rezeki, apakah ini termasuk kedalam interpretativisme?

Yang dimaksud interpretativisme adalah melakukan *cut*, yang mana menurut peneliti bagian tersebut dianggap keliru.

Apakah ada batasan isu mana yang harus empirik dan mana yang harus normatif?

Hal tersebut merupakan pilihan, situasi psikologis di kalangan akademisi hukum membuat sesuatu itu menjadi baik atau tidak baik (kabur). Pertimbangan memilih opsi tersebut adalah seberapa jauh hal tersebut diteliti dan tergantung pada peneliti. Apabila dikombinasikan akan sangat berat dilakukan.

FGD digunakan dalam rangka memperdalam informasi dan data-data yang sudah didapatkan dengan metode lainnya seperti penelusuran dokumen, wawancara dan pengamatan. Pendalaman dimungkinkan karena para responden berkesempatan untuk saling menanggapi. Penyelenggaraan FGD bisa untuk keperluan memperdalam suatu isu tertentu dengan atau tanpa

Peserta yang homogen. FGD sekaligus merupakan cara untuk melakukan verifikasi informasi dan data. FGD juga dapat menjadi metode untuk menghasilkan

pendapat bersama atau bahkan kesepakatan. FGD juga digunakan bila kelompok yang diteliti terpecah kedalam dua atau lebih kelompok yang berbeda cara pandang karena kepentingan.

Observasi, metode ini meliputi observasi tidak langsung dan langsung (*participant observation*). Observasi model kedua mutlak memerlukan tinggal dilapangan dan beraktivitas sehari-hari layaknya responden. Peneliti mendapatkan informasi dan data dari hasil melihat dan mendengar, serta melakukan wawancara. *Participant observation* bisa menggunakan *ethic view* atau *emic view*, tergantung paradigma yang digunakan.

Mengolah data penelitian lapang dengan 3 tahapan yaitu memilah data kedalam kategori tertentu (isu, periode, aktor, dll) (*coding*); membuat tulisan-tulisan pendek menurut kategorisasi. Tulisan-tulisan tersebut bisa bertransformasi menjadi makalah atau Bab (membuat *research memorandum*); menuliskan laporan penelitian dengan cara memindahkan hasil *coding* atau *research memorandum* (adalah tahapan mengumpulkan data yang apabila direkam sudah ditranskrip, apabila dalam bentuk catatan sudah dirapikan) yang dibuat *paper-paper* pendek yang berkaitan dengan isu yang akan dibuat. ke dalam *outline* laporan (penulisan laporan penelitian).

Tantangan dan tips, menghilangkan pengaruh karakter dasar ilmu hukum yang cenderung menunggal kebenaran dan positivisme hukum yang menganggap hukum negara sebagai yang determinan dan bahkan satu-satunya. Dalam wawancara hindari perilaku mengajari responden; pertanyaan tidak bersifat *straight to the point*, apalagi kalau respondennya orang awam. Pertanyaan bisa berupa pengandaian atau perumpamaan. Penting mendapatkan *contact person* yang bisa membantu mendapatkan informasi mengenai kandidat responden atau bahkan menghubungkan dengan responden. Transkrip rekaman wawancara atau menuliskan catatan wawancara yang segera, mutlak diperlukan bagi penelitian yang menggunakan metode etnografi agar bisa menampilkan idealitas dan situasi yang seolah-olah live.

Etika penelitian lapangan, membuka informasi kepada responden mengenai identitas peneliti; membuat kesepakatan mengenai penyebutan nama-nama responden, termasuk nama-nama lokasi; batasan penggunaan identitas primordial untuk pendekatan kepada responden; tidak memberikan janji-janji kepada responden agar bersedia diwawancarai.

Pertanyaan bersifat *straight to the point*. Pertanyaan bisa berupa pengandaian atau perumpamaan apakah yang dimaksud?

Tidak mengajukan pertanyaan yang kalimatnya seperti mengulangi panduan pertanyaan yang disiapkan.

Bagaimana kita memastikan data lapangan yang kita miliki sudah cukup untuk menunjukkan adanya kebenaran?

Kebenaran hanya ada pada bendanya. *Scientific method* adalah keyakinan untuk mencapai kebenaran.

Bagaimana memaknai sebuah ritual dan makna ritual? Memakai *scientific method*

Bagaimana jika seorang narasumber yang berhalangan namun akhirnya menanyakan kepada narasumber di acara seminar, apakah metode seperti itu bisa di klaim sebagai wawancara?

Pertanyaan kepada beberapa narasumber (*lawyer*, akademisi dan praktisi) sudah membuat daftar pertanyaan spesifik kepada mereka. Hal tersebut ditanyakan saat seminar, apakah bisa klaim sebagai wawancara?

Masukan itu sebagai bahan hukum sekunder, tapi terlepas dari itu Peter Marjuki yang membahas mengenai itu. Secara logic wawancara atau seminar, jawaban narasumber apalagi sama dengan yang kita pikirkan, itu hanyalah sebuah metode. Apabila itu dipakai akan beda hasilnya ketika dia diwawancarai dengan dia menjadi narasumber pada forum yang berbeda. Saya pada posisi si penyusun aturan digantikan dengan akademisi, karena rasional intent nya akan berbeda. Namun secara *ratio legis* hal tersebut masih memungkinkan untuk digantikan oleh akademisi. Harus dipahami dari awal bahwa apa yang dimaksud oleh suatu peraturan dan di intepretasikan oleh akademisi itu akan jauh dari kebenaran, karena intent nya ada pada pembuat aturan.

Untuk mendapatkan data perlu dipertimbangkan untuk menggunakan data identitas sebagai *bargaining position*, apabila kita tidak mempunyai *bargaining position* apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan data?

Tergantung kepada *contact person* nya, soal etika kita menggunakan power, jadi kita tidak bisa menggunakan selain itu. Kalau penelitiannya agak lama, mendatangi responden bisa lebih dari sekali dua kali, tidak bisa langsung wawancara.

4) Sesi 4: Filsafat Ilmu: Dialog Antar Filsafat Dan Problem Aktual Ilmu Hukum (Rizal Mustansyir)

P besar menggali teks lama, Plato, Socrates, Aristoteles, Thomas Quinas dll
P kecil adalah menerapkan filsafat pada konteks praktis misalnya metodologi
Apa yang dimaksud dengan kemajuan ilmu hukum?

Semua ilmu memiliki keinginan untuk memiliki kemajuan, perkembangan dan mengubah paradigma

Apa syarat yang diperlukan bagi ilmuwan hukum untuk mengembangkan bidang keilmuan?

Sudahkah mempengaruhi kemanusiaan, profesionalitas dan metodologi?
Sejauh mana batas keilmuan yang dapat dijangkau ilmu hukum itu?

Pohon Ilmu: *Encyclopedia* 1959 Hukum masuk cabang Antropologi

Pohon Keilmuan Aristoteles:

Dianoia: Kegiatan intelektual yang secara kritis menilai konsep-konsep

Theoria: Pengetahuan yang ingin dicari

Techne: pengetahuan untuk membuat sesuatu

Phronesis: Pengetahuan untuk bertindak bijaksana

Sophia: Kebijaksanaan

Rumpun Ilmu Kaitannya dengan Objek Ilmu (DIKTI)

Peristiwa Sosial termasuk Ilmu Sosial: Hukum

Taraf realitas dan ilmu → Bentuk keong

Oxford Companion to Philosophy → Honderich

3 ring:

Ring 1: Epistemologi, Metafisik, Logika dan Filsafat Logika.

Ring 2: Filsafat Ilmu, Bahasa, Jiwa dan Moral.

Ring 3: Filsafat Hukum, Sejarah, Pendidikan, Politik, dll.

Ranah Ilmu di UGM:

Ranah Ilmu Dasar, Ranah Terapan Ilmu (Hukum) dan Ranah Terapan Publik

Apa itu Filsafat Ilmu?

Masalah Filsafat ilmu?

1. Apa tujuan dan bagaimana metodenya
2. Bagaimana teori ilmiah berkaitan dengan aplikasi

Yang benar filsafat hukum apa filsafat ilmu hukum?

Filsafat ilmu hukum: berangkat dari ilmuwan hukum karena ada *body of knowledge* dan telah memiliki metodologinya.

Filsafat hukum: sudah ada sejak dulu, yang memang telah memperdebatkan aspek filosofis dan secara umum.

Penemuan kebenaran hukum melalui perselisihan kebenaran di penelitian, misal pada putusan hakim. Kadang pada putusan pun tidak bulat karena ada *dissenting opinion*. Dalam kasus serupa sering beda putusannya. Pertanyanya ilmu tentu harus *rigid* keika menemukan sebuah kebenaran. Apakah hukum itu ilmu atau seni?

Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak karena bisa ada perubahan paradigma dan perkembangan tertentu. Kenapa hukum tidak mutlak karena ada interest masuk ranah *pre supposition*. Kaum Sophis dulu, ahli hukum harus mengetahui *rethoric* itulah mengapa hukum bisa cenderung dengan seni.

Bukankah filsafat ilmu hukum bisa memperjauh dengan realitas sosialnya?

Ilmuwan adalah orang yang bekerja dengan pikiran. Pikiran bekerja pada *conciesness* juga pada ranah qalbu. Filsafat ilmu hukum tidak akan terjebak pada yang di khawatirkan karena memang akan bergelut dengan realitas sosial. Hanya filsafat ilmu hukum harus dikomparasi dengan filsafat hukum, dengan mempertimbangkan menggunakan *hermeunetika*.

Filsafat Ilmu:

Nature of Science dan Methodology

Landasan Pengembangan Ilmu Hukum

Ontologis: Sasaran Kajian Ilmu Hukum

2. Apa yang menjadi perhatian ilmu hukum?
3. Apa hakikat hukum?
4. Apa yang dimaksud dengan legal?
5. Apa yang dimaksud dengan Rule?
6. Apa yang dimaksud dengan Verdictive?
7. Apa yang dimaksud dengan Beleid?

Epistemologis: Metodologi dan kebenaran Ilmu Hukum

1. Apa yang menjadi dasar kebenaran ilmu hukum?
2. Apa yang menjadi dasar kesahihan ilmu hukum?
3. Bagaimana cara yang ditempuh dalam mendapatkan kebenaran?
4. Bagaimana cara yang dilakukan ilmu hukum untuk menguji suatu teori/hipotesis?
5. Bagaimana metodologi ilmu hukum itu diberlakukan?

Aksiologis: Nilai/Manfaat Ilmu Hukum

Problem Ilmiah: Apa yang menjadi dasar kebenaran ilmu?

Adakah pendeskripsian ilmu sesuai dengan realitasnya?
Adakah penjelasan ilmiah tentang realitas dapat dipercaya?
Apakah ilmu itu sehingga bisa diverifikasi?

Fakta adalah sesuatu yang ada diluar pikiran manusia → merangkai objek sehingga menjadi fakta.

Apa yang menjadi dasar kesahihan ilmu?
Apakah hukum ditujukan kepada manusia?
Hukum memang ditujukan untuk manusia.

Prinsip Metodologi

Prinsip verifikasi semangatnya *context of justification* dan prinsip *falsification* semangatnya *context of discovery*

Derajat *falsifiabilitas*

Harus membuka peluang yang luas

Pengujian hipotesis tidak ada mesti teori atau harus ada teori?

Novel fact → fakta barunya apa, dan level terendah pun pasti akan ada teori

Bagaimana tentang kebenaran abadi?

Kebenaran abadi adalah milik Tuhan namun bagaimana manusia memaknai dan mencapai dan menginterpretasikan kebenaran. Tergantung perspektif.

Bagaimana sebuah ilmu atau teori, apakah bisa di *challenge* oleh se-disiplin ilmu atau lintas ilmu?

Apabila telah ada kerjasama antar lintas ilmu maka bisa saling *challenge* apabila belum maka se-disiplin ilmu.

Terkait *textual* dan *contextual*?

Yang menjawab adalah hermeneutika. Harus diolah berdasar kepada pergolakan/*tension text* dan *context*. Terjadi pergolakan antara *reader*, *author* dan *text*.

Mono methodology: Craving for generality, dominasi rasionalitas, bertitik tolak dari hukum umum, kebenaran absolut dan standar umum

Plurimetodologi: craving for plurality, dominasi empiris, bertitik tolak dari kasus, kebenaran relatif dan tergantung komunitas.

5) Sesi 5: Penelitian Hukum Normatif Harmonisasi Undang-Undang Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Maria S.W. Sumardjono)

Posisi metodologi mendapatkan porsi perhatian paling tinggi dalam penelitian disertasi. Penelitian Hukum pergolatan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Penelitian harus memiliki limitasi, orisinal dan mendalam serta harus memiliki kerendahan hati dalam bentuk pengakuan keterbatasan.

Penelitian Normatif

1. Penelitian Asas → bisa secara bergantian dengan Prinsip
2. Perbandingan Hukum
3. Sejarah Hukum
4. Sistematika
5. Sinkronisasi

Cara menilai Sinkron atau tidaknya dengan memakai suatu indikator. Penelitian kualitatif itu menggunakan *analysis content*.

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Setelah menjadi data lanjut menjadi bahan. Itu bagaimana?

Bahan hukum adalah bahan untuk mencari sumber bisa menjawab permasalahan yang berbentuk tulisan. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder diambil dari hasil olahan data primer.

Satu rumusan masalah dan ada empat masalah. Salah satunya adalah inform consent yang akan diperbandingkan dengan Jerman. Beberapa poin masalah menggunakan gabungan normatif dan wawancara? Apakah masih dikatakan normatif?

Termasuk penelitian normatif, karena pertanyaan kepada ahli tetap jawabannya dikembalikan kepada nilai filosofis yang termasuk normatif.

Konteks "Perlindungan Hukum" harus melihat implementasi nya namun beberapa mahasiswa menggunakan dengan data sekunder atau data dari penelitian sebelumnya. Apakah konteks tadi bisa dikatakan penelitian normatif murni atau empiris?

Sangat normatif karena menganalisis data sekunder. Dalam ilmu hukum adalah susahnya menentukan indikator karena tidak punya indikator dan metodologi.

Dalam mencari nilai ideal yang diambil dari perilaku, boleh?

Ketika melakukan penilaian kita menilai pernyataan narasumber atau responden karena memiliki nilai atau asas dalam menilai hasil pernyataannya tersebut.

Jika suatu penelitian mendapatkan data primer tapi tujuannya untuk menguji kesesuaian norma dan fakta maka tetap normatif?

Benar, karena poinnya menguji norma dan *content analysis*.

Penelitian hukum empiris itu seperti apa?

1. Istilah normatif dan empiris, bagaimana membedakan kedua penelitian tersebut? Baca buku saya, proporsionalitas yang menentukan mana normatif mana empiris.

2. Terkait teknis kebiasaan, ada subbab khusus keaslian penelitian namun juga ada tinjauan pustaka. Kenapa keaslian tidak masuk kepada tinjauan pustaka? Penilaian karya ilmiah: signifikansi, orisinalitas dan tingkat *plagiarism*.

3. Bagaimana terkait teknis sitasi bahan hukum primer?

Bagaimana dengan penelitian yang hanya mengganti objek namun secara variabelnya sama. Apakah termasuk asli?

Sebetulnya tidak boleh namun di kompensasi hanya untuk mahasiswa S1.

6) Sesi 6: Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Sosial (P.M. Laksono)

Kita tahu ilmu mencari kebenaran, kebenaran secara umum disebut epistemologi. Kenyataan secara umum bisa kita bagi kedalam 2 dimensi yang dijadikan objek material ilmu kita, yang pertama yaitu kenyataan yang bersifat frekuensi dimana kenyataan itu punya frekuensi (kejadian yang berulang-ulang). Kenyataan yang bersifat frekuensi ini dapat dihitung probabilitasnya. Pendekatan yang digunakan adalah probabilitas statistik, dimana sifatnya objektif. Keduanya Tafsiriah adalah kenyataan yang bersifat keterangan atas kejadian, gejala ini kualitatif, dasarnya mencari interpretasi mana yang paling tepat, paling cocok yang dapat diterima oleh akal sehat kita. Oleh karena itu dalam melakukan riset kita

harus tau kemana harus bergerak mencari tafsir. Misalkan riset mengenai undang-undang, yang pada dasarnya adalah riset fakultatif.

Semua penelitian akan terantuk pada 2 jenis pertanyaan besar. Penelitian yang baik dilakukan dengan terjun langsung kedalam masalah. Lama kelamaan, berdasar jam terbang kita, penelitian kita akan lebih tajam. Tidak bisa secara singkat diperoleh dengan jam terbang yang sedikit.

Pada contoh, di daerah Sumba Barat dapat kita lihat bagaimana kenyataan sebuah desa adat yang berada di tengah kota. Pemborosan disana terjadi karena mereka sering berkorban untuk pesta. Perempuan, anak, dan adat sebagai gantungan masa depan Sumba Barat justru menjadi korban dari keborosan. Misalnya saat pernikahan dibutuhkan kurban sebanyak yang telah disepakati, apabila tidak bisa melunasi maka bisa diangsur. Pada saat pria tadi meninggal, jangkar untuk melunasi kerbau tersebut turun kepada anaknya. Pada masa kini kerbau sudah ada harganya tidak seperti dulu lagi dimana kerbau dapat diperoleh dari berburu di padang rumput, sehingga dari sinilah persoalan keborosan tersebut muncul. Lalu untuk mencari jalan keluar yang harus diambil dilakukanlah penelitian.

Maka dengan metode penelitian yang bersifat etnografis (holistic), bersifat reflektif dan kritis, digunakan untuk menemukan alasan-alasan pemborosan tersebut, kemudian mengkritisi untuk mendekonstruksi salah kaprah. Lalu dibutuhkan diskusi terpumpun (FGD) atas hasil penelitian tersebut.

Hasil studinya, kurban yang tidak sesuai tadi pelunasannya dimusyawarahkan secara duduk melingkar untuk dinegosiasikan kembali. Sikap itu gejala yang frekuensi (ada naik dan turunnya), karena itu sikap itu bisa dihitung dan perlu metode untuk menghitungnya. Menghitungnya dengan membuat stimulus di dalam kuesioner. Penafsiran atas frekuensi ini, bahwa dalam merubah adat ini sikap orang bersifat tidak stabil

Pada tradisi Marapu, nenek moyang sebagai pencipta dan sumber hidup, ajarannya meliputi keseimbangan energi menjadi sumber kebahagiaan, hal seperti ini membutuhkan wawancara mendalam terhadap responden. Dalam tradisi Marapu posisi laki-laki ada pada pewaris dan pencari hutang. Karena tradisi di Marapu yang seperti ini besaran pesta tidak terbatas, hewan yang disembelih menjadi tidak terbatas.

Dalam melihat ekonomi sehari-hari adat setempat kita tidak bisa menggunakan sembarang metode, harus menggunakan pengamatan, dengan tinggal bersama warga. Hasil penelitian menunjukkan setengah responden setuju bahwa adat itu boros (51,4%) dan setuju untuk menyediakan hewan, tetapi hampir setengah responden (48,6%) meragukan dan tidak setuju bahwa adat itu boros, dan seterusnya. Dapat dilihat kebiasaan hipokrit dari warga.

Sampailah pada kesimpulan bahwa keborosan (kelindan) yang harus diselesaikan dengan kebijakan. Pada adat tersebut muncul resiprositas negative yang artinya adalah pertukaran yang memuat bentuk-bentuk eksploitasi untuk mencari keuntungan, lalu muncul kekerabatan semu yang artinya adalah hubungan sosial seolah-olah bersaudara karena keturunan atau perkawinan.

Jajaran pemerintah Sumba Barat harus mampu memberi contoh mengembangkan hidup efisien. Penyelenggaraan kongres dan musyawarah adat. Standarisasi dan akuntabilitas analisis dan ramalan para rato. Pembatasan pertukaran di luar daur hidup. Insentif dan disinsentif pemotongan hewan ritual, dan lain-lain. Setelah pembuatan policy brief dibuatlah naskah akademik.

Apakah Prof percaya hukum negara adalah alat rekayasa social yang efektif?

Ya setengah mungkin, kalau seluruhnya saya kira tidak, kalau belajar dari pengalaman sepertinya tidak, seperti hasil penelitian dimana penyelesaiannya adalah penginsyafan, hukum tidak bisa menginsyafkan yang bisa hanyalah diri sendiri. Aturannya ada namun diabaikan.

Menurut prof untuk hukum sendiri porsinya seberapa besar dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan di masyarakat, haruskah kita membuat interdisipliner, apakah hal yang dilakukan oleh orang di antropologi bisa dilakukan oleh orang hukum juga? Sejauh mana sarjana hukum bisa terlibat dalam pengalaman yang sama dengan teman-teman di antropologi, apakah batas itu memang harus dibangun ataukah dengan pengalaman yang sama?

Mengapa tidak orang antropolog menjadi orang hukum dan sebaliknya, kebenaran dicapai dengan pendalaman ilmu yang kita jalani. Namun interdisipliner terbilang tabu. Kita memang perlu berkolaborasi, karena ada titik-titik tertentu dimana kita membutuhkan orang dari disiplin yang lain. Permasalahan lain ada pada Universitas kita karena tidak memberikan dana sepeserpun untuk Pusat Studi yang mana adalah pihak yang mengampu interdisipliner.

Terkait dengan Teknik pengumpulan data, ada pertanyaan yes no question, ada juga in depth interview, apakah bisa dibagikan pada kami disini pedoman atau alat pengumpulan datanya ini seperti apa?

Approachnya adalah etnografis, mencari hubungan antara data, peristiwa, bukti. Data yang macam-macam ini tergantung pada diri kita. Apakah kita menggunakan frekuensi atau yang tafsiriyah. Pencarian ini dilakukan hingga titik jenuh. Dalam wawancara kadangkala tanpa perlu bertanya kita bisa memperoleh data. Perda itu tidak menyelesaikan, perda itu hanya akan dilanggar, bahkan akan muncul perilaku koruptif dari perda-perda tersebut. yes no question untuk melakukan pengecekan gejala frekuensi, bukan untuk mencari data kualitatif, untuk memberi petunjuk kepada pencarian jawaban yang lebih kualitatif.

Apakah di dalam lingkup antropologi penggunaan kata "hampir seluruh kabupaten sumba barat..." biasa digunakan, kemudian apakah dengan adanya perda ini orang akan hidup tidak boros?

Disini kita blusukan hampir keseluruhan sektor. Selalu ada unsur keberuntungan dalam setiap keberhasilan penelitian.

b) Dokumentasi

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin, 2 Oktober 2017	08.00-09.00	<i>Morning Snack</i> dan Registrasi
	09.00-9.30	Pembukaan: Sambutan Dekan
	9.30-11.30	Penyampaian Materi (termasuk tanya jawab) Posisi Paradigma Ilmu Sosial dan Pengaruhnya terhadap Mazhab Hukum (Dr. Widodo Dwi Putro, S.H, M.H.)
	11.30-13.00	ISHOMA

	13.00-15.00	Penyampaian Materi Implikasi Metodologis dari Aliran Pemikiran Hukum (Dr. Widodo Dwi Putro, S.H, M.H.)
	15.00-17.00	Penyampaian Materi Mempersiapkan dan melakukan penelitian lapangan perspektif sarjana hukum (Dr. Rikardo Simarmata, S.H.)
	17.00	Selesai (<i>Coffee Break</i>)
Selasa, 3 Oktober 2017	07.30-08.15	Morning Snack dan Registrasi
	08.15-08.30	Pembukaan
	08.30-10.30	Penyampaian Materi (termasuk tanya jawab) Filsafat Ilmu (Dr. Rizal Mustansyir, S.H., M.Hum)
	10.30-12.30	Penyampaian Materi Teknik Pengumpulan Data Mencari dan mengumpulkan bahan hukum sebagai data penelitian hukum normatif (Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA.)
	12.30-13.00	ISHOMA
	13.00-15.00	Penyampaian Materi Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian sosial (Prof. Paschalis Maria Laksono, Ph.D.)
	15.00	Penutup (<i>Coffee Break</i>)

5. Workshop Peningkatan Publikasi Dosen dan Persiapan Studi S3

a) Ringkasan Materi dan tanya jawab

1) Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

Studi dan Tuntutan Profesi

Struktur jenjang pendidikan dosen menjadi poin penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi agar dapat bersaing secara nasional maupun internasional. Saat ini jumlah dosen dengan jenjang studi s3 di Indonesia adalah 26.409 orang. Data tersebut menunjukkan angka yang relatif sedikit dibanding dosen dengan jenjang studi s2 yakni 144.176. Berdasarkan masalah tersebut, terdapat beberapa alasan mengapa dosen belum melanjutkan studi doktor, antara lain ;

1. Permasalahan biaya

Peluang beasiswa studi doktoral di fakultas hukum UGM relatif lebih besar, sehingga masalah biaya tidak bisa menjadi alasan.

2. Sibuk Berbisnis
Dosen-dosen sangat dekat dengan proyek-proyek yang menyebabkan niat dan waktu untuk melanjutkan jenjang pendidikan s3 menjadi terhambat.
3. Tidak berani ke luar dari zona nyaman
Zona nyaman dalam posisi dan jabatan dapat menghambat untuk melanjutkan jenjang studi ke s3. Padahal, studi tersebut dapat mengembalikan kita ke posisi yang lebih baik.
4. Alasan Rumah Tangga
Rumah tangga menjadi masalah terutama bagi perempuan. Sehingga perlu banyak hal yang perlu dipersiapkan.
5. Syarat yang memberatkan
Masalah yang biasanya muncul adalah TOEFL dan TPA. Rata-rata syarat TOEFL yang diminta adalah 500. Mahasiswa yang akan mengambil program studi s3 perlu mempersiapkan TOEFL sejak lama.

Alasan dosen FH UGM perlu doctor

1. Visi UGM menjadi *research university*.
2. Reputasi UGM
3. FH UGM adalah pilihan pertama lulusan SMU yang memilih Ilmu Hukum
4. FH UGM memiliki 7 Program Studi pascasarjana, sehingga membutuhkan minimal 50% dosen dengan jenjang pendidikan s3.

Korespondensi dengan supervisor

Mengapa perlu berkorespondensi dengan promotor?

1. Memperkuat motivasi untuk studi lanjut
2. Lebih utama memilih promotor daripada memilih PT
3. Lebih mengenal calon promotor
4. Untuk mengetahui apakah topik penelitian yang dipilih sesuai dengan perkembangan ilmu.
5. Memudahkan pengelola program doctor menentukan promotor

Pemilihan topik penelitian disertasi sebaiknya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dosen harus mampu memahami kebutuhan bangsa. Meski demikian, akan selalu ada masyarakat yang bekerja manual atau dalam kata lain menggunakan hasil revolusi industri sebelumnya. Alec Ross menulis tentang industri di masa depan yang menekankan penggunaan computer.

Checklist pendaftaran

Sebaiknya tidak melanjutkan studi di FH UGM, sebab dikhawatirkan terjadi inbreeding. Studi di luar bermanfaat untuk menambah informasi dan menghindari reproduksi kualitas yang buruk. Sekalipun UGM merupakan program s3 dengan akreditasi terbaik di Indonesia, namun tidak semata mata kita melihat reputasi. Selain itu pilih bidang penelitian yang sesuai dan biaya studi.

Strategi Kelulusan

Pertama perlu adanya niat sungguh-sungguh dari awal untuk melanjutkan studi. Banyak kasus dosen-dosen yang belum lulus sebab sejak awal hanya karena ada beasiswa.

Pertanyaan

1. Irine
Apakah bisa mengganti ujian terbuka dengan seminar internasional?

Di Fakultas Hukum seluruh Indonesia tidak bisa menggunakan opsi tersebut. Ujian terbuka tujuannya adalah mempromosikan bahwa yang bersangkutan adalah doctor dalam bidang tertentu

2. Eka
Materi yang dipublikasikan dalam jurnal apakah bisa sama dengan disertasi? Sebaiknya tidak sama persis, namun bisa mengambil bagian tertentu dalam disertasi. Hal tersebut untuk menghindari selfplagiarism
3. Tody
Apakah program s3 di FH UGM by research atau terstruktur? Apakah polanya sama dengan universitas lain? Kalau by research mengapa mata kuliah menjadi beban sks yang pengaruh pada IPK?
Terkhusus di UGM, program s3 ditekankan pada research. Pengembangan mata kuliah dalam program studi doctor diusahakan untuk menunjang research. Di Indonesia terdapat aturan sks minimal, sehingga mata kuliah tetap mempengaruhi IPK.
4. Irine
Kultur dalam setiap universitas berbeda, apakah masih perlu kita memilih universitas selain UGM?
Kalau di UI mereka menggunakan Soejono Soekanto, sedangkan UGM menggunakan prof Sugeng. Sehingga kita perlu menyesuaikan dengan universitas mana kita mengambil program.
5. Kartika
Lebih baik mana yang kita ambil, empiris atau positivis?
6. Andi
Apakah yang mengambil program s3 di FH UGM bisa dibebaskan mengajar? Mengajar justru bisa jadi hiburan untuk melepas penat
7. Eka
Konversi nilai dalam mata kuliah penelitian bagaimana?
Saat ini belum ada konversi nilai yang proporsional untuk mata kuliah penelitian. Semua penelitian yang berhasil dipublish akan mendapatkan nilai 4. Namun, itu dapat menjadi masukan dengan menyesuaikan penilaian berdasarkan akreditasi jurnal yang dituju.

2) I Made Andi Arsana, S.T., M.Eng., Ph.D.

Alasan Studi Doktoral

Analytical mind kita dapat terbangun secara baik yang mana dapat menunjang kesempatan di tingkat internasional dan relasi yang luas. Hal tersebut membuat kualitas kita lebih baik dari segi pengetahuan maupun kualitas personal.

Persiapan Beasiswa

Terdapat hal hal yang harus disiapkan untuk melamar beasiswa, khususnya pada studi doktoral.

1. TOEFL
Skor TOEFL maupun IELTS untuk menempuh s3 sangat penting. Pasalnya dalam penelitian studi doktoral akan selalu ada diskursus ilmu antara mahasiswa dan supervisor. Maka dari itu, keahlian bahasa Inggris sangat membantu dalam memaparkan pemahaman kita terhadap sesuatu agar tidak terjadi mispersepsi.
2. Rekomendasi

Rekomendasi khususnya dari orang-orang yang sudah mempunyai reputasi baik dalam bidang keilmuan yang sejalan dengan program kita sangat dibutuhkan.

3. Motivation Letter

Motivation letter menunjukkan bagaimana komitmen dan alasan kita untuk menyelesaikan program doctoral.

Penelitian PhD

1. Originality

Orisinalitas dalam sebuah penelitian merupakan yang sangat penting. Perlu dihindari adanya plagiarisme. Maka dari itu gunakan sitasi sebaik mungkin. Namun jangan sampai terlalu banyak data yang disadur namun mentah dan kehilangan ide pokok.

2. Novelty

Kebaruan dalam penelitian tidak harus dilihat dari satu sisi.

3. Priority

Terdapat banyak peneliti yang merasa puas setelah tugasnya selesai. Padahal hal itu menjadi celah untuk munculnya penelitian-penelitian baru yang sama persis. Solusinya, kita perlu membuat publikasi, baik internasional maupun nasional.

Proposal penelitian

Banyak penelitian yang terlihat sama namun ada kebaruan. Analoginya seperti film Spiderman. Terdapat banyak film spiderman yang diperbarui dengan kisah-kisah yang berbeda. Namun poinnya adalah bahwa film tersebut bercerita mengenai seorang pemuda yang digigit oleh laba-laba kemudian mempunyai keahlian khusus. Kenyataannya kita masih menonton walaupun kita tahu bahwa itu adalah tokoh dan sebab yang sama. Begitupun dengan penelitian, sekalipun iadiproduksi berkali-kali namun harus punya sudut pandang baru.

Mitos Publikasi Jurnal

Banyak yang berpandangan bahwa hanyalah artikel teoritis berat dan berimplikasi dahsyat yang layak terbit. Kenyataannya tidak demikian. Contohnya terdapat penelitian disertasi yang membahas penonton sepak bola di beberapa negara. Walaupun sesederhana penonton sepakbola, namun penelitian disertasi tersebut mendapat apresiasi yang baik karena merupakan hal yang baru dan sangat orisinal.

Metode menentukan kebaruan

1. Evidences

2. Approaches

3. Ways

Tiga poin tersebut tidak harus semuanya baru. Kadang *evidences* nya sama namun *approaches* dan *ways* nya berbeda. Dengan konsep yang sama, kita dapat melihat satu atau dua diantaranya untuk ditekankan pada kebaruan dan orisinalitas sebuah penelitian.

Proposal Penelitian untuk Orang Awam

Penelitian bukan sesuatu hal yang sangat sulit ditemukan kebaruannya. Saat ini sudah banyak penelitian yang muncul sehingga seolah-olah kita sudah kehilangan sesuatu untuk diteliti. Dianalogikan sebuah botol, sekain banyak orang melihat dari atas dan mereka menyebutnya sebagai pipa yang lurus dengan diameter kecil. Sedangkan terdapat bagian badan botol yang sama sekali belum dilihat sebagai objek penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah mapan di masyarakat sebagai sudut pandang umum belum tentu sebagai kebenaran yang menyeluruh. Singkatnya, dalam penelitian kita dapat menyebutkan penelitian yang sudah ada. Kemudian perlu kita sebutkan sesuatu yang belum ada atau menjadi

kekurangan penelitian sebelumnya. Munculah usulan penelitian yang dapat menjadi objek dalam penelitian doctoral kita.

Managing your Supervisor

Menjalin hubungan yang baik dengan supervisor dapat mempermudah kita dalam proses penelitian. Perlu diingat bahwa proses studi doctoral sangat panjang dan melelahkan. Sehingga relasi yang baik perlu dibangun sejak awal. Khususnya di Australia, budaya egaliter antara dosen dan mahasiswa sangat kental. Budaya tersebut membuat kegiatan penelitian, korespondensi, dan hal-hal lain terkait proses disertasi kita dimudahkan.

Master by research dan master by courses.

Interaksi dosen dan mahasiswa perlu dibangun sejak awal. Dalam konteks Australia, antara dosen dan mahasiswa punya suasana yang cair dan egaliter. Konsep berpikir kita tentang relasi tersebut perlu dipisahkan sesuai dimana kita mengambil studi. Di Indonesia, utamanya bidang Teknik, hubungan dosen dan mahasiswa sangat kaku.

Kehidupan Doktorat

1. Cross Culture

Perbedaan budaya antara negara tempat kita menempuh studi dan budaya asli kita sendiri harus dipahami sejak awal. Proses adaptasi dan pengenalan lingkungan merupakan hal yang wajar, namun jangan sampai itu menghambat proses yang lebih panjang

2. Language

Bahasa di setiap negara tidak sama dan beragam. Penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris dapat memudahkan dalam bersosialisasi dengan lingkungan, supervisor, sampai mencari penghasilan tambahan. Khususnya dalam proses penelitian, penguasaan bahasa sangat fundamental. Kadang terdapat perbedaan pendapat yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita memberikan pemahaman yang kita maksud kepada forum atau seseorang. Hal ini sangat fatal apabila di akhir malah mendapat *major revision* karena keterbatasan bahasa.

3. Curiosity

Pada tahun 1850, di London terjadi wabah kolera. Sekian banyak orang mati dalam waktu yang relatif bersamaan. Media masa dan penelitian menyebutkan bahwa wabah ini disebarkan melalui udara. Namun, ada keraguan dari seorang peneliti yang melihat pola kematian berpusat dalam satu garis khayal lingkaran berdasarkan persebaran sumur di kota London. Dengan pemetaan korban dan sumur, ternyata ditemukan fakta baru. Penyebab wabah kolera menyebar bukan karena udara, namun karena sumur. Penelitian tersebut menunjukkan fakta baru dengan menyalahkan sesuatu yang diyakini orang. Diperlukan rasa penasaran yang tinggi, skeptis, *endurance* yang kuat, juga *network*.

3) Prof. Dr. Ratno Lukito

Karya Ilmiah harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan sumbangan kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam *academic writing* diperlukan sebuah argumen yang berbasis riset. Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penulisan penelitian, antar lain :

1. Introduction : main idea

2. Supporting idea
3. Conclusion, paraphrase

Selanjutnya membuat hasil akhir penelitian dalam laporan riset. Hal ini harus menggunakan standar akademik tertentu. Terutama perlu memperhatikan sistematika yang dimintakan. Dalam artikel riset untuk jurnal, kita akan selalu mengikuti gaya selingkung.

Unsur Pokok

Terdapat beberapa unsur pokok dalam penelitian ilmiah :

1. Background discourse → LB terdiri dari 1. Breaking the ice 2. Scientific discourse 3. Expressing the quality of the research
2. Research Question → menuntun arah riset
3. Theoretical framework → pisau bedah langkah analisis
4. Resource overview → positioning riset
5. Method of the study → aspek teknis riset

Deskripsi artikel riset

1. Abstrak
2. Hasil temuan dari penelitian sebelumnya
3. Deskripsi tentang penelitian
4. Signifikansi penelitian

Penyusunan Artikel

1. Paragraf pembuka
2. Body article
3. Kesimpulan dan penutup

Komparasi antara laporan dan artikel riset

kesamaan

1. Keduanya berupa karya tulis berbasis penelitian ilmiah
2. Mempunyai struktur sama mengikuti prinsip IMRAD

Perbedaan

1. Format dan struktur artikel riset umumnya lebih ringkas dan fleksibel
2. Panjang tulisan artikel riset disesuaikan dengan gaya selingkung
3. Laporan riset di publish dalam monograf, buku atau jurnal ilmiah

Gaya penulisan tergantung kepada style jurnal. Kebaruan tulisan (gaya menjelaskan, penemuan data dengan perspektif baru dan analisis/menciptakan teori) dan *impact* tulisan. Selain itu Indeks membantu dalam *collecting literature*, membaca *skimming*, dan berawal dari topik bukan bahan bacaan. Ringkasnya, analisis naskah dan memulai dari fokus dan topik.

4) Dr. Surya Tjandra

Pemaparan persiapan dan riset dari Susilo Andi Darma, Nailul, Tody, Eka, Dilla, Nuki. Dalam penyusunan disertasi bisa masih proses mencari topik. Permasalahan metodologi. Blind spot tentang perspektif. S3 hanya menambah sensitivitas terkait issue.

Disertasi yang baik adalah yang selesai. Jangan mengambil program sandwich karena memakan waktu lama.

Rencana studi doctoral:

1. Memulai topik yang paling menarik. Pilih studi yang potensial buat lulus. Nilai menjadi doktor adalah untuk meningkatkan martabat keilmuan.
2. Temukan pembimbing yang cocok.
3. Kontak via email.

4. Bayangkan tempat penelitian seperti di Indonesia untuk menjaga waktu disiplin meneliti dan menuliskannya.

Proposal Penelitian

Theoretical analysis itu digunakan bagi semua terutama bagi studi komparatif. Legal transplants lebih cocok dan lebih mudah bagi hukum private karena hukum publik bertautan dengan politik.

Kenapa penting menulis tentang Indonesia? Apa pentingnya bagi ilmu pengetahuan?

1. Jelaskan seberapa pentingnya itu.
2. Mendapat konteks komparatif dalam membantu rencana penelitian, sangat berguna dalam membayangkan kesimpulan.

So What's the argument?

1. Unjuk argumen terkait rencana doktoral.
2. Prove reading memakan waktu lama karena checking content.

Taste of language adalah perbanyak bacaan dan berlatih sendiri.

Plain language adalah style tulisan harvard stanford (kaku) vs Washington Berkeley (luwes)

Sesi 2: Presentasi:

Ide dasar (Latar Belakang dan Research Question) dan

Method (Approach, bukan teknis pengumpulan data dan analisis)

Disertasi (Rikardo Simarmata (R), Surya Tjandra (S))

M. Fatahillah Akbar (A)

Ide dasarnya berbicara pada economic crimes, karena tidak jelas. Intellectual property dll di luar itu kalau kasus semacam itu harusnya langsung pidana, namun di Indonesia masih bisa di perdatakan. Melihat dari konsep Ultimum Remedium yang mana berkaitan dengan restorative justice. Method yang saya gunakan lebih mungkin ke studi peraturan perundang-undangan economy crimes, yang kedua comparative approach atau membandingkan dengan negara lain.

R: Catatan yang saya siapkan, saya berpikir bahwa restorative justice belum menjadi konsep dari hukum pidana, mengapa harus dikaitkan antara ultimum remedium dengan restorative justice, padahal keduanya masuk pada ranah pidana.

A: Lebih kepada metode yang digunakan.

Hendri Julian Noor: Mengapa harus dikaitkan karena tidak semua yang berkaitan dengan pidana tidak selalu masuk hukum pidana.

R: Bagaimana kalau ternyata restorative justice adalah premum remidium.

A: Sebenarnya ini masih ide liar saya

R: Saya masih belum clear mengapa bisa dibandingkan keduanya

S: Esensi dari "economy" saja efisiensi mengapa bicara justice? Masih idealis. Ekonomi yang dicari fairness nya. Restorative justice lebih cocok ke perlindungan anak misalnya.

R: Sebenarnya risetmu sudah menarik cuman karena kamu terbebani dengan sumbangan ke teori, lalu kamu hubungkan ke restorative justice. Saya usul sih perdebatan ekonomi terhadap ultimum remidium.

Sartika Intaning Pradhani (S)

Ide dasarnya, karena saya tertarik dengan Pancasila, NKRI. Saya melihat bahwa desentralisasi tidak seindah apa yang saya pelajari di kampus, namun pluralisme hukum sudah banyak dibahas.

R: Kamu elaborasi, mengapa kamu memilih ide tersebut.

K: Saya membandingkan dengan fakultas politik. Saya melihat dari dinamika.

S: Kamu percaya banget kalau. Terlalu banyak konsep, menyebabkan distorsi. Bagaimana caramu menjelaskan.

R: Kamu kan termasuk orang yang membaca bukunya kencang ya, namun permasalahannya pada fokus. Seberapa efisien anda, karena merasa harus mendapat intisari baru memulai.

K: Adakah saran?

R: Baca 1,2,3 buku buat sintesis, atau kumpulkan 1,2,3 data lalu simpulkan.

S: Tidak usah terlalu peduli pada konsep, apresiasi saja dulu, tidak perlu terlalu minder.

Nella Nailul Amany (N)

Belum terstruktur sama sekali, ide kasarnya tentang serikat pekerja, berawal dari pemberangusan serikat pekerja.

R: S3 tidak harus S2, semua tergantung promovendusnya. Pertimbangan lainnya tergantung hasil komunikasi. Ketika publikasi sudah memadai, punya S2 atau S3 tidak penting. Kajian yang digunakan socio legal, melihat efektivitas aturan.

S: Melihat sejauh mana efektifitas dari keterlibatan pekerja, dan cari kasus, bagus kalau ada success story.

Hendri Julian Noor (H)

Proposal sudah ada, draft belum, sudah ada 300 halaman acak. Berangkat dari kecemasan, dari kasus Hotasi Nababan, dia sebagai direksi Merpati, dimana Merpati tidak punya pesawat sehingga Hotasi melakukan sewa beli, namun pihak lawan wanprestasi dimana si lawyer menggunakan uangnya tersebut, karena beberapa upaya dilakukan dan gagal, pihak Merpati menggunakan Jaksa negara yang akhirnya memenangkan kasus tersebut. Diindikasikan ada tindak pidana korupsi, namun polisi dan KPK menganggap bahwa hal tersebut murni perdata, dst.

S: Argumenmu apa?

H: Mengapa tidak mengambil jalan tengah? Yang dipermasalahkan adalah logika penegak hukumnya.

R: Apakah kamu melihat konflik atau disharmoni, kamu harus jelas menggunakan konsepnya.

Laurensia Andrini (L)

Law and Technology, apakah artificial intelligence bisa dijadikan subjek hukum? Karena penelitian ini sangat futuristik. Saya ingin menggunakan pendekatan metode normative dari sudut pandang company.

S: Apakah AI punya mens rea?

L: Itu yang ingin saya dalami lagi karena tidak jelas.

Anugrah Anditya: ini harus interdisipliner.

R: Ini menarik, tetapi tantanglah dirimu lebih jauh. Lihat lagi apakah AI memiliki kehendak bebas sebagai subjek hukum?

L: Saya ingin meneliti apakah ciptaan AI merupakan ciptaan sipencipta AI.

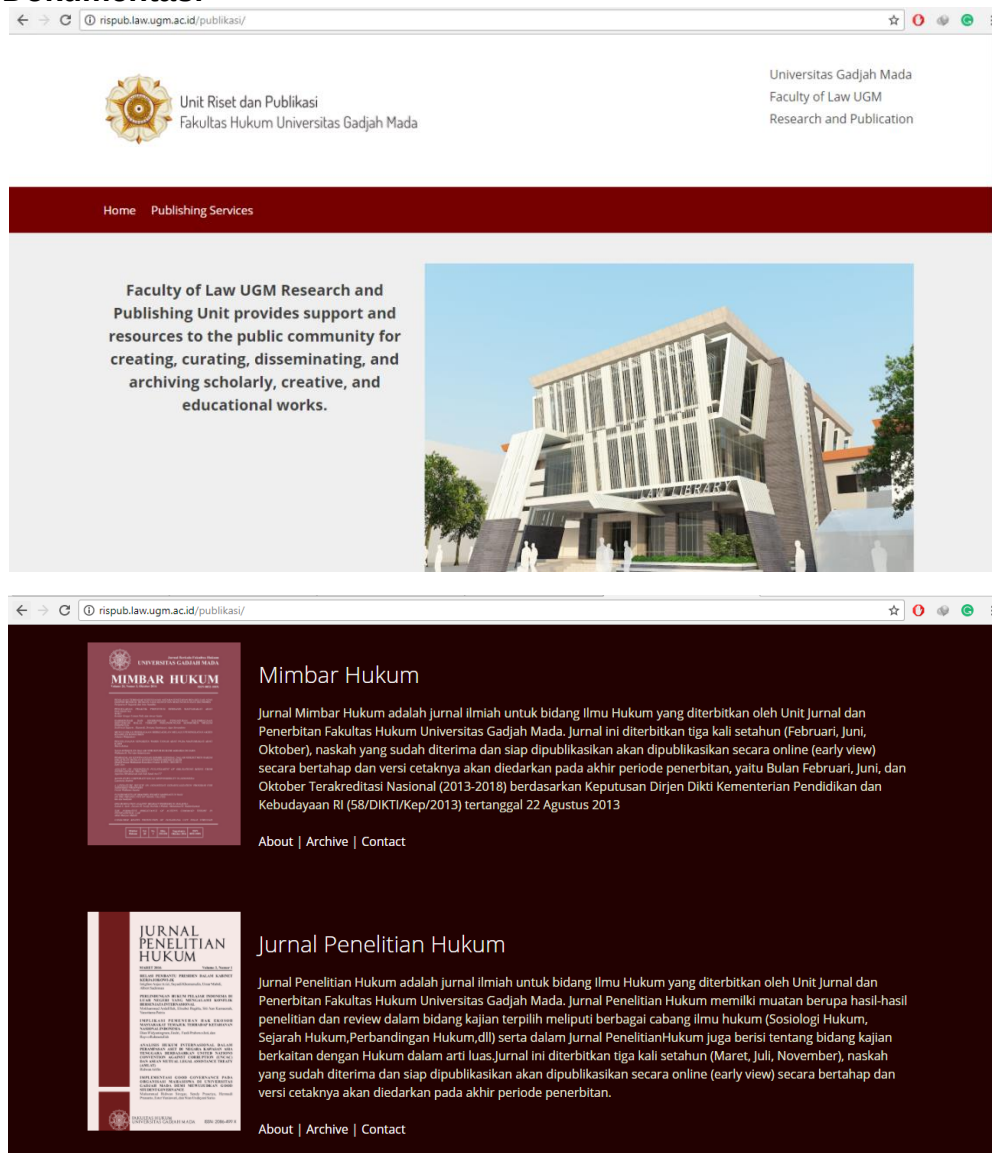
b) Dokumentasi

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 10 Oktober 2017	08.00 – 08.45	<i>Morning Snack</i> dan Registrasi
	08.45-09.00	Pembukaan: Sambutan Dekan
	09.00-10.30	Penyampaian Materi dan Tanya Jawab Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
	10.30 – 12.00	Pembahasan Manuskrip Dosen oleh Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
	12.00-13.00	ISHOMA
	13.00-15.00	Penyampaian Materi Studi Doktor di Dalam Negeri: Peluang dan Tantangan Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.
	15.00-17.00	Penyampaian Materi Studi Doktor di Luar Negeri: Peluang dan Tantangan I Made Andi Arsana, S.T., Ph.D.
Rabu, 11 Oktober 2017	08.00-10.00	Penyampaian Materi Penyusunan Disertasi Proposal dan <i>Statement of Intent</i> Surya Tjandra, S.H., Ph.D.
	10.00-12.00	Review dan Konsultasi <i>Statement Intent</i> oleh: 1. Surya Tjandra, S.H., Ph.D. (Ruang 3.1.1) 2. Dr. Rikardo Simarmata, S.H. (Ruang Debat)

		Peserta diminta untuk menuliskan outlinenya yang terdiri dari <i>backgrounds</i>, <i>research questions</i>, and <i>methodology</i> dalam bentuk <i>mindmap</i>. Setelah setengah jam beberapa peserta akan mempresentasikan mindmapnya dan mendapatkan tanggapan dari narasumber.
	12.00-13.00	Makan Siang dan Penutup

6. Gadjah Mada Source's of Legal Citation

a) Dokumentasi



← → ↻ rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/ ☆ 🔍 🌐

Unit Riset dan Publikasi
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada
Faculty of Law UGM
Research and Publication

Home Publishing Services

Faculty of Law UGM Research and Publishing Unit provides support and resources to the public community for creating, curating, disseminating, and archiving scholarly, creative, and educational works.

Mimbar Hukum

Jurnal Mimbar Hukum adalah Jurnal Ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Februari, Juni, Oktober), naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan akan dipublikasikan secara online (early view) secara bertahap dan versi cetaknya akan diedarkan pada akhir periode penerbitan, yaitu Bulan Februari, Juni, dan Oktober Terakreditasi Nasional (2013-2018) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (58/DIKTI/Kep/2013) tertanggal 22 Agustus 2013

About | Archive | Contact

Jurnal Penelitian Hukum

Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memiliki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, dll) serta dalam Jurnal Penelitian Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November), naskah yang sudah diterima dan siap dipublikasikan akan dipublikasikan secara online (early view) secara bertahap dan versi cetaknya akan diedarkan pada akhir periode penerbitan.

About | Archive | Contact

← → ↻ rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/ 🔍 ☆ 🌐 🌱

Policy Paper, Policy Brief and Working Paper

Berikut merupakan publikasi dari Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM berupa Policy Paper, Policy Brief and Working Paper yang dapat anda akses. Untuk menghubungi kami lebih lanjut dapat melalui rispub.law@ugm.ac.id terkait semua penerbitan kami.

Kertas Kebijakan : Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia

Lima isu perlu diprioritaskan sebagai agenda reformasi hukum dalam tiga tahun ke depan. Kelima isu tersebut adalah 1) Keberpihakan Hukum terhadap Masyarakat Rentan, 2) Disharmoni Peraturan Perundang-undangan, 3) Kriminalisasi dan Pemidanaan yang Berlebihan, 4) Belum adanya Peraturan Pelaksana, dan 5) Kinerja dan Profesionalisme Lembaga Pro Justisia. (Read more...)



Orasi Ilmiah : Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan

Pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada kesempatan ini mengandung beberapa limitasi. Pertama, ruang lingkup pluralisme hukum terbatas pada area nasional dan lokal, tanpa menafikan bahwa untuk bidang-bidang hukum di luar agraria/pertanahan, keberlakuan pluralisme hukum telah melewati batas-batas negara. (Read more...)



Mendesak Kebijakan Alternatif Selain Pengusuran Rumah untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan

(Urging Policy Alternative Against Eviction for Women's Empowerment)

Dengan segala keterbatasan, masyarakat miskin memilih tinggal di perkampungan informal (legal) dengan kondisi fisik rumah dan sanitasi sederhana dan ruang yang sangat kecil untuk pertumbuhan anak. (Read more...)

(With all the limits, disadvantaged people choose to live in informal settlements (legal) with the physical condition of the house and sanitation which is simple and own a very small space for children's activities.) (Read more...)



← → ↻ rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/1/ 🔍 ☆ 🌐 🌱

Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM Fakultas Hukum UGM Universitas Gadjah Mada Kembali

Kertas Kebijakan : Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia

oleh: Tim Dosen Fakultas Hukum UGM



KERTAS KEBIJAKAN
Prioritas dan Rekomendasi untuk Reformasi Hukum di Indonesia

Keberpihakan
Pro Justisia Kinerja Budaya
Prioritas **Hukum** Masyarakat Rentan

Profesionalisme Pengakuan Ideal
Rekomendasi **Disharmoni** Kemanfaatan
Kriminalisasi Pemidanaan
Peraturan **Reformasi**

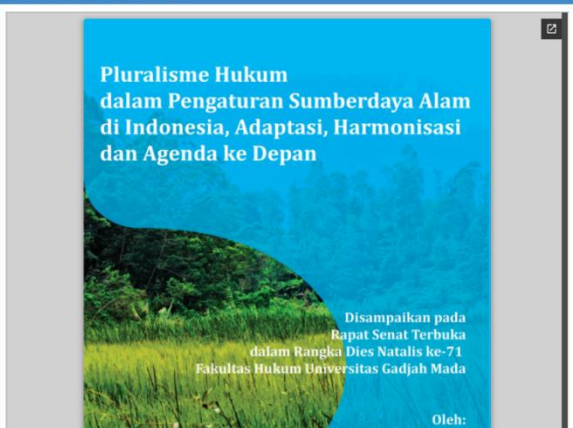
Penegakan Hukum
Pembangunan Keadilan
Undang-Undang **Kebijakan** Informasi
Organisasi **Penguatan** Sistem Aturan
Pelayanan Aparatur Koordinasi
Pembinaan **Pemerintahan**
Kewenangan Manajemen
Kepastian

← → ↻ rispub.law.ugm.ac.id/publikasi/art/data/2/ 🔍 ☆ 🌐 🌱

Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM Fakultas Hukum UGM Universitas Gadjah Mada Kembali

Orasi Ilmiah : Pluralisme Hukum Dalam Pengaturan Sumberdaya Alam di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi dan Agenda ke Depan

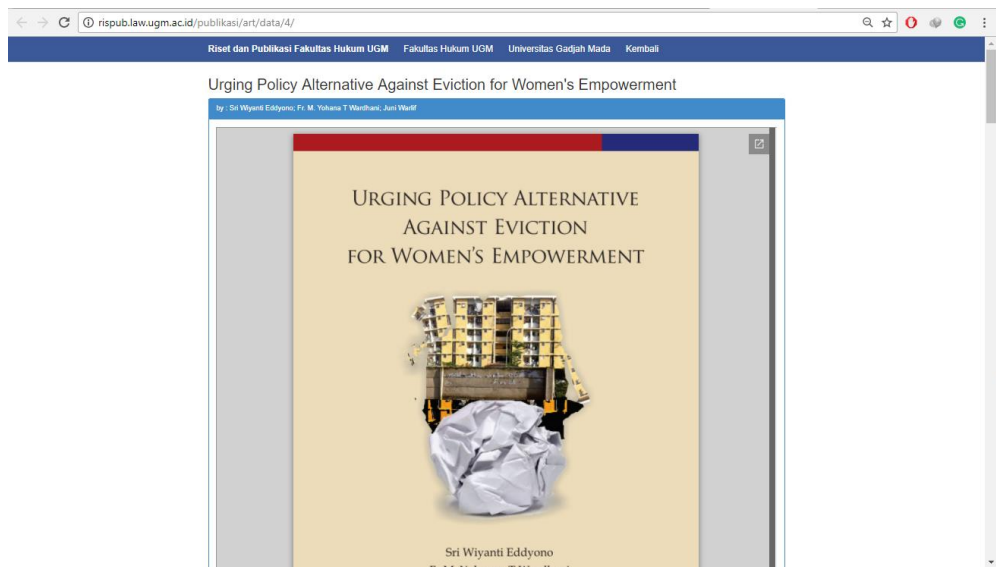
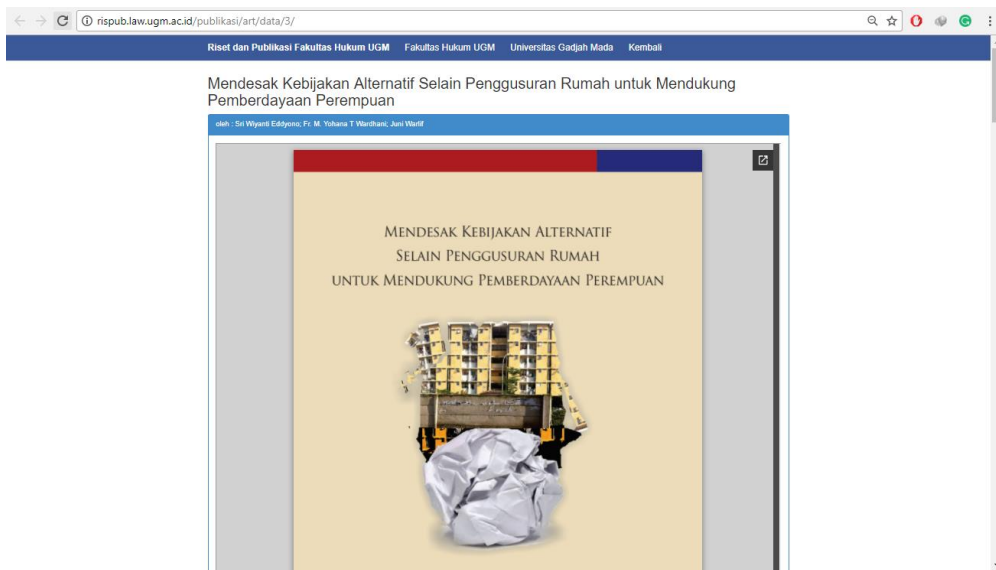
oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardiono, SH, MCL, MPA



Pluralisme Hukum
dalam Pengaturan Sumberdaya Alam
di Indonesia, Adaptasi, Harmonisasi
dan Agenda ke Depan

Disampaikan pada
Rapat Senat Terbuka
dalam Rangka Dies Natalis ke-71
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Oleh:
Prof. Dr. Maria SW Sumardiono, SH, MCL, MPA



7. Daftar Artikel Masuk Mimbar Hukum Tahun 2017

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Internal/Eksternal	Status
1	Timbo Mangaranap Sirait	Yurisdiksi Mengadili Penegakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Multinasional dan Hubungannya Dengan Asas <i>Ne Bis In Idem</i>	Eksternal	Terbit Juni 2017
2	Ratna Juwita	<i>Health Sector Corruption as the Archenemy of Universal Health Care in Indonesia</i>	Eksternal	Terbit Februari 2017
3	Henry Dianto Pardamean Sinaga	Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pajak di Indonesia	Eksternal	Terbit Oktober 2017
4	Ida Ayu Sadnyini	Sanksi Patiwangi Dalam Budaya Hukum Masyarakat Hindu Di Bali	Eksternal	Terbit Juni 2017
5	Mulhadi & Zulfi Chairi	Analisa Yuridis terhadap Kesadaran Hukum Berasuransi Pedagang di Lingkungan Pasar Kota Medan	Eksternal	Terbit Juni 2017
6	Y. Sri Pudyatmoko & E. Imma Indra Dewi W	Penganggaran Keuangan Daerah yang Berpihak pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta	Eksternal	Terbit Februari 2017
7	E. Imma Indra Dewi W, V. Sundari Handoko, & G. Widiartana	Kendala Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul	Eksternal	Tidak Muat
8	A. Astutik	Keadilan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang Melegalkan Aborsi Akibat Perkosaan	Eksternal	Tidak Muat
9	Martin Roestamy & Rita Rahmawati	Model Pengembangan Paradigma Masyarakat bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah	Eksternal	Sudah direview pada Februari 2017 – Naskah Muat dg

				Revisi – belum mengirimkan naskah revisi
10	Sekar Anggun Gading Pinilih	Mendorong Transparansi Ddan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik	Eksternal	Terbit Februari 2017
11	Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, Azizah	Pengalokasian dan Pendistribusian Dana Tanggung Jawab Sosial dan Zakat Perusahaan yang Dikeluarkan oleh Perbankan Syariah	Eksternal	Tidak Muat
12	Aktieva tri Tjitrawati	Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Eksternal	Terbit Februari 2017
13	Ellyne Dwi Poespasari; Sri Hajati; Soelistyowati	Penerapan Perkembangan Hukum Waris Adat Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Diterbitkan dalam B. Inggris: <i>The Application of The Development of Customary Inheritance Law According to the Jurisprudence of the Supreme Court</i>)	Eksternal	Terbit Februari 2017
14	Bisariyadi	Konstruksi Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (The Application Legal Construction in The Rulings of The Constitutional Court)	Eksternal	Terbit Februari 2017
15	Prisila Rieska Pratiwilayan	Implementasi Asas Kekeluargaan dalam Pasal-Pasal pada Perseroan Terbatas	Eksternal	Sudah direview Juni 2017 – Naskah Muat dg Revisi – belum mengirimkan naskah revisi
16	Tutut Indargo	Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta	Eksternal	Tidak Muat
17	Novita Gold Ameyer	Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama	Eksternal	Tidak Muat

	Rehiara	Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku		
18	Haniah Ilhami	<i>Revitalization of Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) in Performing Court-Annexed Mediation for Marital Disputes in Religious Court in D.I.Yogyakarta</i>	Internal	Terbit Februari 2017
19	Dian Ety Mayasari	Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Sebagai Perlindungan Hubungan Hukum Dokter dan Pasien (Diterbitkan dalam B.Ingggris: <i>Informed Consent on Therapeutic Transaction as a Protection of Legal Relationship between a Doctor and Patient</i>)	Eksternal	Terbit Februari 2017
20	Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, Maria Ulfah	Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana	Eksternal	Terbit Februari 2017
21	Andri G. Wibisana	Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan	Eksternal	Terbit Juni 2017
22	Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, & Isis Ikhwansyah	Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata	Eksternal	Terbit Juni 2017
23	Maskun & Muh. Santiago Pawe	Analisis Hukum Perubahan Iklim terhadap Pogram Pembangkit Listrik 35.000 Megawatt	Eksternal	Tidak Muat
24	Muntaha	Kedudukan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Eksternal	Terbit Okt 2017
25	Muzalifah	Studi Al-quran tentang <i>Agreement on Border Trade between the Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia</i>	Eksternal	Tidak Muat
26	Dayno Utama	Pemenuhan Aspek Hukum <i>Counter Accounting</i>	Eksternal	Tidak Muat
27	Mishbahul Munir & Ahmad	Pencegahan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <i>Undocument</i>	Eksternal	Tidak Muat

	Yahya Suryawinata	melalui Penguatan Hukum Berbasis Komunitas Lokal		
28	Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, & Kartika Widya Utama	Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Eksternal	Terbit Juni 2017
29	Arnita Pratiwi, Muhammad Zulfan Hakim	<i>The Difficulties of Prosecuting a Genocide as a Common Crime</i>	Eksternal	Sudah direview Juni 2017 – Naskah Muat dg Revisi – Belum mengirimkan naskah revisi
30	Francisca Romana Harjiyatni	Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sengketa yang Objeknya KTUN Fiktif Positif (Diterbitkan dalam B.Ingggris: <i>The Absolute Competence of the Jurisdiction of The Administrative Court in A Dispute Whose Object is A Fictive-Positive KTUN</i>)	Eksternal	Terbit Juni 2017
31	Sigit Riyanto	<i>The Emergence of Universalism and the Decline of Supranationalism</i>	Internal	Terbit Juni 2017
32	Wahyu Yun Santoso	Aspek Hukum dalam Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Internal	Terbit Juni 2017
33	Sulistiowati dan Saida Rusdiana	Kajian Hukum Trucking dan Warehousing dalam Rangka Mendukung Kelancaran Arus Keluar/Masuk Barang di Pelabuhan	Internal	Terbit Juni 2017
34	Any Andjarwati, Ananda Prima Yurista, & Fajri Matahati Muhammadin	<i>The Impacts of Unclear Law and Border on Environmental Protection: the Case of the Manggarai Timur and Ngada Regencies of Flores, Indonesia</i>	Internal	Terbit Oktober 2017
35	Susilo Andi Dharma	Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat	Internal	Terbit Juni 2017
36	Muhammad Insa Ansari	BUMN dan Kewajiban Pelayanan Umum pada Sektor Minyak dan	Eksternal	Terbit Oktober 2017

		Gas Bumi (Diterbitkan dalam B.Ingggris: <i>State Enterprises and Public Service Obligations in the Oil and Gas Sector</i>)		
37	Nurul Qamar & Hardianto Djanggih	Bahasa Hukum Indonesia dalam Perspektif Keilmuan Hukum	Eksternal	Tidak Muat
38	Supriyadi	Rekonstruksi Kedudukan Benda yang Menjadi Objek Jaminan dalam Perjanjian Fidusia	Eksternal	Tidak Muat
39	Sartika Nanda Lestari, Rinitami Njatrijani, & Nikita Diandra Mayang Puspa	Perlindungan Konsumen Pengguna Gas Bumi atas Terjadinya Kebocoran pada Pipa Penyalur Milik PT Perusahaan Gas Negara (PERSERO) TBK	Eksternal	Tidak Muat
40	Irene Svinarky & Suhaimi	Efektivitas Pasal 22 UU. No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Persengkokolan Data Tender yang Dilakukan oleh Badan Usaha (Studi pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha)	Eksternal	Tidak Muat
41	Indriati Amarini	<i>Experts Reposition in Judicial Practices</i>	Eksternal	Tidak Muat
42	Irfan Ardiansyah	Pengaruh Disparitas Pemidanaan terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Eksternal	Tidak Muat
43	Hambali Thalib, Syamsuddin Pasamai & Ahmad Ramadhan	<i>Criminal Act of Corruption Investigation in the Criminal Justice System (Study in the Local Police of Riau Islands)</i>	Eksternal	Naskah Ditarik Penulis, tanggal 5 September 2017
44	Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Sanyoto, & Wismaningsih	Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas	Eksternal	Terbit Oktober 2017
45	Faisaldus Yonas Bo'a	Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar setelah Perubahan UUD	Eksternal	Tidak Muat

		NRI Tahun 1945		
46	Sartje Virginia Ngangi	Sahnya Peralihan Hak atas Tanah Kalakeran menjadi Hak Milik Perorangan di Minahasa	Eksternal	Tidak Muat
47	Irawati Effendi dan Dini Dewi Heniarti	Tanggung Jawab MNC's terhadap Pelanggaran HAM Indonesia	Eksternal	Tidak Muat
48	Enny Narwati	Perkembangan Hukum Netralitas saat Konflik Bersenjata di Laut setelah Piagam PBB dan UNCLOS 1982 (NASKAH: Hukum Netralitas di Laut setelah Piagam PBB dan UNCLOS 1982)	Eksternal	Terbit Oktober 2017
49	Laurensius Arliman S	Partisipasi Orang Tua terhadap Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia	Eksternal	Tidak Muat
50	Hwian Christianto	Norma Kesusilaan sebagai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim pada Perkara Pornografi melalui Internet di Jawa Timur	Eksternal	Tidak Muat
51	Hernanes Delfim Alves Silva	Tanggungjawab Kepolisian Timor Leste terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Dili	Eksternal	Tidak Muat
52	Nuno Saldanha Da Silva Fatima	Diskriminasi Penegakan Hukum dalam Penanganan Pencurian Arus Listrik Distrik Dili Timor-Leste	Eksternal	Tidak Muat
53	Yusi Amdani	Kekuatan Hukum Audit BPK Untuk Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Telaah Kritis Kasus Pembelian RS Sumber Waras)	Eksternal	Terbit Oktober 2017
54	Ahmad Bardi	Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundering Sebagai Suatu Kejahatan Lintas Negara (<i>Transnational Crime</i>)	Eksternal	Tidak Muat
55	Abidin Safa & Mailinda Eka Y.	Pengaturan dan Pelaksanaan Hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan Lembaga Negara Independen di Indonesia	Eksternal	Tidak Muat
56	Ida Kurnia & Imelda	<i>National and International Dimension in Indonesia's Exclusive</i>	Eksternal	Terbit Oktober 2017

	Martinelli	<i>Economic Zone</i>		
57	Piere Mario Bait	Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Eskternal	Tidak Muat
58	Felix The dan Endang Sri Kawuryan	Perlindungan Hukum atas Kriminalisasi terhadap Notaris	Eskternal	Tidak Muat
59	Galuh Candra Purnamasari	<i>The Effectiveness of Internastional Criminal Court (ICC) to end Impunity of International Crimes</i>	Eskternal	Tidak Muat
60	Soelistyowati	Model Penemuan Hukum yang Bersumber pada Hukum yang Tidak Tertulis	Eskternal	Tidak Muat
61	Sherly P. Lado	Implementasi Individualisasi Pembinaan dan Konsep Program Pembinaan Khusus pada Lembaga Permayarakatan di Kota Kupang	Eskternal	Tidak Muat
62	Marojahan JS Panjaitan	Pembentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Kaidah Penuntun Pembangunan Di Indonesia	Eskternal	Tidak Muat
63	Tedi Sudrajat dan Sri Hartini	Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil	Eskternal	Terbit Oktober 2017
64	Merdiansa Paputungan	Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap Keuangan BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013	Eskternal	Terbit Oktober 2017
65	Ibnu Sina Chandranegara	Desain Konstitusional Hukum Migas untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat	Eskternal	Tidak Muat
66	Trisadini Prasastinah Usanti	Gadai atas Jaminan Sertifikat Merek pada Bank Syariah (Ganti judul: Analisis Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek di Bank Syariah)	Eskternal	Terbit Oktober 2017
67	Henry Dianto Pardamean Sinaga	Kerugian (Pada Pendapatan) Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia	Eskternal	Terbit Februari 2018

68	Danial Kelly	Foundational Sources and Purposes of Authority in Australian law	Eskternal	Akan Direview
69	Yahya Ahmad Zein dan Aditia Syapriallah	Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan	Eksternal	Akan Direview
70	Enrico Simanjuntak	Esensi Sengketa Administrasi di Bidang Pertanahan	Eksternal	Akan Direview
71	Anwar Sadat Harahap dan Ahmad Laut Hasibuan	Pencegahan Pengerusakan Hutan Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan	Eksternal	Akan Direview
72	Endang Purwaningsih , Rika Yuliwulandari , Soenyono, dan Jarot Tri Bowo Santoso	Pengembangan dan Perlindungan Obat/Jamu Tradisional Menuju Industri Obat Herbal di Jawa Tengah dan Jawa Timur	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
73	Qisthina Hasyiyati	Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Indonesia Yang Terikat Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015	Eksternal	Tidak Muat
74	Fakhrisya Zalili Sailan., S.H., M. Kn	Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ronggi di Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
75	Urip Santoso	Pengadaan Tanah Berskala Kecil Melalui Jual Beli Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Eksternal	Tidak Muat
76	Nabiyla Rista Izzati	<i>Improving Outsourcing System in Indonesia: Fixing The Gap of Labour Regulation</i>	Internal	Terbit Oktober 2017
77	Muh. Kadarisman Ismiyati Dwi Santoso	Aspek Yuridis dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat	Eksternal	Akan direview

78	Alisa Dessy Primasari	Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang Didirikan oleh Suami dan Isteri	Eksternal	Naskah ditarik oleh penulis
79	Khotibul Umam	Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia	Internal	Terbit Oktober 2017
80	Mei Susanto	<i>The Legislative Role In The Budgeting Process In Indonesia</i>	Eskternal	Tidak Muat
81	I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati, Ni Made Puspasutari Ujianti	Eksistensi Komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila	Eskternal	Terbit Februari 2018
82	Luh Putu Sudini	Peluang dan Tantangan Pengembangan Pariwisata di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)	Eskternal	Tidak Muat
83	Nadia Astriani	Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia dari Perspektif Hukum Lingkungan	Eskternal	Terbit Februari 2018
84	Sekar Anggun Gading Pinilih	Konsep Konstitusi Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Eskternal	Terbit Februari 2018
85	I Nyoman Putu Budiarta	Memanjakan Investor dengan Regulasi dalam Bidang Investasi yang Menjanjikan	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
86	Maria Kaban	Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Adat Karo	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
87	Tirtawening dan Rini Maryam	Urgensi Penerapan Skrining Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama	Eskternal	Terbit Februari 2018

88	Sodiq Olalekan Omoola Umar A. Oseni	<i>Shari'ah in the English Courts: Towards a New theory of Convergence of Laws in England</i>	Eskternal	Sudah direview utk Februari 2018 – Naskah Muat dg Revisi – belum mengirimkan naskah revisi
89	Mahaarum Kusuma Pertiwi	<i>Ethnic Profiling and Counter-Terrorism in European Human Rights Regime</i>	Internal	Terbit Oktober 2017
90	Laras Susanti	Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat	Internal	Sedang direview Reviewer
91	Supriyadi	Kewenangan Mengadili Peradilan Militer Terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Internal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
92	Rahmat Muhajir Nugroho	Implikasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
93	Anastasia Suhartati Lukito	Pendekatan Integration-Oriented System : Suatu Upaya Penanggulangan Kejahatan Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Suap Di Indonesia	Eksternal	Tidak Muat
94	Haniah Ilhami	Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia	Internal	Terbit Februari 2018
95	Ananda Prima Yurista	Meninjau Perencanaan Pembangunan Bandar Udara Temon,	Internal	Terbit Februari 2018

		Kabupaten Kulonprogo dalam Perspektif Sistem Penataan Ruang yang Integratif		
96	Agusmidah, Mohammad Ekaputra dan Affila	Reorganizing the Mechanism of Settling Labor Relations Disputes	Eksternal	Revisi di Email
97	Marojahan J.S Panjaitan	Penyitaan Kekayaan Terpidana Korupsi serta Keluarganya untuk Pengembalian Kerugian Negara	Eksternal	Tidak Muat
98	Anugrah Anditya	Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan Untuk Menanggulangi Dampak <i>Asynchronous Information</i> Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia	Internal	Terbit Februari 2018
99	Agus Sudaryanto	Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Diterapkan dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk di Bleberan, Playen, Gunung Kidul	Internal	Terbit Februari 2018
100	Fajar Winarni	Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Internal	Terbit Februari 2018
101	Zainal Arifin Mochtar	Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	Internal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi - belum direview
102	Ari Siswanto	<i>How Adat Law Breaks The Cycle Of Vengeance: Epkeret Tradition In Southern Buru</i>	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
103	Subadi, Tiara Oliviarizky Toersina	Perkembangan Konsep Atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi Di Daerah	Eksternal	Terbit Februari 2018
104	Irine Handika Ikasari	Pengaruh Perubahan Production Sharring Contract Pada Kegiatan	Internal	Sudah Direview utk

		Usaha Hulu Minyak Bumi Dari Sistem Cost Recovery Menjdai Gorss Split terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan		Februari 2018 – Naskah Muat dg Revisi – belum mengirimkan naskah revisi
105	Novendri Mohamad Nggilu, Novendri M. Nggilu, dan Suwitno Y. Imran	Alinasi Pembentukan Komisi Konstitusi Dalam Perubahan UUD NRI Tahun 1945(Kontemplasi Menuju Amandemen Kelima)	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
106	Aunur Rohim Faqih	<i>Mashlahah in The Establishing of Holding of State Owned Enterprises in Indonesia According to Islamic Perspective</i>	Eksternal	Sudah Direview utk Februari 2018 – Naskah Muat dg Revisi – belum mengirimkan naskah revisi
107	Saida Rusdiana	Kedudukan Perjanjian Jasa Hukum antara Advokat dan Klien dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Internal	Sudah Direview utk Februari 2018 – Naskah Muat dg Revisi – belum mengirimkan naskah revisi
108	Yulkarnain Harahab	Adaptabilitas Pengaturan Wakaf Dari Ajaran Fikih ke dalam Peraturan Perundang-Undangan	Internal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
109	Alam Surya Anggara	Implementasi Konvensi Ramsar 1971 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Taman Nasional Tanjung Puting	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung –

				sedang direvisi – belum direview
110	Sri Wiyanti Eddyono	Dari Korban Ke Penyitas: Akses Perempuan Korban Terhadap Keadilan	Internal	Naskah Ditarik Penulis
111	Muhammad Ilham Arisaputra	Hakikat Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara dalam Upaya untuk Menyejahterakan Rakyat Pesisir	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
112	Maimuna Renhoran Meyske Angel Rahantoknam	Penerapan Sanksi Adat dalam Pelestarian Lingkungan Pesisir di Kepulauan Kei	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
113	Sartika Intaning Pradhani	Judul di OJS: Indonesia in the Perspective of Indonesia Legal Ideology (Naskah: Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia)	Internal	Terbit Februari 2018
114	Harry Purwanto	Lingkungan Strategis Wilayah Perairan Indonesia dan Pengaruhnya pada Keamanan Maritim Nasional	Internal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
115	Dedi Harianto, Utary Maharany Barus, Mulhadi	The Completion of The Stalled Motor Vehicle Financing on The Consumer Finance Companies in Medan City & Penyelesaian Pembiayaan Macet Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen di Kota Medan	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
116	Danijel Apro, Sudarmo	Hybridity in Transitional Justice: Legacy of The “Khmer Rouge	Eksternal	Belum memenuhi

		Tribunal”		gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
117	Andy Omara	<i>The Functions of the 1945 Constitutional Preamble</i>	Internal	Akan Direview
118	Meria Utama, Irsan	Politik Hukum Bidang Konstruksi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Globalisasi Konstruksi 2020	Eksternal	Akan Direview
119	Dian Utami Mas Baka, Audyna Mayasari Muin	Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
120	Siti Zulaekhah	Model Mitigasi Risiko Pada Lembaga Penjaminan Kredit di Indonesia	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
121	Fitri Pratiwi Rasyid, Audyna Mayasari Muin	Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
122	Ridha Aditya Nugraha	Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Penumpang Maskapai Penerbangan: Kemanakah Arah Angin Bertiup?	Eksternal	Akan Direview
123	Zulfi Chairi, Aflah	Kajian Yuridis Sosiologis terhadap Dampak Keberadaan Waralaba Minimarket dan Kaitannya dengan Toko Tradisional (Riset: Kecamatan Medan Selayang)	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
124	Rizky Banyualam Permana	Network Neutrality: Standar Baru dalam Tata Kelola Internet?	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung –

				sedang direvisi – belum direview
125	Affila, Afnila, dan Agusmidah	Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Deli Serdang	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
	La Ode Angga	Harmonisasi Kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial"	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
126	La Ode Angga	Menjaga Hormani Orang Basudara dan Melakukan Pelestarian Terhadap Ekosistem Di Maluku	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
127	Rahma Fitri, Dwita Oktiarni Dimas Dwi Arso	Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
128	Taufiqul Hulam Yeni Triana Hasan Basri Muhammad Azani	Zakat Community Development (Zcd) Sebagai Model Pemberdayaan Komunitas Berbasis Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
129	Dyan Franciska Dumaris Sitanggang	Restriction of Foreign Remote Sensing Satellites' Activities Over Indonesia's National Territory*	Eksternal	Akan Direview
130	Choky Ramadhan	Konvergensi Sistem Peradilan Pidana: Pembauran Civil Law Dan Common Law Di Indonesia	Eksternal	Akan Direview

131	syarifah hidayah fatriah	Aspek Medikolegal Kekerasan dalam Rumah Tangga	Eksternal	Akan Direview
132	Normiati Ibrahim	Fenomena dan Tantangan Terkait Child Pornography di Indonesia	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
133	Hardianto Djanggih Nasrun Hipan Zulharbi Amatahir Azwar Rachmat Hambali	Problematisa Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Banggai	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
134	I Wayan Gde Wiryawan I Kt Sukawati Lanang P. Perbawa Lis Julianti	Implementation of Good Governance Principle in Public Services Based on Local Wisdom in Bali	Eksternal	Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview
135	Nabitatus Sa'adah	Pelaksanaan Program Pengampunan (Amnesti) Pajak dan Pengaruhnya pada Peningkatan Investasi di Indonesia	Eksternal	Akan Direview
136	Rizky Karo Karo	Analisis Yuridis Hak Pekerja dalam Satu Perusahaan untuk Melangsungkan Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017	Eksternal	Akan Direview

KETERANGAN:

- 1) Internal : Penulis yang merupakan Dosen Fakultas Hukum UGM
- 2) Eksternal : Penulis yang bukan merupakan Dosen Fakultas Hukum UGM
- 3) Akan Direview : artikel yang sudah sesuai dengan gaya selingkung Mimbar Hukum dan belum direview
- 4) Tidak Muat : artikel yang sudah direview dan diputuskan oleh Dewan Review “Tidak Muat”

- 5) Sejauh ini **jumlah artikel yang belum direview** adalah artikel dengan **status**:
- Akan Direview
 - Belum memenuhi gaya selingkung – sedang direvisi – belum direview

8. Daftar Artikel Yang Terbit di Mimbar Hukum Tahun 2017

a) Mimbar Hukum Vol. 29, No. 1, Februari 2017

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Eksternal/Internal	Status
1	Aktieva Tri Tijtrawati	Perlindungan Hak dan Pemenuhan Akses atas Kesehatan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	Eksternal	Februari 2017
2	Sekar Anggun Gading Pinilih	Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik	Eksternal	Februari 2017
3	Yetniwati Y	Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan	Eksternal	Februari 2017
4	Haniah Ilhami	<i>Revitalization of Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) in Performing Court-Annexed Mediation for Marital Dispute in Religious Court in D.I. Yogyakarta</i>	Internal	Februari 2017
5	Ellyne Dwi Poespasari, Sri Hajati, dan S. Soelistyowati	<i>The Application of the Development of Customary Inheritance Law According to the Jurisprudence of the Supreme Court</i>	Eksternal	Februari 2017
6	Winsherly Tan, Rina Shahriyani Shahrullah	<i>Human Rights Protection for Indonesian Migrant Workers: Chalanges for ASEAN</i>	Eksternal	Februari 2017
7	Bsariyadi	<i>The Application of Legal Construction in the Rulings of the Constitutional Court</i>	Eksternal	Februari 2017
8	Muhammad Natsir Asnawi dan Edi Hudiata	<i>Delimitation of Freedom of Contract Principle and Judge's Corrective Function in Assessing the Parties' Positions on an</i>	Eksternal	Februari 2017

		<i>Agreement</i>		
9	Ratna Juwita	<i>Health Sector Corruption as the Archenemy of Universal Health Care in Indonesia</i>	Eksternal	Februari 2017
10	Dian Ety Mayasari	<i>Informed Consent on Therapeutic Transaction as a Protection of Legal Relationship Between a Doctor and Patient</i>	Eksternal	Februari 2017
11	Aflah dan Zulfi Chairi	Tanggung Jawab <i>Air Navigation</i> dalam Pelayanan Lalu Lintas Udara untuk Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Studi pada <i>Air Navigation Bandar Udara Kualanamu dan Bandar Udara Hang Danim</i>)	Eksternal	Februari 2017
12	Anne Safrina, W.M., Herry Susilowati, dan Maria Ulfah	Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana	Eksternal	Februari 2017
13	Y. Sri Pudyatmoko dan Imma Indra Dewi	Penganggaran Keuangan Daerah yang Berpihak pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta	Eksternal	Februari 2017
14	Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara	<i>Restorative Justice</i> Hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe	Eksternal	Februari 2017

b) Mimbar Hukum Vol. 29, No. 2, Juni 2017

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Eksternal/Internal	Status
1	Susilo Andi Darma	Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat	Internal	Juni 2017
2	Muhammad Ilham Arisaputra, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, Dian Utami Mas Bakar	Akuntabilitas Administrasi Pertanahan Dalam Penerbitan Sertifikat	Eksternal	Juni 2017
3	Andri G. Wibisana	Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan	Eksternal	Juni 2017
4	Sigit Riyanto	<i>The Emergence of Universalism and the Decline of Supranationalism</i>	Internal	Juni 2017
5	Wahyu Yun Santoso	<i>Legal Aspect in Management of Hazardous and Toxic Waste</i>	Internal	Juni 2017
6	Timbo Mangaranap Sirait	<i>The Debate on the Implimentation of Ne Bis In Idem Principle in Handling the Corporate Crime in Indonesia</i>	Eksternal	Juni 2017
7	Francisca Romana Harjiyatni	<i>The Absolute Competence of the Jurisdiction of the Administrative Court in a Dispute Whose Object is a Fictive-Positive KTUN</i>	Eksternal	Juni 2017
8	Heri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, dan Isis Ikhwansyah	Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum	Eksternal	Juni 2017
9	Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata dan Laina Rafianti	Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia	Eksternal	Juni 2017
10	Mulhadi dan Zulfi Chairi	Analisa Yuridis terhadap Kesadaran Hukum Berasuransi Pedagang di Lingkungan Pasar Kota Medan	Eksternal	Juni 2017

11	Jamaluddin, Faisal dan Nanda Amalia	Urgensi Kehadiran Hukum Keluarag Di Aceh	Eksternal	Juni 2017
12	Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, & Kartika Widya Utama	Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Eksternal	Juni 2017
13	Sulistiowati dan Saida Rusdiana	<i>The Legal Studies of Trucking and Warehousing in Supporting the Smoothness of Outflow and Incoming Goods at The Port</i>	Internal	Juni 2017
14	Ida Ayu Sadnyini	<i>Patiwangi Sanction in Balinese Hindu Community's Legal Culture</i>	Eksternal	Juni 2017

c) Mimbar Hukum Vol. 29, No. 3, Oktober 2017

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Eksternal/Internal	Status
1	Khotibul Umam	Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia	Internal	Oktober 2017
2	Muntaha	Kedudukan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Eksternal	Oktober 2017
3	Henry Dianto Pardamean Sinaga	<i>The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia</i>	Eksternal	Oktober 2017
4	Yusi Amdani	<i>The Legal Force of Audit by the Board of Indonesia for the Proof of Corruptions (Critical Case over the Purchase of Sumber Waras Jospital)</i>	Eksternal	Oktober 2017
5	Trisadini Prasastinah Usanti	Analisis Pembebanan Gadai atas Sertifikat Merek di Bank Syariah	Eksternal	Oktober 2017
6	Merdiansa Paputungan	Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap Keuangan	Eksternal	Oktober 2017

		BUMN (Perseroan) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013		
7	Tedi Sudrajat dan Sri Hartini	Rekonstruksi Hukum atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil	Eksternal	Oktober 2017
8	Noer Indriati, Suyadi, Khrisnhoe K. Wahyoeningsih, dan Sanyoto.	Perlindungan dan Penemunuhan Hak Anak tentang Orangtua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas	Eksternal	Oktober 2017
9	Any Andjarwati, Ananda Prima Yurista, dan Fajri Matahati Muhammadin	<i>The Impacts of Unclear Law and Border on Environmental Protection: the Case of the Manggarai Timur and Ngada Regencies of Flores, Indonesia</i>	Internal	Oktober 2017
10	Mahaarum Kusuma Pertiwi	<i>Ethnic Profiling and Counter-Terrorism in European Human Rights Regime</i>	Internal	Oktober 2017
11	Muhammad Insa Ansari	<i>State-Owned Interprise and Public Service Obligation in the Sector of Oil and Gas</i>	Eksternal	Oktober 2017
12	Nabiyla Rista Izzati	<i>Improving Outsourcing System in Indonesia: Fixing The Gap of Labour Regulation</i>	Internal	Oktober 2017
13	Ida Kurnia dan Imelda Martinelli	<i>National and International Dimension in Indonesia's Exclusive Economic Zone</i>	Eksternal	Oktober 2017
14	Enny Narwati	<i>The Principle of Neutrality at Sea after UN Charter and UNCLOS 1980</i>	Eksternal	Oktober 2017

d) 9. Daftar Artikel Mimbar Hukum Vol. 30, No. 1, Februari 2018

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Eksternal/Internal	Keterangan
1	Henry Dianto Pardamean Sinaga	Kerugian (pada Pendapatan) Negara dalam Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia	Eksternal	Sedang diedit
2	Yahya Ahmad Zein dan Aditia	Model Hukum Pemenuhan Hak atas Pendidikan sebagai	Eksternal	Akan

	Syapriallah	Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan		diterjemahkan dalam bahasa inggris
3	I Nyoman Sujana, Komang Arini Setyawati, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti	Eksistensi Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila	Eksternal	Akan diterjemahkan dalam bahasa inggris
4	Nadia Astriani	Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia dari Perspektif Hukum Lingkungan	Eksternal	Akan diterjemahkan dalam bahasa inggris
5	Sekar Anggun Gading Pinilih	Konsep Konstitusi Hijau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Eksternal	Akan diterjemahkan dalam bahasa inggris
6	Tirtawening dan Rini Maryam	Urgensi Penerapan Skrining Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama	Eksternal	Akan diterjemahkan dalam bahasa inggris
7	Haniah Ilhami	Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia	Internal	Sedang diedit
8	Ananda Prima Yurista	Meninjau Perencanaan Pembangunan Bandar Udara Temon, Kabupaten Kulonprogo dalam Perspektif Sistem Penataan Ruang yang Integratif	Internal	Akan diterjemahkan dalam bahasa inggris
9	Anugrah Anditya	Pemilihan Konsep Peraturan Perpajakan untuk Menanggulangi Dampak <i>Asynchronous Information</i> dalam	Internal	Akan diterjemahkan

		Transaksi Elektronik di Indonesia		dalam bahasa inggris
10	Agus Sudaryanto	Nilai-nilai Kearifan Lokal yang Diterapkan dalam Pengelolaan Tanah Pariwisata Sri Gethuk di Bleberan, Playen, Gunung Kidul	Internal	Sedang diedit
11	Fajar Winarni	Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi terhadap Sekolah Cagar Budaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Internal	Sedang diedit
12	Sartika Intaning Pradhani	Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia	Internal	Sedang diedit
13	Subadi, Tiara Oliviarizky Toersina	Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik tentang Diskresi berbasis Investasi di Daerah	Eksternal	Sedang diedit
14	Sahrina Safiuddin	Implementasi Hubungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dengan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	Eksternal	Sedang diedit

e) Daftar *Editorial Board* Mimbar Hukum

No.	Nama	Instansi	Google Scholar/Scopus	Spealisasi Hukum	Status
1.	Yance Arizona, S.H., M.H., M.A.	Mahasiswa s3 Leiden Univ. Peneliti Epistema	https://scholar.google.co.id/citations?user=eryqJHQAAAAJ&hl=en h indeks : 6	Agraria dan Kenegaraan	Setuju
2.	Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,	FH Univ. Andalas	https://www.scopus.com/authid/detail.uri	Sumber Daya Alam	Setuju

	M.H.		?authorId=57188593571 Scopus ID: 57188593571		
3.	Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.	FH UI	https://scholar.google.co.id/citations?user=Ey_9mpIAAAAJ&hl=id h indeks: 12	Pidana	Setuju
4.	Dr. Lidwina Inge, S.H., M.Si.	FH UI	https://scholar.google.co.id/citations?user=P5gAArkAAAAJ&hl=id h indeks: 1	Gender, Viktimologi dan Sosiolegal study	Setuju
5.	Dr. Shidarta, S.H., M.H.	FH BINUS	https://scholar.google.co.id/citations?user=5dyQU4kAAAAJ&hl=en h indeks: 9	Metopen, Filsafat Hukum, Hukum Bisnis (HAKI) , dan sosiolegal study	Setuju
6.	Surya Tjandra, S.H., LL.M.	FH Atmajaya Jakarta	https://scholar.google.co.id/citations?user=V7R00hoAAAAJ&hl=en h indeks: 6	Perburuhan	Setuju
7.	Joeni Arianto, S.H., M.A.	FH UNAIR	https://scholar.google.com/citations?user=VTvHkq0AAAAJ&hl=th	Hukum adat, pluralisme hukum, antropologi	Setuju

			h indeks: 2	hukum, filsafat hukum	
8.	Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.	FH Unair	https://scholar.google.co.id/citations?user=Fx0TsWMAAAAJ&hl=en h indeks: 4	HTN, HAN, HAM, Hukum dan Masyarakat	Setuju
9.	Prof. I Wayan P. Windia, S.H., M.Si.	FH Univ Udayana	https://scholar.google.co.id/citations?user=q63g684AAAAJ&hl=id h indeks : 5	Hukum Adat, Sosiologi Hukum	Setuju
10.	Dr. Ramizah Wan Muhammad	FH IIUM Malaysia	https://scholar.google.com/citations?user=8SzNJEYAAAAJ&hl=en h indeks: 2	Hukum Islam, gender	Setuju

9. Daftar *Peer-Reviewers* Mimbar Hukum

No	Nama	Instansi
1	Adrianto Dwi Nugroho	FH UGM
2	Agus Sudaryanto	FH UGM
3	Agustina Merdekawati	FH UGM
4	Agustinus Supriyanto	FH UGM
5	Ananda Prima Yurista	FH UGM
6	Andy Omara	FH UGM
7	Anugrah Anditya	FH UGM
8	Any Andjarwati	FH UGM
9	Andhika Daneshjvara	FH UI
10	Ari Hernawan	FH UGM
11	Arvie Johan	FH UGM
12	Dahliana Hasan	FH UGM
13	Dani Krisnawati	FH UGM
14	Dinarjati Eka Puspitasari	FH UGM
15	Destri Budi Nugraheni	FH UGM
16	Dian Agung Wicaksono	FH UGM
17	Dina Widyaputri Kariodimedjo	FH UGM
18	Djoko Sukisno	FH UGM
19	Dwi Haryati	FH UGM
20	Enny Nurbaningsih	FH UGM
21	Eva Achjani Zulfa	FH UI
22	Fadhilatul Hikmah	FH UGM
23	Fajar Winarni	FH UGM
24	Fajri Matahati Muhammadin	FH UGM
25	Franky Butar-Butar	FH UNAIR
26	Haniah Ilhami	FH UGM
27	Harry Purwanto	FH UGM

28	Harsanto Nursadi	FH UI
29	Hartini	FH UGM
30	Hawin	FH UGM
31	Hendry Julian Noor	FH UGM
32	Heribertus Jaka Triyana	FH UGM
33	Herliana	FH UGM
34	I Gusti Agung Made Wardhana	FH UGM
35	Irna Nurhayati	FH UGM
36	Karina Dwi Nugrahati Putri	FH UGM
37	Laras Susanti	FH UGM
38	Laurensia Andrini	FH UGM
39	Mailinda Eka Yuniza	FH UGM
40	Muhammad Fatahillah Akbar	FH UGM
41	Murti Pramuwardani Dewi	FH UGM
42	Nabiyla Risfa Izzati	FH UGM
43	Nailul Amany	FH UGM
44	Niken Subekti Budi Utami	FH UGM
45	Ninik Darmini	FH UGM
46	Nurhasan Ismail	FH UGM
47	R.A. Antari Inaka Turingsih	FH UGM
48	Rafael Edy Bosko	FH UGM
49	Rangga Aditya Dahlan	FH UGM
50	Richo Andi Wibowo	FH UGM
51	Rikardo Simarmata	FH UGM
52	Rimawati	FH UGM
53	Rizky Septiana Widyaningtyas	FH UGM
54	Sartika Intaning Pradhani	FH UGM
55	Sigit Riyanto	FH UGM
56	Sri Wiyanti Eddyono,	FH UGM

57	Sudjito	FH UGM
58	Sulastriyono	FH UGM
59	Supriyadi	FH UGM
60	Sulistiowati	FH UGM
61	Susilo Andi Darma	FH UGM
62	Sutanto	FH UGM
63	Taufiq El Rahman	FH UGM
64	Tata Wijayanta	FH UGM
65	Totok Dwi Diantoro	FH UGM
66	Tomy Suryo Utomo	FH UGM
67	Trisadini Prasastinah Usanti	FH UNAIR
68	Veri Antoni	FH UGM
69	Wahyu Yun Santoso	FH UGM
70	Yulkarnain Harahab	FH UGM
71	Zahru Arkom	Pengacara

10. Kuota Insentif Publikasi

No	Uraian	Kuota	Usulan yang Diberikan Insentif
1	Insentif Publikasi Buku		
A	Insentif Naskah Buku Untuk Diterbitkan Penerbit Nasional	5	1
B	Insentif Naskah Buku Untuk Diterbitkan Penerbit Internasional	3	-
2	Insentif Publikasi Jurnal		
A	Insentif Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	10	10
B	Insentif Publikasi Jurnal Internasional Terbitan Dalam Negeri	5	-
C	Insentif Publikasi Jurnal Mimbar Hukum terbitan tahun 2016 s/d 2017	17	8
D	Insentif Publikasi Internasional Terindeks Scopus dengan Kategori Q4 dan yang Setara (terbitan dalam/luar)	2	1
E	Insentif Publikasi Jurnal Internasional dengan Kategori Q3 dan yang Setara	1	1
F	Insentif Publikasi Jurnal Internasional dengan Kategori Q2 dan yang Setara	1	1
G	Insentif Publikasi Jurnal Internasional dengan Kategori Q1 dan yang Setara	1	-
3	Insentif <i>Proceeding</i> dan Publikasi Lain <i>Publikasi Lainnya</i>		
A	Insentif Penerbitan di <i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Nasional	7	3
B	Insentif Penerbitan di <i>Proceeding</i> Seminar/Konferensi Internasional terindeks selain <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	5	5
C	Insentif Penerbitan di <i>Proceeding</i> Seminar/Konferensi Internasional terindeks <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	2	-
D	Koran dan Media Cetak lainnya skala Nasional	3	2
E	<i>Policy Paper</i> (bukan <i>Policy Brief</i>), <i>Working Paper</i> , dan Materi seminar/Workshop/Konferensi skala Nasional (makalah bukan PPT)	3	2

F	<i>Policy Paper</i> (bukan <i>Policy Brief</i>), <i>Working Paper</i> , dan Materi seminar/Workshop/Konferensi skala Internasional (makalah bukan PPT)	3	3
TOTAL		68	37

11. RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
1.	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Publikasi Buku Penerbit Nasional	KEHUTANAN. Analisis dan Refleksi Yuridis-Filosofis Problema Kehutanan di Indonesia	1 (Tunggal)	Rp 10.000.000,-	Penerbit: Dialektika
2.	Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif	1 (Pertama) dari 2 Penulis	Rp 4.000.000,- x 60% (Penulis 1) = Rp 2.400.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Rechtsvinding Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017
3.	Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 (Tunggal)	Rp 4.000.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Rechtsvinding Volume 5, Nomor 3, Desember 2016
4.	Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Kompabilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif	2 (Kedua) dari 2 Penulis	Rp 4.000.000,- x 40% (Penulis 2) = Rp 1.600.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Rechtsvinding Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017
5.	Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)	2 (Kedua) dari 2 Penulis	Rp 4.000.000,- x 40% (Penulis 2) = Rp 1.600.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Yudisial Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016
6.	Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi	2 (Kedua) dari 2 Penulis	Rp 4.000.000,- x 40% (Penulis 2) = Rp 1.600.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016
7.	Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Wakalah,, Hawalah, dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan	1 (Tunggal)	Rp 4.000.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Media Hukum, Desember 2016

11. RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
			Pembiayaan Syariah			
8.	Khotibul Umam, S.H., LL.M. (19821217 200912 1 005)	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan, Produk, dan Aktivitas Perbankan Syariah di Indonesia	1 (Pertama) dari 2 Penulis	Rp 4.000.000,- x 60% (Penulis 1) = Rp 2.400.000,-	Diterbitkan pada Jurnal Asy-Syir'ah Volume 50, Nomor 2, Desember 2016
9.	Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Bridging The Implementation of The Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress in Indonesia	1 (Tunggal)	Rp 4.000.000,-	Indonesian Law Review Universitas Indonesia, Volume 6, Nomor 1, Januari 2016
10.	Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Significance of Preventive Expenditures Valuation for Genetic Resources Bioprospecting in Indonesia	1 (Tunggal)	Rp 4.000.000,-	Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Volume 6, Nomor 1, Juli 2016
11.	Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	Signifikansi Pendekatan Kehati-hatian dalam Pengaturan Organisme Transgenik di Indonesia	1 (Tunggal)	Rp 4.000.000,-	Jurnal Hukum dan lingkungan ICEL (Indonesian Centre for Environmental Law), Volume 4, Issue 1, September 2017
12.	Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Kesadaran Hukum Umat Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Membayar Zakat Melalui Amil Zakat	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016
13.	Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Analisis Yuridis Akad Tabarru' dan Akad Tijarah dalam Produk Unit	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum

11.RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
			Link Syariah			Universitas Gadjah Mada, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016
14.	Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Prosecution of Money Laundering of Proceeds of Corruption by Anti Corruption Comission (KPK)	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016
15.	Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Patent on Nanotechnology in Indonesia and its Legal Challenges	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 28, Nomor 2, Juni 2016
16.	Haniah Ilhami, S.H., LL.M.	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Revitalization of Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) in Performing Court-Annexed Mediation for Martial Disputes In Religious Court in D.I. Yogyakarta	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 29, Nomor 1, Febuari 2017
17.	Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Kedudukan Hubungan Kerja; Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 29, Nomor 2, Juni 2017
18.	Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Legal Aspects in Management of Hazardous and Toxic Waste	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 29, Nomor 2, Juni 2017

11. RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
19.	Khotibul Umam, S.H., LL.M.	Publikasi Jurnal Mimbar Hukum Terbitan tahun 2016 s/d 2017	Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017
20.	I Gede Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.	Publikasi Internasional Terindeks Scopus dengan Kategori Q4 dan yang Setara (terbitan dalam/luar)	Moving Away from Paternalism: The New law on Disability in Indonesia	1 (Pertama) dari 2 Penulis	Rp 10.000.000,- x 60% (Penulis 1) = Rp 6.000.000,-	Asia-Pacific Journal on human Rights and the Law, University of Hongkong, Volume 18, 2017
21.	Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.	Publikasi Internasional Terindeks Scopus dengan Kategori Q3 dan yang Setara (terbitan dalam/luar)	Legal Frame of Transgenic Foods In Indonesia	1 (Pertama) dari 4 Penulis	Rp 15.000.000,- x 30% (Penulis 1) = Rp 4.500.000,-	European Food and Feed Law Review (EFFL) Lexxion Journal Germany, Volume 12, Issue 6, December 2017
22.	Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.	Publikasi Internasional Terindeks Scopus dengan Kategori Q2 dan yang Setara (terbitan dalam/luar)	Legislative Policy on the Regulation of Corporations as the Subject of Crimes	1 (Tunggal)	Rp 20.000.000,-	Journal of Financial Crime, Volume 23, Number 4, 2016
23.	Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Nasional	Eksistensi Politik Dinasti dalam Demokratisasi Partai Politik	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	<i>Proceeding</i> pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-3 "Demokratisasi Partai Politik", diselenggarakan oleh PUSAKO Universitas Andalas, Bukittinggi, 5-8 September 2016

11. RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
24.	Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Nasional	Penormaan Hukuman Cambuk sebagai Ekstentifikasi Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Legislasi	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	<i>Proceeding</i> pada Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 “HAK Asasi Manusia dan Keadilan Eko-Sosial”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 1-2 Maret 2017
25.	Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Nasional	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Penguatan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik	1 (Tunggal)	Rp 1.000.000,-	Simposium Nasional dan Pelatihan hukum Pidana dan Kriminologi IV
26.	Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Internasional terindeks selain <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	Lashing in Qanun Aceh and the Prohibition Against Torture and Cruel Treatment in the Convention Against Torture	1 (Pertama) dari 4 Penulis	Rp 3.000.000,-	The Sixth Aceh Development Internasional Conference 2017, <i>Proceedings</i> Optimizing Applicable Researchers” Volume 1, Kuala Lumpur, March 24-26, 2017, IIUM
27.	Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Internasional terindeks selain <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	De-Secularizing Legal Education in Indonesia: Examining the “Introduction to Jurisprudence” Textbooks on Norm Classification	1 (Pertama) dari 2 Penulis	Rp 3.000.000,-	Proceedings Internasional Seminar on Islamic Civilization and Thoughts (INSIST) 2017

11. RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
28.	Laras Susanti, S.H., LL.M.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Internasional terindeks selain <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	Robust yet Fragile: Enactment of Law Number 16 of 2011 to Promote the Role of Advocate in Implementing Legal Aid	1 (Pertama) dari 2 Penulis	Rp 3.000.000,-	Proceedings Internasional Conference on Law and Society IV 2017, Muhammadiyah Yogyakarta University
29.	Ninik Darmini, S.H., M.Hum.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Internasional terindeks selain <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	Analysis of Wa'd in Sharia Banking Transaction From The Perspective of Indonesia Contract Law	1 (Pertama) dari 2 Penulis	Rp 3.000.000,-	Proceedings on Internasional Concference and Call for Papers on Law, Economic, and Governance (ICOLEG) 2017
30.	Sartika Intaning Pradhani, S.H., M.H.	<i>Proceeding</i> di Seminar/Konferensi Internasional terindeks selain <i>Web of Science</i> (Thomson Reuters dan Scopus)	Kedudukan Perempuan dalam Budaya Hukum Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta	1 (Tunggal)	Rp 3.000.000,-	The International Conference on Feminism: Intersecting Identities, Agencies and Politics
31.	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.	Koran dan Media Cetak lainnya skala Nasional	Keadaban Profesor	1 (Tunggal)	Rp 300.000,-	Diterbitkan oleh Koran Sindo
32.	Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.	Koran dan Media Cetak lainnya skala Nasional	Ketua DPR Berstatus Tersangka	1 (Tunggal)	Rp 300.000,-	Diterbitkan oleh Jawa Pos
33.	Khotibul Umam, S.H., LL.M.	Policy Paper (bukan Policy Brief), Working Paper, dan Materi seminar/Workshop/Konferensi skala Nasional	Implikasi Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dan PERMA 14/2016 bagi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	1 (Tunggal)	Rp 500.000,-	Workshop "Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia" yang diselenggarakan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk,

11.RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
						Jakarta, 5 April 2017
34.	Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum	Policy Paper (bukan Policy Brief), Working Paper, dan Materi seminar/Workshop/Konferensi skala Nasional	Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan dalam Mendorong Industrialisasi yang Berlandaskan Falsafah Pancasila	1 (Tunggal)	Rp 500.000,-	Konferensi Ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI)
35.	Hartini, S.H., M.Si.	Policy Paper (bukan Policy Brief), Working Paper, dan Materi seminar/Workshop/Konferensi skala Internasional	Shifting Meaning of The Sacred value of Marriage (Study on the Practice of Interfaith Marriage Through the Establishment of the District Court	1 (Tunggal)	Rp 1.500.000,-	Makalah pada The Internasional Conference Legal Reform in Indonesia: Towards Justice Organized by Universitas Gadjah Mada in cooperation with universiteit Leiden, The University of Melbourne and The University of Sydney, and KITLV
36.	Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum	Policy Paper (bukan Policy Brief), Working Paper, dan Materi seminar/Workshop/Konferensi skala Internasional	Pengendalian Tenaga Kerja Asing oleh Pemerintah Daerah	1 (Tunggal)	Rp 1.500.000,-	The International Conference What May Lead Behind The Promotion of People Migration Protection, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, 18-20 Malang
37.	Tody Sasmita J.U, S.H., LL.M.	Policy Paper (bukan Policy Brief), Working Paper, dan Materi	3 Years of The Village Law: Is There Any Odds Remain for	1 (Tunggal)	Rp 1.500.000,-	International Conference "Adat law

11.RINCIAN USULAN PUBLIKASI YANG LOLOS SELEKSI

NO.	NAMA PENGUSUL	KATEGORI INSENTIF	JUDUL BUKU / ARTIKEL	PENULIS KE-	BESARAN INSENTIF	KETERANGAN TAMBAHAN
		seminar/Workshop/Konferensi skala Internasional	Adat Village Establishment?			100 year on: Towards a New Interpretation?" Van Vollenhoven Institute in collaboration with KITLV, May 22-24, 2017



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

UNIT RISET & PUBLIKASI

Tody Sasmitha Jiwa Utama S.H., LL.M.

Ketua Unit

Muhammad Fatahillah Akbar S.H., LL.M.

Sekretaris

Rizky Septiana Widyaningtyas S.H., M.Kn.

Sekretaris

English

Staff

Atok Muhammad Nur Hidayat

Luthfi Dwi Hartono

Febri Iqbal S.

Allamudin Al-Faruq

Andy Bagus B. J

Angelina Audrey Ardanentia

Ola Annisa Ayutama (S.H.)

Almonika Cindy Fatika Sari

Parasurama Ardi Tri Pamungkas

Nana Zhafira

Abimanyu Farras

Fadhil Mualim

www.rispub.law.ugm.ac.id